

PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, GROWTH, DAN FREE CASH FLOW TERHADAP DIVIDEND PAYOUT RATIO PERUSAHAAN DENGAN MEMPERTIMBANGKAN CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL INTERVENING

Muhammad Akhyar Adnan
Univeristas Muhammadiyah Yogyakarta
e-mail: ibnu8adnan@yahoo.com

Barbara Gunawan
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
e-mail: barbaragunawan@yahoo.co.id

Ratri Candrasari
Univeristas Muhammadiyah Yogyakarta
e-mail: era@umy.ac.id

Abstract

This study is aimed at analyzing the influence of Profitability, Leverage, Growth, and, Free Cash Flow to the Company's Dividend Payout Ratio, by considering the Corporate Governance as an intervening variable. Subjects in this study were the companies ranked in the Corporate Governance Perception Index ranking (CGPI) conducted by the Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) in 2006-2011 which published their financial statements as of December 31. The samples were 81 companies selected using purposive sampling method. The analysis tools are simple regression and path analysis. The research found that only three hypotheses are accepted, while others are rejected. The research concludes that profitability has no positive influence on dividend payout ratio; leverage negatively affect the dividend payout ratio; growth negatively affect the dividend payout ratio; free cash flow positively effect on dividend payout ratio, no positive effect of profitability on the Corporate Governance, leverage positively influencethe corporate governance; growth has no positive influence on corporate governance; free cash flow does not influence the Corporate Governance, Corporate Governance does not affect the dividend payout ratio, and the Corporate Governance is accepted to be added in the model as an intervening variable.

Keywords: *dividend payout ratio (DPR), profitability (ROA), leverage (DER), growth (GROWTH), free cash flow (FCF), Corporate Governance (CG)*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *profitability, leverage, growth, dan free cash flow* terhadap *dividen payout ratio* perusahaan dengan mempertimbangkan *corporate governance* sebagai variabel intervening. Subjek penelitian ini adalah perusahaan yang diranking oleh Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) tahun 2006-2011 yang mempublikasikan laporan keuangan di 31 Desember. Sampel penelitian ini adalah 81 perusahaan yang dipilih dengan *purposive sampling method*. Alat analisis adalah *simple regression* dan *path analysis*. Penelitian ini menemukan hanya tiga hipotesis yang diterima, hipotesis lainnya ditolak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *profitability* tidak berpengaruh terhadap *dividend payout ratio*, *leverage* berpengaruh negatif terhadap *dividen payout ratio*, *growth* berpengaruh negatif terhadap *dividend payment ratio*, *free cash flow* berpengaruh positif terhadap *dividend payout ratio*, tidak ada pengaruh positif *profitability* terhadap *corporate governance*, *leverage* positif mempengaruhi *corporate governance*, *growth* tidak berpengaruh positif terhadap *corporate governance*, *free cash flow* tidak berpengaruh terhadap *corporate governance*, *corporate governance* tidak

berpengaruh terhadap *dividend payout ratio*, dan *corporate governance* diterima untuk ditambahkan dalam model sebagai variabel *intervening*.

Kata kunci: *dividend payout ratio* (DPR), *profitability* (ROA), *leverage* (DER), *growth* (GROWTH), *free cash flow* (FCF), *Corporate Governance* (CG)

PENDAHULUAN

Dalam suatu perusahaan, salah satu tujuan yang ingin dicapai suatu adalah meningkatkan kesejahteraan dan kekayaan pemegang saham melalui peningkatan nilai perusahaan. Peningkatan nilai perusahaan dapat dicapai jika perusahaan mampu beroperasi dan mencapai keuntungan yang ditargetkan (Sulistiyowati 2010). Melalui keuntungan yang diperoleh, perusahaan mampu membagikan dividen kepada pemegang saham, meningkatkan pertumbuhan perusahaan, dan mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan.

Keputusan pembayaran dividen (*dividend payout ratio*) merupakan suatu masalah yang sering dihadapi perusahaan. Manajemen sering mengalami kesulitan untuk memutuskan apakah akan membagi dividennya atau akan menahan laba untuk diinvestasikan kembali pada proyek-proyek yang menguntungkan guna untuk meningkatkan pertumbuhan perusahaan. Pertimbangan yang diperlukan dalam membuat keputusan dividen adalah kelangsungan hidup dan pertumbuhan perusahaan (Hatta 2002). Berkaitan dengan *dividend payout ratio* tersebut, terlihat adanya konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajemen perusahaan itu sendiri.

Faktor yang berpengaruh sangat penting dalam keputusan *dividend payout ratio* suatu perusahaan adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Semakin tinggi profitabilitas, maka dividen yang dibayarkan semakin tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Suharli (2007), Sugiarto (2008), dan Marpaung dan Hadianto (2009) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap *dividend payout ratio*. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Prihantoro (2003) mengemukakan bahwa profitabilitas tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *dividend payout ratio*.

Faktor lain yang juga penting dalam keputusan *dividend payout ratio* adalah *leverage*. Rozeff (1982) menyatakan semakin besar *leverage* perusahaan maka dividen yang dibayarkan lebih rendah. Hal ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada pendanaan yang berasal dari eksternal perusahaan sehingga semakin besar proporsi hutang yang digunakan untuk struktur modal suatu perusahaan, maka akan semakin besar pula jumlah kewajibannya yang akan memengaruhi besar kecilnya dividen yang akan dibagikan. Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap *dividend payout ratio* adalah *growth* atau pertumbuhan perusahaan. Semakin cepat tingkat pertumbuhan suatu perusahaan, makin besar juga kebutuhan dana untuk waktu mendatang untuk membiayai pertumbuhannya (Riyanto 2001). Perusahaan tersebut biasanya akan lebih senang untuk menahan pendapatannya daripada dibayarkan sebagai dividen dengan mengingat batasan-batasan biayanya. Apabila perusahaan telah mencapai tingkat pertumbuhan sedemikian rupa sehingga perusahaan telah mencapai tingkat pertumbuhan yang mapan, dimana kebutuhan dananya dapat dipenuhi dengan dana yang berasal dari pasar modal atau sumber dana ekstern lainnya, maka keadaannya adalah berbeda. Dalam hal yang demikian perusahaan dapat menetapkan *dividend payout ratio* yang tinggi.

Menurut Rosdini (2009) aliran kas bebas (*free cash flow*) merupakan kas perusahaan yang dapat didistribusikan kepada kreditor atau pemegang saham yang tidak digunakan untuk modal kerja (*working capital*) atau investasi pada aset tetap. Aliran kas bebas menunjukkan gambaran bagi investor bahwa dividen yang dibagikan oleh perusahaan tidak sekedar strategi menyiasati pasar dengan maksud meningkatkan nilai perusahaan. Ada kesan kuat bahwa hubungan berbagai variabel di atas belum bersifat konklusif, selain belum konsisten, bila dibandingkan beberapa hasil penelitian

terdahulu. Oleh karena itu adalah menarik untuk mengkaji lagi: Apakah profitabilitas, *leverage*, *growth*, dan *free cash flow* berpengaruh terhadap *dividend payout ratio* dengan *corporate governance* sebagai variabel intervening baik variabel independen yang dimasukkan memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau variabel independen yang dimasukkan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen secara individu. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji apakah *profitabilitas*, *leverage*, *growth*, dan *free cash flow* berpengaruh terhadap *dividend payout ratio* dengan *corporate governance* sebagai variabel intervening baik variabel independen yang dimasukkan memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau variabel independen yang dimasukkan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen secara individu.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Profitabilitas dan *dividend payout ratio*

Menurut Suharli (2007) pihak manajemen akan membayarkan dividen untuk memberikan sinyal mengenai keberhasilan perusahaan dalam membukukan profit. Semakin besar keuntungan yang diperoleh maka akan semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. Dengan demikian profitabilitas mutlak diperlukan untuk perusahaan apabila akan membayar dividen. Hal ini sesuai dengan teori *signaling* dan teori *residual dividend policy*. Teori *signaling* menyatakan bahwa pembayaran dividen merupakan sinyal bagi investor luar mengenai prospek perusahaan dimasa datang, sehingga perusahaan yang membagikan dividen akan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki ekspektasi yang baik dimasa yang akan datang. Teori *residual dividend policy* menyatakan bahwa perusahaan membayarkan dividen hanya jika terdapat kelebihan dana atas laba perusahaan yang digunakan untuk membiayai proyek yang telah direncanakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Suharli (2007), Sugiarto (2008), dan Marpaung and

Hadianto (2009) terbukti bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap *dividend payout ratio* namun, penelitian yang dilakukan oleh Sulistiyowati (2010) mengemukakan bahwa profitabilitas tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *dividend payout ratio*. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu maka hipotesis yang diajukan adalah:

H1: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *dividend payout ratio*.

Leverage dan dividend payout ratio

Peningkatan hutang akan memengaruhi besar kecilnya laba bersih yang tersedia bagi para pemegang saham termasuk dividen yang akan diterima. Prihantoro (2003) mengungkapkan *Debt to Equity Ratio* (DER) mencerminkan kemampuan perusahaan memenuhi seluruh kewajibannya, yang ditunjukkan oleh berapa bagian modal sendiri yang digunakan untuk membayar hutang. Menurut Suharli dan Sofyan (2004) semakin besar *leverage* perusahaan maka cenderung untuk membayar dividennya lebih rendah dengan tujuan untuk mengurangi ketergantungan pada pendanaan secara eksternal sehingga semakin besar proporsi hutang yang digunakan untuk struktur modal suatu perusahaan, maka akan semakin besar pula jumlah kewajibannya yang akan memengaruhi besar kecilnya dividen yang akan dibagikan. Hal ini sesuai dengan penelitian Prihantoro (2003) yang menemukan *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *dividend payout ratio*.

Penelitian yang dilakukan Sulistiyowati (2010) menemukan bahwa *leverage* tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan mengenai jumlah pembagian dividen. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu maka hipotesis yang diajukan adalah: H2: *Leverage* berpengaruh negatif terhadap *dividend payout ratio*.

Growth dan dividend payout ratio

Tingkat pertumbuhan perusahaan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi *dividend payout ratio* (Tampubolon 2005). Semakin

cepat tingkat pertumbuhan suatu perusahaan, maka semakin besar kebutuhan dana yang diperlukan untuk membiayai pertumbuhan tersebut. Semakin besar kebutuhan dana untuk waktu mendatang maka perusahaan lebih senang untuk menahan labanya daripada membayarkannya sebagai dividen kepada pemegang saham. Teori *contract* menyatakan bahwa hubungan antara kebijakan investasi dan dividen dapat diidentifikasi melalui arus kas perusahaan, yaitu semakin besar jumlah investasi dalam satu periode tertentu, akan semakin kecil dividen yang diberikan. Perusahaan yang sedang mengalami masa pertumbuhan akan banyak membutuhkan banyak dana untuk membiayai proyek investasi dibandingkan membagikan dividen kepada pemegang saham.

Penelitian yang dilakukan oleh Suharli and Sofyan (2004) dan Marpaung and Hadianto (2009) menemukan bahwa *growth* berpengaruh signifikan terhadap *dividend payout ratio* namun, penelitian yang dilakukan Sulistiyowati (2010) tidak menemukan adanya pengaruh antara pertumbuhan dengan *dividend payout ratio*. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu maka hipotesis yang diajukan adalah:

H3: *Growth* berpengaruh negatif terhadap *dividend payout ratio*.

Free cash flow dan dividend payout ratio

Rosdini (2009) mendefinisikan *free cash flow* sebagai aliran kas diskresioner yang tersedia bagi perusahaan. *Free cash flow* dapat digunakan untuk penggunaan diskresioner seperti akuisisi dan pembelanjaan modal dengan orientasi pertumbuhan (*growth-oriented*), pembayaran hutang, dan pembayaran kepada pemegang saham baik dalam bentuk dividen. Semakin besar *freecash flow* yang tersedia dalam suatu perusahaan, maka semakin sehat perusahaan tersebut karena memiliki kas yang tersedia untuk pertumbuhan, pembayaran hutang, dan dividen. Jadi, semakin tinggi *free cash flow* perusahaan semakin tinggi pula dividen yang dibayarkan perusahaan, karena perusahaan memiliki cukup kas yang tersedia. Penelitian yang dilakukan oleh Rosdini (2009)

menemukan bahwa *free cash flow* berpengaruh positif terhadap *dividend payout ratio*. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu maka hipotesis yang diajukan adalah:

H4: *Free cash flow* berpengaruh positif terhadap *dividend payout ratio*.

Profitabilitas dan Corporate Governance

Corporate governance mengarahkan pengelolaan perusahaan pada upaya pencapaian *profit* dan *sustainability* secara seimbang (Daniri 2006). Pencapaian keuntungan tersebut merupakan wujud pemenuhan pemegang saham (*shareholder*) dan tidak dapat dilepaskan dari upaya pencapaian *sustainability* yang merupakan wujud pemenuhan kepentingan para *stakeholders*.

Perusahaan yang memperoleh pendapatan yang lambat atau profitabilitas yang sedikit maka cenderung akan mengumumkan lebih banyak tentang pelaksanaan CG guna melepaskan tekanan dari pasar (Kusumawati 2007). Penelitian yang dilakukan oleh dan Darmawati (2006) dan Kusumawati (2007) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap *dividend payout ratio*. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu maka hipotesis yang diajukan adalah:

H5: Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *Corporate governance*.

Leverage dan Corporate governance

Menurut Faisal (2006) *leverage* dapat mempresentasikan sebuah pengendalian eksternal dari *corporate governance*. Pemegang utang (*debtholders*) berkepentingan untuk melindungi investasinya dalam perusahaan dan akan secara aktif memonitor seberapa besar tingkat *leverage* perusahaan tersebut.

Black, Jang, dan Kim (2006) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat utang yang tinggi dalam struktur modalnya akan cenderung menjadi subjek untuk dikenai pengawasan oleh kreditor yang lebih ketat yang dinyatakan dalam kontrak utang yang dibuat, kreditor sangat berkepentingan dengan praktik *governance* dari debiturnya dan me-

memiliki kekuasaan yang lebih besar dibandingkan pemegang saham untuk memaksa perusahaan meningkatkan kualitas *corporate governance* perusahaan.

Darmawati (2006) dan Sulistiyowati (2010) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap kualitas penerapan *corporate governance*. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₆: *Leverage* berpengaruh positif terhadap *Corporate governance*.

Growth dan Corporate Governance

Menurut Daniri (2006) manfaat yang diberikan dari penerapan CG untuk mengurangi biaya modal sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan yang baik yang menyebabkan tingkat bunga atas dana oleh perusahaan semakin kecil seiring dengan turunnya tingkat resiko perusahaan dapat dijadikan pilar utama pendukung tumbuh kembangnya perusahaan dalam waktu jangka panjang. Pada umumnya perusahaan yang memiliki pertumbuhan tinggi membutuhkan dana tambahan untuk melakukan ekspansi sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan perbaikan dalam penerapan CG dalam rangka menurunkan biaya modal (Black, Jang, dan Kim 2006) menyatakan bahwa *growth* berpengaruh terhadap CG. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₇: *Growth* berpengaruh positif terhadap *Corporate governance*.

Free cash flow dan Corporate governance

Dividend payout ratio merupakan penggunaan laba bersih setelah pajak yang akan dibagikan kepada para pemegang saham dan berapa besar bagian laba bersih yang akan digunakan untuk membiaya investasi perusahaan. Apabila perusahaan memilih untuk membagikan laba yang diperolehnya dalam bentuk dividen, maka akan mengurangi *retained earnings* dan selanjutnya mengurangi total sumber dana internal. Sebaliknya, jika perusahaan memilih untuk menahan laba yang diperolehnya, maka kemampuan pembentukan dana internal akan

semakin besar. Jadi, semakin tinggi *free cash flow* perusahaan maka akan semakin tinggi pula CG yang diterapkan suatu perusahaan. Aliran kas yang baik membuktikan bahwa dalam suatu perusahaan tersedia kas yang cukup sehingga diperlukan tata kelola perusahaan yang lebih baik juga agar dana yang ada bisa digunakan sesuai dengan porsinya. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₈: *Free cash flow* berpengaruh positif terhadap *Corporate governance*.

Corporate Governance dan Dividend Payout ratio

Menurut Sulistiyowati (2010) tatakelola perusahaan yang baik yang merupakan bentuk dari perlindungan investor terhadap rasio pembayaran dividen. Teori keagenan menjelaskan bahwa dengan adanya *corporate governance* berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada investor bahwa pemegang saham akan menerima *return* atas dana yang telah diinvestasikan.

Perusahaan yang melaksanakan *corporate governance* dapat mendatangkan pertambahan yang signifikan untuk *dividend to cash flow ratio* (Kowalewski, Stetsyuk, dan Talavera 2007). Hal ini juga sejalan dengan Jiraporn, Kim, dan Kim (2011) dan Sulistiyowati (2010) yang menyatakan bahwa perusahaan dengan kualitas yang baik akan membayarkan dividen yang lebih besar. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu maka hipotesis yang diajukan adalah:

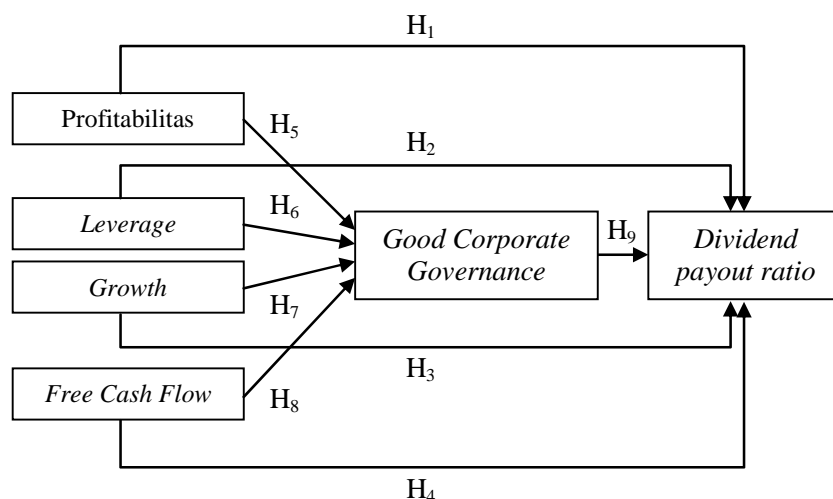
H₉: *Corporate Governance* berpengaruh negatif terhadap *dividend payout ratio*.

H₁₀: Profitabilitas, *leverage*, *growth*, dan *free cash flow* berpengaruh terhadap *dividend payout ratio* dengan *Corporate Governance* sebagai variabel intervening.

METODA PENELITIAN

Model Penelitian

Berdasarkan uraian telaah literatur di atas, dapat dibangun model penelitian dalam gambar berikut ini:



Gambar 1: Metode Penelitian

Tabel 1: Definisi Operasional Variabel

Variabel Dependen	Definisi	Pengukuran
<i>Dividend payout ratio</i> (DPR)	Penggunaan laba yang menjadi hak para pemegang saham yaitu pembagian laba dalam jumlah dividen yang dibayarkan tergantung dari kebijakan setiap perusahaan (Sulistiyowati, 2010).	$DPR = \frac{Dividen}{Laba Bersih}$
Variabel Independen	Definisi	Pengukuran
Profitabilitas (ROA)	Kemampuan manajemen untuk memperoleh laba.	$ROA = \frac{Laba Bersih}{Total Aktiva}$
<i>Leverage</i> (DER)	Kemampuan perusahaan untuk menggunakan aktiva atau dana yang mempunyai beban tetap untuk memperbesar tingkat penghasilan bagi pemilik perusahaan.	$DER = \frac{Total Kewajiban}{Total Ekuitas}$
<i>Growth</i>	Perusahaan yang berkembang adalah perusahaan yang mengalami peningkatan pertumbuhan dalam perkembangan usahanya dari tahun ke tahun.	$Total Asset Growth = \frac{(asset_t - asset_{t-1})}{asset_{t-1}}$
<i>Free cash flow</i> (FCF)	Free Cash Flow bagi perusahaan merupakan gambaran dari arus kas yang tersedia untuk perusahaan dalam suatu periode akuntansi, setelah dikurangi dengan biaya operasional dan pengeluaran lainnya (Hatta, 2002).	FCF= Arus kas dari kegiatan operasional – Pengeluaran modal.
Variabel Intervening	Definisi	Pengukuran
<i>Corporate Governance</i> (CG)	Hubungan partisipan dalam menentukan arah dan kinerja (Monks dan Minow, 1961 dalam Darmawati, 2005)	Golongan-Golongan: A=85,00-100,00/Sangat Terpercaya, B=70,00-84,99/Terpercaya, C=55,00-69,99/Cukup Terpercaya

Subyek Penelitian dan Jenis Data

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang masuk dalam pemeringkatan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang dilakukan oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) tahun 2006-2011 serta menerbitkan laporan keuangan per 31 Desember. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan

perusahaan yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia dan situs resmi perusahaan sampel.

Teknik Pengambilan Sampel

Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan yang masuk dalam pemeringkatan penerapan *corporate governance*

- yang dilakukan oleh IICG pada tahun 2006-2011 berupa skor pemeringkatan CGPI.
2. Perusahaan yang membagikan keuntungan berupa dividen kepada para pemegang saham pada tahun pemeringkatan CGPI.
 3. Perusahaan yang terdaftar di BEI dan mempublikasikan laporan keuangan auditan per 31 Desember serta dinyatakan dalam satuan mata uang rupiah.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik dokumentasi, yaitu teknik yang mendokumentasikan data yang telah dipublikasikan. Data dokumentasi diperoleh dari database pojok BEI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan situs resmi perusahaan sampel.

Definisi Operasional Variabel

(lihat tabel 1)

Uji Kualitas Data

Sebelum dilakukan uji hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji kualitas data yaitu uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik terdiri dari:

1. Uji Multikolinearitas, bertujuan untuk menguji apakah ditemukan adanya korelasi antar variabel independen.
2. Uji Autokorelasi, bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terdapat korelasi antara kesalahan pada periode t dengan periode t-1.
3. Uji Heteroskedastisitas, yaitu suatu pengujian untuk melihat apakah data mempunyai varian yang sama (homogen) atau data mempunyai varian yang tidak sama (heterogen).
4. Uji Normalitas, untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah model regresi yang berdistribusi normal.

Uji Hipotesis dan Analisis Data

1. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
 - a. Uji Statistik Deskriptif
Analisis ini disajikan dengan menggunakan tabel *statistic descriptive* yang memaparkan

nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*), dan standar deviasi (*standard deviation*).

- b. Regresi berganda
Dalam regresi berganda digunakan untuk mengetahui apakah hipotesis penelitian terbukti signifikan atau tidak signifikan, dengan persamaan sebagai berikut:

$$DPR_{it} = \beta_0 + \beta_1 ROA_{it} + \beta_2 DER_{it} + \beta_3 GROWTH_{it} + \beta_4 FCF_{it} + e \dots\dots\dots (1)$$

$$CG_{it} = \beta_0 + \beta_1 ROA_{it} + \beta_2 DER_{it} + \beta_3 GROWTH_{it} + \beta_6 FCF_{it} + e \dots\dots\dots (2)$$

- c. *Path Analysis* (Diagram Jalur)
Path analysis digunakan untuk menggambarkan pola hubungan yang mengungkapkan pengaruh seperangkat variabel terhadap variabel lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui variabel lain sebagai variabel intervening. Suatu variabel dikatakan sebagai variabel intervening jika hubungan tidak langsung lebih besar dari hubungan langsung.

2. Pengujian hipotesis
 - a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)
Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui prosentase sumbangan pengaruh serentak variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat.
 - b. Uji Nilai t
Uji t digunakan untuk menguji secara parsial masing-masing variabel.
 - c. Uji Nilai F
Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas dalam model penelitian mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat.
 - d. *Path Analysis* (diagram jalur)
Path analysis digunakan untuk menggambarkan pola hubungan yang mengungkapkan pengaruh seperangkat variabel terhadap variabel lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui variabel lain sebagai variabel intervening. Dalam diagram jalur untuk menerima atau menolak hipotesis digunakan nilai koefisien pengaruh langsung dan tidak langsung. Hipotesis diterima atau variabel dikatakan sebagai variabel inter-

vening jika nilai koefisien hubungan tidak langsung lebih besar dari nilai koefisien hubungan langsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Obyek Penelitian

Obyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang masuk dalam pemeringkatan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang dilakukan oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) tahun 2006-2011 serta menerbitkan laporan keuangan perusahaan yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan situs resmi perusahaan sampel. Dalam penelitian ini perusahaan yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dan dapat digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini berjumlah 81 perusahaan.

Pembahasan

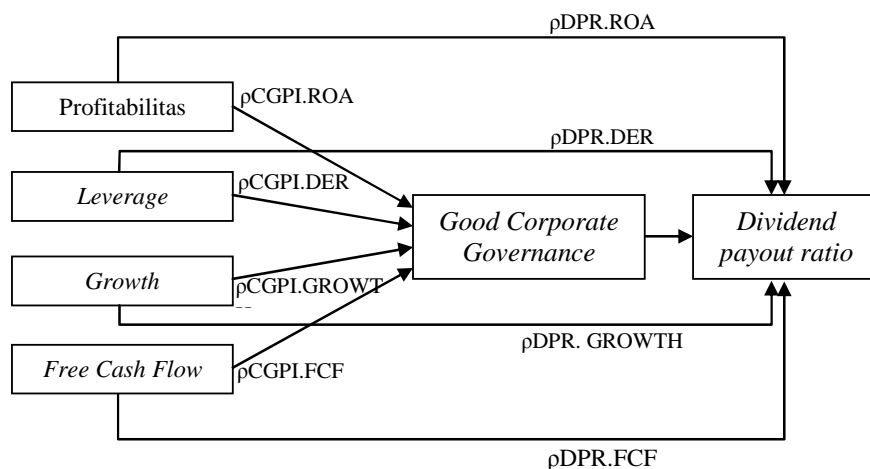
Profitabilitas dan Devidend Payout Ratio

Hipotesis satu yang menyatakan profitabilitas berpengaruh positif terhadap *dividend payout ratio* ditolak, nilai sig $0,546 > \alpha 0,05$, koefisien regresi tidak searah dengan yang dihipotesiskan, maka hipotesis satu ditolak. Artinya profitabilitas yang dimiliki perusahaan tidak menjamin bahwa perusahaan tersebut juga akan membagikan dividen yang lebih banyak pula terhadap pemegang saham. Hai ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh

Sulistyowati (2010) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *dividend payout ratio*. Hipotesis ini sesuai dengan *packing order theory* (Rosdini 2009) yang menyatakan bahwa perusahaan yang *profitable* memiliki dorongan untuk membayar dividen relatif rendah untuk pemegang saham dikarenakan perusahaan yang sedang tumbuh akan banyak menggunakan labanya untuk proyek-proyek investasi bukan untuk dibagikan kepada pemegang saham.

Leverage dan Dividend Payout Ratio

Hipotesis dua yang menyatakan *leverage* berpengaruh negatif terhadap *dividend payout ratio* ditolak, nilai sig $0,027 < \alpha 0,05$, koefisien regresi tidak searah dengan yang dihipotesiskan, *leverage* tidak berpengaruh negatif terhadap *dividend payout ratio*. Artinya, semakin tinggi *leverage* suatu perusahaan maka akan semakin tinggi pula dividen yang dibayarkan. Keputusan dividen perusahaan seringkali dicampuradukkan dengan keputusan pembiayaan dan investasi (Mahadwarta, 2002). Beberapa perusahaan membiayai pengeluaran modal sebagian besar dari pinjaman, sehingga memberikan kas dividen, dalam kasus ini dividen yang tinggi adalah akibat keputusan peminjaman (*borrowing decision*). Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Mahadwarta (2002) yang membuktikan bahwa semakin tinggi *leverage* suatu perusahaan, maka akan semakin tinggi pula dividen yang dibayarkan.



Gambar 2: Diagram Jalur

Growth dan Dividend Payout Ratio

Hipotesis tiga yang menyatakan *Growth* berpengaruh negatif terhadap *dividend payout ratio* ditolak, nilai sig $0,022 < \alpha 0,05$, koefisien regresi tidak searah dengan yang dihipotesiskan, *growth* tidak berpengaruh negatif terhadap *dividend payout ratio*. Artinya, semakin cepat tingkat pertumbuhan suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula dividen yang dibayarkan. Perusahaan yang sedang tumbuh akan banyak mengeluarkan banyak dana. Dana yang dikeluarkan termasuk juga dana untuk pembagian dividen kepada pemegang saham. Semakin perusahaan tersebut tumbuh maka perusahaan membutuhkan suatu *signal* bahwa perusahaan tersebut memiliki prospek yang bagus dimasa datang. Hal ini sesuai dengan teori *signaling* yang menyatakan bahwa pembayaran dividen merupakan sinyal bagi investor luar mengenai prospek perusahaan dimasa datang, sehingga perusahaan yang semakin tumbuh akan banyak melakukan pembayaran dividen guna untuk memberikan *signal* bagi pemegang saham mengenai prospek perusahaan dimasa datang. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hatta (2002), Sulistyowati (2010), dan Latiefasari (2011) yang menemukan bahwa *growth* tidak berpengaruh negatif terhadap *dividend payout ratio*.

Free Cash Flow dan Dividend Payout Ratio

Hipotesis empat yang menyatakan *free cash flow* berpengaruh positif terhadap *dividend payout ratio* diterima, nilai sig $0,011 < \alpha 0,05$, koefisien regresi searah dengan yang dihipotesiskan, *free cash flow* berpengaruh positif terhadap *dividend payout ratio*. Artinya, semakin tinggi *free cash flow* yang tersedia bagi perusahaan maka akan semakin tinggi pula dividen yang dibayarkan. Semakin besar *freecash flow* yang tersedia dalam suatu perusahaan, maka semakin sehat perusahaan tersebut karena memiliki kas yang tersedia untuk pertumbuhan, pembayaran hutang, dan dividen. Jadi, semakin tinggi *free cash flow* perusahaan semakin tinggi pula dividen yang dibayarkan perusahaan, karena perusahaan memiliki cukup kas yang tersedia. Penelitian

yang dilakukan oleh Rosdini (2009) menemukan bahwa *free cash flow* berpengaruh positif terhadap *dividend payout ratio*.

Profitabilitas dan Corporate Governance

Hipotesis lima yang menyatakan profitabilitas berpengaruh negative terhadap *Corporate Governance* ditolak, nilai sig $0,931 > \alpha 0,05$, koefisien regresi tidak searah dengan yang dihipotesiskan. Artinya, jika suatu perusahaan memiliki profitabilitas yang sedikit, maka perusahaan juga tidak akan membagikan dividen kepada para pemegang saham. Profitabilitas yang sedikit mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut sedang tidak baik atau *profitable*. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang sedikit untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan saja sulit, apalagi untuk membagikan dividen kepada para pemegang saham. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulistyowati (2010) yang menyatakan bahwa profitabilitas suatu perusahaan berhubungan positif terhadap *Corporate governance*.

Leverage dan Corporate Governance

Hipotesis enam yang menyatakan *leverage* berpengaruh positif terhadap *Corporate Governance* diterima, nilai sig $0,020 < \alpha 0,05$, koefisien regresi searah dengan yang dihipotesiskan, *leverage* berpengaruh positif terhadap *Corporate governance*. Artinya, perusahaan yang memiliki tingkat hutang yang tinggi dalam struktur modalnya akan cenderung menjadi subjek untuk dikenai pengawasan oleh kreditor yang lebih ketat yang dinyatakan dalam kontrak hutang yang dibuat, kreditor sangat berkepentingan dalam praktik *governance* dari debiturnya dan memiliki kekuasaan yang lebih besar dibandingkan pemegang saham untuk memaksa perusahaan meningkatkan kualitas *Corporate Governance* perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki *leverage* yang tinggi akan lebih banyak mengumumkan *Corporate Governance* perusahaannya guna untuk memiliki reputasi yang baik di mata kreditor. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Darmawati (2006) dan Sulistyowati (2010) yang menyata-

kan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *Corporate governance*.

Growth dan Corporate Governance

Hipotesis tujuh yang menyatakan *Growth* berpengaruh positif terhadap *Corporate Governance* ditolak, nilai sig 0,344 > α 0,05, koefisien regresi tidak searah dengan yang dihipotesiskan, *growth* tidak berpengaruh positif terhadap *Corporate governance*. Artinya, perusahaan yang sedang mengalami pertumbuhan atau pertumbuhan suatu perusahaan tersebut tinggi, maka akan banyak membutuhkan banyak dana untuk membiayai kegiatan perusahaan tersebut, sehingga perusahaan yang memiliki pertumbuhan yang tinggi akan mengabaikan *corporate governance* karena dana yang dibutuhkan sangat banyak untuk proyek-proyek investasi perusahaan. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusumawati (2007) yang menyatakan bahwa *growth* tidak berpengaruh positif terhadap *corporate governance*.

Free Cash Flow dan Corporate Governance

Hipotesis delapan yang menyatakan *Free Cash Flow* berpengaruh positif terhadap *Corporate Governance* ditolak, nilai sig 0,492 > α 0,05, koefisien regresi tidak searah dengan yang dihipotesiskan, *free cash flow* tidak berpengaruh positif terhadap *Corporate governance*. Artinya, semakin tinggi *free cash flow* suatu perusahaan maka akan semakin rendah CG yang diterapkan. Perusahaan dengan aliran kas bebas yang berlebihan akan cenderung mendorong terjadinya konflik keagenan berupa pemanfaatan dana proyek yang bertujuan untuk meningkatkan keuntungan manajer, sehingga dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham sedikit (Murhadi 2008). Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Murhadi (2008) yang menyatakan bahwa *free cash flow* suatu perusahaan yang semakin tinggi berpengaruh terhadap *dividend payout ratio* yang diterapkan suatu perusahaan. Semakin tinggi *free cash flow* suatu perusahaan, maka akan semakin tinggi pula dividen yang dibayarkan, karena pembiayaan dalam suatu perusahaan berasal dari pinjaman atau hutang.

Corporate Governance dan Dividend Payout Ratio

Hipotesis sembilan yang menyatakan *Corporate Governance* berpengaruh negatif terhadap *Dividend Payout Ratio* ditolak, nilai sig 0,419 > α 0,05, koefisien regresi tidak searah dengan yang dihipotesiskan, *corporate governance* tidak berpengaruh negatif terhadap *dividend payout ratio*. Artinya, suatu perusahaan yang memiliki tata kelola yang baik akan berusaha memberikan *signal* positif kepada kreditur dengan membagikan dividennya kepada pemegang saham. Hipotesis kesepuluh yang menyatakan profitabilitas, *leverage*, *growth*, dan *free cash flow* berpengaruh terhadap *dividend payout ratio* dengan *Corporate Governance* sebagai variabel intervening diterima, profitabilitas, *leverage*, *growth*, dan *free cash flow* berpengaruh terhadap *dividend payout ratio* dengan *Corporate Governance* sebagai variabel intervening. Hal ini dilihat dari koefisien langsung dan tidak langsung, koefisien tidak langsung semua variabel independen lebih besar dari koefisien pengaruh langsung, maka hipotesis diterima. Artinya variabel *Corporate Governance* merupakan variabel intervening yang ditambahkan dalam model penelitian.

SIMPULAN

Berdasarkan pengujian analisis regresi maka didapatkan hasil bahwa profitabilitas (ROA) tidak berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen (DPR), *leverage* (DER) tidak berpengaruh negatif terhadap *dividend payout ratio* (DPR), *growth* (GROWTH) tidak berpengaruh negatif terhadap *dividend payout ratio* (DPR), *free cash flow* (FCF) berpengaruh positif terhadap *dividend payout ratio* (DPR), profitabilitas (ROA) tidak berpengaruh positif terhadap *Corporate governance* (CG), *leverage* (DER) berpengaruh positif terhadap *Corporate governance* (CG), *growth* (GROWTH) tidak berpengaruh positif terhadap *Corporate governance* (CG), *free cash flow* (FCF) tidak berpengaruh positif terhadap *Corporate governance* (CG), *Corporate governance* (CG) tidak berpengaruh negatif terhadap *dividend payout ratio* (DPR).

Hasil pengujian *path analysis* menunjukkan bahwa nilai koefisien berpengaruh tidak langsung lebih besar dari nilai koefisien pengaruh langsung, maka profitabilitas (ROA), *leverage* (DER), *growth* (GROWTH), dan *free cash flow* (FCF) berpengaruh terhadap *dividend payout ratio* (DPR) dengan variabel *Corporate governance* (CG) sebagai variabel intervening, sehingga dalam penelitian ini *Corporate Governance* (CG) yang dimasukkan dalam model merupakan variabel intervening atau variabel pengganggu antara profitabilitas (ROA), *leverage* (DER), *growth* (GROWTH), dan *free cash flow* (FCF) dengan *dividend payout ratio* (DPR).

Keterbatasan

Penelitian hanya menggunakan faktor fundamental perusahaan yang digunakan sebagai dasar untuk memprediksi DPR, yang meliputi ROA, DER, GROWTH, FCF, dan CG. Terdapat sejumlah variabel lain yang dapat diduga mempunyai pengaruh. Selain itu, subjek yang diteliti masih terbatas kepada emiten yang tergabung dalam *Corporate Governance Perception Index* (CGPI). Kemampuan prediksi sebesar 16,4% mengindikasikan perlunya banyak faktor fundamental yang lain seperti likuiditas, solvabilitas dan aktivitas perusahaan dimasukkan sebagai prediktor dalam memprediksi DPR. Peneliti menyarankan untuk mempertimbangkan penambahan variabel independen seperti solvabilitas, likuiditas, atau aktivitas.

Saran

Seperti sudah disinggung di atas, nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,164 atau 16,4% hal ini bermakna bahwa 16,4% variasi DPR yang bisa dijelaskan oleh variasi dari kelima variabel bebas yaitu ROA, DER, GROWTH, FCF, dan CG sedangkan sisanya sebesar 83,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model. Hal ini mengindikasikan perlunya banyak faktor fundamental yang lain seperti likuiditas, solvabilitas dan aktivitas perusahaan dimasukkan sebagai prediktor dalam memprediksi DPR. Disamping itu juga perlu dilakukan perluasan penelitian yang menghubungkan

antara variabel makro ekonomi dan non ekonomi terhadap DPR.

Variabel makro ekonomi yang mungkin berpengaruh terhadap DPR antara lain tingkat bunga, kurs rupiah terhadap valuta asing, neraca pembayaran, ekspor-impor dan kondisi ekonomi lainnya serta variabel non ekonomi seperti kondisi politik negara. Mungkin akan memberikan hasil yang lebih baik jika faktor fundamental lainnya seperti aktivitas perusahaan dimasukkan dalam model. Demikian pula variabel makro ekonomi (tingkat bunga, kurs rupiah terhadap valuta asing, neraca pembayaran, ekspor-impor dan kondisi ekonomi lainnya) serta variabel non ekonomi (seperti kondisi politik) mungkin signifikan berpengaruh terhadap DPR, mengingat sampai dengan saat penelitian berlangsung variabel-variabel makro ekonomi dan non-ekonomi tersebut masih menunjukkan kondisi yang belum stabil.

Penggunaan variabel intervening yang masih perlu diuji lagi oleh peneliti yang akan selanjutnya, karena dari penelitian sebelumnya hanya ada satu peneliti yang menggunakan variabel *Corporate governance* sebagai variabel intervening dan hasilnya ditolak, artinya variabel CG bukan sebagai variabel intervening atau variabel pengganggu, sehingga untuk penelitian mendatang diperlukan pengujian lagi untuk memperkuat hasil hipotesis ini.

DAFTARREFERENSI

- Black, B. S., H. Jang, dan W. Kim. 2006. Predicting firms' corporate governance choices: Evidence from Korea. *Journal of Corporate Finance* 12 (3): 660-691.
- Daniri, M. A. 2006. *Good corporate governance: Konsep dan penerapannya dalam konteks Indonesia*. Jakarta: Ray Indonesia.
- Darmawati, D., K. Khomsiyah, dan R. G. Ayu. 2006. Hubungan corporate governance dan kinerja perusahaan. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia* 8 (1): 65-81.
- Darminto. 2008. Pengaruh profitabilitas, likuiditas, struktur modal, dan kepemilikan

- saham terhadap kebijakan dividen. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 1 (2): 87–97.
- Faisal. 2006. Hubungan antara set kesempatan investasi, tata kelola perusahaan, dan kinerja. *Wahana Akuntansi Jurnal Ilmiah* 1 (2): 106–22.
- Ghozali, I. 2009. *Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS*. 4th ed. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hatta, A. J. 2002. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen: Investigasi pengaruh teori stakeholder. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia* 6 (2): 1–22.
- Jiraporn, P., J. Kim, dan Y. S. Kim. 2011. Dividend payouts and corporate governance quality: An empirical investigation. *Financial Review* 46 (2): 251–279.
- Kowalewski, O., I. Stetsyuk, dan O. Talavera. 2007. Corporate governance and dividend policy in Poland. <http://fic.wharton.upenn.edu/fic/papers/07/0709.pdf> (diakses 17 Maret 2014).
- Kusuma, H. 2004. Hubungan dividen inisiasi dan informasi asimetri: Pendekatan hazard rate. *Jurnal Siasat Bisnis* 1 (9): 15–34.
- Kusumawati, D. N. 2007. Profitability and corporate governance disclosure: An Indonesian study. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia* 10 (2): 131–46.
- Mahadwarta, P. A. 2002. Interdependensi antara kebijakan leverage dengan kebijakan dividen: Perspektif teori keagenan. *Jurnal Riset Akuntansi, Manajemen, dan Ekonomi* 2 (2).
- Marpaung, E. I, dan B. Hadianto. 2009. Pengaruh profitabilitas dan kesempatan investasi terhadap kebijakan dividen: Studi empiris pada emiten pembentuk indeks LQ45 di bursa efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi* 1 (1): 70–84.
- Murhadi, W. 2008. Pengaruh tahapan daur hidup perusahaan, good corporate governance, set kesempatan investasi, aliran kas bebas, dan struktur kepemilikan terhadap nilai perusahaan: Tinjauan teoritis. *Jurnal Ekonomi & Bisnis* 12 (2): 14–28.
- Prihantoro. 2003. Estimasi pengaruh dividen payout ratio pada perusahaan publik di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Bisnis* 1 (8): 7–14.
- Riyanto, B. 2001. *Dasar-dasar pembelanjaan perusahaan edisi empat*. Yogyakarta: Badan Penerbit Gadjah Mada.
- Rosdini, D. 2009. Pengaruh free cash flow terhadap dividen payout ratio. *Working Paper in Accounting and Finance*. Bandung.
- Rozeff, M. S. 1982. Growth, beta, and agency cost as determinants of dividend payout ratio. *Journal of Financial Research* 5 (3): 249–259.
- Sugiarto. 2008. Kebijakan dividen perusahaan-perusahaan terbuka non keuangan yang dikontrol keluarga. *Jurnal Akuntansi & Keuangan* 7 (2): 135–149.
- Suharli, M. 2007. Pengaruh profitabilitas dan investment opportunity set terhadap kebijakan dividen tunai dengan likuiditas sebagai variabel penguat. *Jurnal Akuntansi & Keuangan* 9 (1): 9–17.
- Suharli, M., and H. Sofyan. 2004. Studi empiris terhadap faktor tertentu kebijakan jumlah dividen. *Media Riset Akuntansi, Auditing, Dan Informasi* 4 (3): 223–245.
- Sulistiyowati, I. 2010. Pengaruh profitabilitas, leverage, dan growth terhadap kebijakan dividen dengan good corporate governance sebagai variabel intervening. Purwokerto.
- Tampubolon, M. P. 2005. *Manajemen keuangan (finance management)*. Bogor: Ghalia Indonesia.

ANALISIS HUBUNGAN KUALITAS SITUS WEB DAN KUALITAS INFORMASI AKUNTANSI PERSEPSIAN

Juliwati Limbong

Fakultas of Ekonomika and Bisnis, Universitas Gadjah Mada
e-mail: lialimbo@hotmail.com

Didi Achjari

Fakultas of Ekonomika and Bisnis, Universitas Gadjah Mada
e-mail: didi_a@ugm.ac.id

Abstract

One of the Investment Manager (IM) tasks in mutual fund is to arrange investment portfolio. To do so, IM relies on information that are available and can be accessed through the particular company's (share and obligation issuers) website. This study aims to investigate the impact of website quality on perceived accounting information quality, and also the variables (Perceived Information Asymmetric and Signal Credibility) that may moderate the relationship. In addition, the impact of perceived accounting information quality on accounting information trust is investigated. The questionnaire is administered to 87 asset management companies using purposive sample method. Responses from 33 companies then analyses using PLS based structural equation modeling (SEM). The results suggest that website quality positively influence perceived accounting information quality. Unfortunately, both moderating variables are not supported. Finally, the study shows that perceived accounting information quality affects accounting information trust.

Keywords: *Web quality, perceived information asymmetric, signal credibility, perceived accounting information quality.*

Abstrak

Manager Investasi (MI) sebagai pengelola reksadana bertanggung jawab memilih portofolio investasi misal saham dan obligasi yang tersedia di pasar modal. Dalam pembentukan komposisi portofolio investasi, MI bergantung pada ketersediaan informasi emiten yang bisa diperoleh melalui situs web. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh kualitas situs web emiten terhadap kualitas informasi akuntansi persepsian, dan meneliti adanya variabel pemoderasi hubungan kedua variabel tersebut. Selain itu penelitian ini juga ingin mengetahui sejauh mana pengaruh kualitas informasi akuntansi persepsian terhadap kepercayaan (trust) akan kualitas informasi akuntansi. Kuesioner disebar ke perusahaan manajemen aset secara purposive sampling. Sampel penelitian ini adalah 87 perusahaan manajemen aset yang terdaftar di Bursa Efek. Hasilnya adalah 33 perusahaan memberikan respon yang bisa dianalisis. Data diolah menggunakan PLS SEM. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan Kualitas Situs Web berpengaruh positif terhadap Kualitas Informasi Akuntansi Persepsian. Sebaliknya, Asimetri Informasi Persepsian dan Kredibilitas Signal tidak terbukti memoderasi hubungan antara Kualitas Situs Web dan Kualitas Informasi Akuntansi Persepsian. Sebagai tambahan, penelitian ini menunjukkan bahwa Kualitas Informasi Akuntansi Persepsian mempengaruhi Kepercayaan (trust) para MI atas Kualitas Informasi Akuntansi emiten.

Kata kunci: Kualitas Situs Web, Asimetri Informasi Persepsian, Kredibilitas Signal, Kepercayaan akan Kualitas Informasi Akuntansi.

PENDAHULUAN

Para Manajer Investasi (MI) mempunyai minat yang tinggi untuk mengelola dana dari masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan jumlah MI yang telah beroperasi dan memiliki izin sebanyak 74 perusahaan (Otoritas Jasa Keuangan 2011). Dana kelolaan (Nilai Aktiva Bersih/*Asset Under Management/AUM*) reksadana yang dimiliki para investor menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan. Dana kelolaan yang pada bulan Agustus 2003 sebesar Rp 81,3 triliun (Herwidayatmo 2009) telah meningkat menjadi Rp 209.791.886.186.252,00 per 30 Juni 2014.

Kendala yang dihadapi para MI dalam melakukan tugasnya antara lain akses informasi yaitu tidak tersedianya informasi setiap saat (Kotb dan Roberts 2011), serta prosedur *on time transaction* dengan masa akses yang terbatas. Kondisi tersebut dapat berkontribusi terhadap timbulnya resiko salah tafsir (*mis-leading*) informasi. Berdasarkan keadaan tersebut muncul kesepakatan di antara para ahli, agar dilakukan evaluasi secara berkesinambungan terhadap Sistem Pengendalian Internal (SPI) perusahaan (PCAOB 2007; COSO 2013). Dengan diterapkannya SPI yang memadai, akan dihasilkan informasi keuangan yang reliabel (Doyle, Ge, dan McVay 2007), karena diharapkan dapat memberi penjaminan penting terhadap kualitas data yang dihasilkan. Kegiatan pemantauan terhadap SPI, dapat dilakukan secara berkelanjutan (*continuous online/real time*) sebagaimana tugas yang diemban oleh Dewan Komisaris, yang dilaksanakan oleh Komite Audit Independen (Internal auditor). SPI melekat pada proses penyajian laporan keuangan, sehingga mempengaruhi kualitas informasi keuangan. Kelemahan SPI akan mempengaruhi kepercayaan para pengguna informasi (Malaescu dan Sutton 2015).

Bentuk usaha yang mengelola investasi secara khusus disebut dalam struktur pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupa kegiatan jasa keuangan sektor pasar modal (Undang-Undang No 21 Tahun 2011). Kegiatan jasa keuangan ini dikelola oleh MI dan dapat dibimbing oleh penasihat investasi, agar mempermudah dan menjamin

keamanan berinvestasi bagi masyarakat luas (UU 8/1995). MI diharapkan memiliki keahlian dan profesionalitas yang tinggi, agar dapat mengembangkan usaha. Kegiatan pengelolaan investasi menuntut kemahiran bisnis dan penguasaan sistem teknologi informasi yang dilandasi kemampuan menilai integritas SPI perusahaan (Flowerday dan Solms 2005).

Saat ini para investor di pasar modal telah menggunakan sistem informasi dan komunikasi (*Information and Communication Technology*) agar dapat melakukan investasi setiap saat. Selain itu, mereka bisa mengganti dari satu pilihan investasi kepada pilihan investasi lainnya dengan cepat. Penggunaan teknologi informasi dapat memberikan keyakinan atas pengendalian sistem informasi, mengurangi bias informasi, memperhatikan keamanan informasi, serta memungkinkan untuk tersajinya informasi keuangan secara *real time* (Kotb dan Roberts 2011).

Perusahaan diharapkan dapat menyediakan profil keuangannya secara cepat ketika dibutuhkan dan berkelanjutan melalui penggunaan ICT berbasis web (*e-business*). ICT dapat mengintegrasikan kegiatan perusahaan baik secara internal maupun eksternal. ICT juga membantu para pelaku pasar modal untuk melakukan aktivitasnya tanpa harus mempertimbangkan jarak dan waktu bertransaksi.

Para MI sebagai pengelola investasi reksadana, mengakses informasi akuntansi emiten antara lain melalui situs web. Para MI sebagai pengguna informasi akuntansi memiliki perhatian pada ketepatan (*accuracy*) dan reliabilitas informasi (Nikolaou, Chymis, dan Evangelinos 2013; Vasarhelyi 1999). Lebih jauh, kualitas informasi tersebut dipengaruhi oleh keandalan sistem pengendalian internal (SPI) selama proses penyajian informasi keuangan (Doyle *et al.* 2007). Berdasarkan PCAOB 2007, evaluasi berkelanjutan terhadap SPI telah diterapkan pada beberapa negara Amerika (Vasarhelyi, Teeter, dan Krahel 2010).

Kotb dan Roberts (2011) mengatakan bahwa pengendalian diupayakan untuk meningkatkan *accuracy* informasi akuntansi, kepercayaan terhadap penggunaan sistem informasi *real time*, serta mengamankan informasi

dari pihak yang tidak berkepentingan. Sebagai tambahan, perolehan informasi akuntansi melalui situs web, dipengaruhi oleh tingkat keamanan informasi (*security*), kecepatan tanggap (*Response Time*), kesesuaian dengan penugasan (*Fit to Task*), dan keterhubungan antar informasi (*Tailored Information*).

Sebagai dasar penentuan keputusan investasi, MI membutuhkan informasi akuntansi emiten, baik yang seketika dan setiap saat (*real time* dan *online*) melalui situs web ataupun yang tahunan (laporan keuangan tahunan). Karena pembentukan portofolio investasi berlangsung lebih dari satu kali setiap tahun, dan karena laporan keuangan (*audited report*) hanya terbit dalam periode tahunan, maka MI dituntut untuk bisa menggunakan dan mempercayai informasi keuangan emiten yang tersedia secara online pada saat pembuatan keputusan investasi. Dalam hal ini, MI juga harus mampu menilai SPI emiten secara implisit untuk bisa mempercayai kualitas informasi akuntansi emiten yang disajikan secara online. Informasi akuntansi yang berkualitas adalah memiliki kriteria akurat, reliabel, verifikasiabel, tepat waktu dan dapat dipercaya (Loiacono, Watson, dan Goodhue 2007; Malaescu dan Sutton 2015; Nikolaou *et al.*, 2013; Vasarhelyi 1999).

Penelitian terdahulu mengenai penggunaan situs web untuk keperluan komersial (Wells, Valacich, dan Hess 2011) dan untuk keperluan pengembangan penelitian sistem informasi (Loiacono *et al.* 2007) menunjukkan bahwa kualitas situs web mempengaruhi tingkat kepercayaan pengguna situs web. Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian Wells *et al.* (2011) bertujuan untuk menguji sejauh mana Kualitas Situs Web mempengaruhi Kualitas Informasi Akuntansi Persepsian. Selain itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana variabel Asimetri Informasi Persepsian dan Kredibilitas Sinyal memoderasi hubungan antara Kualitas Situs Web dengan Kualitas Informasi Akuntansi Persepsian. Sebagai tambahan, penelitian ini juga menguji pengaruh persepsi Kualitas Informasi Akuntansi terhadap Kepercayaan akan Kualitas Informasi Akuntansi.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Dalam rangka untuk pengambilan keputusan, para pengguna informasi akuntansi akan berusaha mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya, antara lain melalui situs web. Untuk itu, para pengguna informasi akuntansi memerlukan situs web yang berkualitas yang ditunjukkan dengan adanya fitur: *informational fit-to-task, tailored information, trust, response time, ease of understanding, intuitive operations, visual appeal, innovativeness, emotional appeal, consistent image, on-line completeness, relative advantage* (Loiacono *et al.* 2007; Wells *et al.* 2011; Vasarhelyi dan Halper 1991). Untuk menyajikan informasi akuntansi yang berkualitas seperti di atas secara *real time* dan *online* di dalam situs web, melibatkan penerapan sistem pengendalian internal (Davidson, Desai, dan Gerard 2013). Pengguna informasi akuntansi yang melakukan monitor secara *real time* dan *online* terhadap informasi keuangan perusahaan emiten, memerlukan kemampuan penilaian kegiatan pengendalian internal perusahaan (Ross 1986). Doyle *et al.* (2007) menyebutkan lingkungan pengendalian internal merupakan unsur dasar untuk menghasilkan kualitas pelaporan *accrual* yang baik. Dengan demikian kualitas situs web yang baik diduga akan berhubungan dengan kualitas informasi akuntansi persepsian. Berdasar uraian di atas, maka Hipotesis 1 adalah sebagai berikut:

H1: Kualitas Situs Web (KSW) berhubungan secara positif terhadap Kualitas Informasi Akuntansi Persepsian (KIAP).

Berdasarkan pemahaman Teori Keagenan (Jensen dan Meckling 1976), salah satu alasan audit atas laporan keuangan adalah karena adanya asimetri informasi antara manager (*agent*) dan pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap perusahaan (*principal*) yaitu pemilik, kreditur, investor dan lain-lain. Apabila asimetri informasi semakin kecil, maka akan berakibat pada menurunnya berbagai biaya, antara lain biaya modal dan biaya keagenan (biaya untuk meyakinkan keandalan/kualitas informasi akuntansi). Upaya untuk mengurangi asimetri informasi bisa

dilakukan melalui evaluasi (*monitoring*) terhadap SPI dalam batas tertentu.

Hubungan antara kualitas situs website dan kualitas produk persepsian dimoderasi oleh keberadaan informasi asimetris (Wells *et al.* 2011). Dalam kondisi penjual memiliki informasi lebih banyak dibanding pembeli maka informasi asimetris akan muncul. Di transaksi secara daring (*online*), informasi asimetris muncul karena adanya *prepurchase information scarcity* and *post-purchase information clarity* (Kirmani and Akshay 2000). Dalam hal ini *experience goods* yang dijual secara online memiliki potensi yang tinggi akan terjadinya informasi asimetris. Sesuai Wells *et al.* (2011), dalam penelitian ini informasi asimetris juga diuji sebagai variabel pemoderasi. Dengan demikian, kehadiran informasi asimetris ini diduga akan mempengaruhi hubungan antara Kualitas Situs Web dengan Kualitas Informasi Akuntansi Persepsian. Berikut adalah Hipotesis 2:

H2: Asimetri Informasi Persepsian (AIP) memoderasi hubungan antara Kualitas Situs Web (KSW) dengan Kualitas Informasi Akuntansi Persepsian (KIAP).

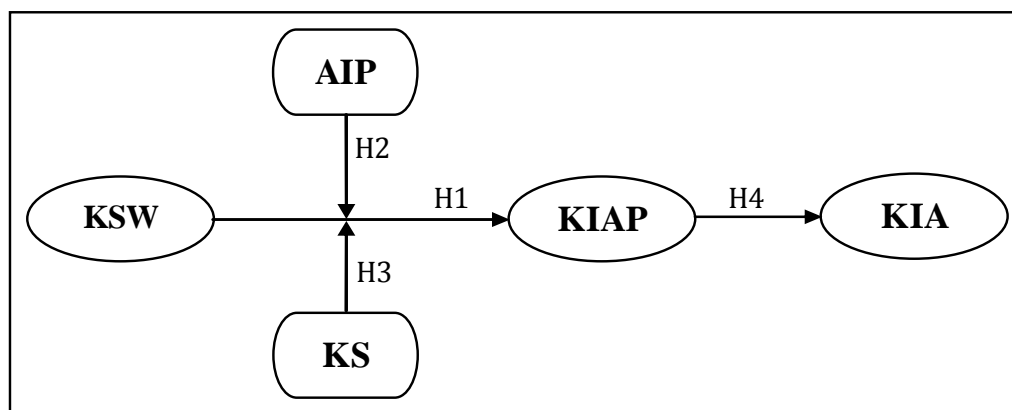
Lebih lanjut, Teori Persinyalan (*signaling theory*) telah dipakai ketika ada asimetri informasi dalam pembuatan keputusan. Menurut Kirmani and Akshay (2000), konsumen akan mengandalkan sinyal ketika menilai kualitas suatu produk yang dengan informasi yang terbatas. Teori persinyalan yang banyak dipakai dalam bidang pemasaran juga dipakai di dalam konteks sistem infor-

masi termasuk *e-commerce*. Penelitian *e-commerce* tentang kredibilitas sinyal sebagai variabel pemoderasi menunjukkan bahwa kredibilitas sinyal memperkuat hubungan kualitas website yang baik dengan persepsi kualitas produk (Wells *et al.* 2011). Dengan menggunakan argumen di atas, penelitian ini menambahkan variabel Kredibilitas Sinyal sebagai variabel pemoderasi dalam Hipotesis 3 sebagai berikut:

H3: Kredibilitas Sinyal (KS) memoderasi hubungan antara Kualitas Situs Web (KSW) dengan Kualitas Informasi Akuntansi Persepsian (KIAP).

Fogg dan Tseng (1999) menyatakan bahwa jika seseorang merasa yakin (*trust*) dengan sesuatu akan ditunjukkan dengan adanya perasaan positif yang berupa *reliability*, *dependability* dan *confidence*. Selanjutnya, dengan adanya perasaan positif tersebut maka sesuatu itu akan dipersepsikan sebagai berkualitas tinggi. Lebih lanjut, McKnight *et al.* (2002) dalam penelitiannya tentang toko daring (*online store*) yang terkait menyatakan bahwa kualitas persepsian mempengaruhi kepercayaan (*trust*). Penelitian berikut oleh Everard dan Galletta (2005) memperkuat temuan McKnight, Choudhury, dan Kacmar (2002) yaitu kualitas toko daring persepsian mempengaruhi kepercayaan terhadap toko daring tersebut. Dari uraian di atas, dirumuskan hipotesis:

H4: Kualitas Informasi Akuntansi Persepsian (KIAP) berpengaruh positif terhadap Kepercayaan akan Kualitas Informasi Akuntansi (KIA).



Gambar 1: Model Penelitian

Keterangan :

KSW = Kualitas Situs Web

AIP = Asimetri Informasi Persepsian

KS = Kredibilitas Signal

KIAP = Kualitas Informasi Akuntansi Persepsian

KIA = Kepercayaan akan Kualitas Informasi Akuntansi

METODA PENELITIAN

Pengumpulan data dilakukan menggunakan survei kuesioner karena data berupa opini individu (Hartono 2008). Metode penentuan sampel menggunakan *purposive sampling* (pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu sesuai karakteristik yang dikehendaki). Karakteristik sampel yaitu: (1) Para manager investasi dan penasihat investasi yang terdaftar pada Bapepam-LK (OJK), yaitu memiliki ijin beroperasi di pasar modal Indonesia; (2) Pernah mengakses data dari sumber berbasis *Enterprise Resource Planning (ERP) systems* seperti SAP, Oracle, PeopleSoft dan *generic industry software* seperti Funds Radar, atau melalui sistem data yang menggunakan *Structured Query Language (SQL)*.

Sampel yang dipilih dalam penelitian ini berjumlah 87 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Data deskriptif menunjukkan bahwa 67 perusahaan aktif mengelola dana investasi sampai dengan Juni 2014 dengan nilai sebesar Rp. 209,7 T. Perusahaan yang tidak mempunyai mutasi pengelolaan investasi sejak Januari 2012 sampai Juli 2014 berjumlah 20 perusahaan. Kuesioner dikirimkan kepada sampel 87 perusahaan. Pada akhir tenggat waktu, dari 87

kuesioner yang dikirim, kuesioner yang bisa diproses untuk analisis data adalah 33 buah, dengan rincian di Tabel 1. Jumlah respon 33 buah dianggap memadai untuk dianalisis dengan menggunakan PLS dengan rule of thumb 10 kali item dalam konstruk yang paling kompleks (Gefen, Straub, dan Boudreau 2000). Dalam hal ini konstruk yang paling kompleks memiliki item pertanyaan sebanyak 3 buah.

Tabel 1: Kuesioner dan *Response Rate*

Kuesioner dikirim	87
MI tidak beroperasi (tutup)	20
Kuesioner tidak kembali	29
Kuesioner kembali	38
Kuesioner tidak lengkap	5
Kuesioner diolah untuk analisis	33
<i>Response Rate</i>	37,93%

Data demografi responden bisa dilihat di Tabel 2. Klasifikasi para responden menunjukkan bahwa 84,85% responden adalah pria. Mayoritas responden (51,50%) berusia antara 23 sampai 30 tahun. Selain itu, mayoritas responden (69,69%) juga memiliki pengalaman kerja antara 1-5 tahun. Sebagai tambahan, pendidikan responden yang Sarjana S1 sebanyak 69,69% dan S2 sejumlah 27,27%.

Penelitian ini menggunakan variabel *Computer Playfulness (CP)* sebagai variabel kontrol. Berdasarkan distribusi data sampel menunjukkan 72,72% untuk CP1 (kemudahan) dan 60,60% untuk CP2 (fleksibilitas). Dengan demikian, para MI menganggap bahwa informasi yang tersedia melalui situs web dapat meningkatkan kemudahan dan fleksibilitas kerja mereka.

Tabel 2: Demografi Responden (Manajer Investasi)

Demografi	Klasifikasi	Jumlah Responden	Prosentase
Kelamin	Pria	28	84,85%
	Wanita	5	15,15%
Usia	23 – 30	17	51,50%
	31 – 40	8	24,25%
	41 – 56	8	24,25%
	1- 5	23	69,69%
Pengalaman Kerja	6 -10	9	27,27%
	>10	1	3,04%
	S 1	23	69,69%
Pendidikan	S II	9	27,27%
	Lain-lain	1	3,04%

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil uji keandalan terhadap variabel Kualitas Situs Web (KSW), Asimetri Informasi Persepsian (AIP), Kredibilitas Signal (KS), Kualitas Informasi Akuntansi Persepsian (KIAP), dan Kepercayaan akan Kualitas Informasi Akuntansi (KIA) menunjukkan Cronbach $\alpha > 0,6$ serta composite reliability $> 0,7$ (lihat Tabel 3 di bawah). Dengan demikian keseluruhan konstruk dalam penelitian ini andal (Hair *et al.* 2010). Lebih jauh, uji Validitas Konvergen dilakukan dengan mengukur AVE dan *communality*. AVE dan *communality* untuk semua variabel menunjukkan skor $>0,5$. Hal ini menunjukkan

bahwa indikator masing-masing konstruk yang masuk ke variabel lainnya kurang dari 50%, sehingga indikator-indikator tersebut konvergen pada konstruk yang dimaksud (Hartono 2011). Sebagai tambahan, karena faktor *loading* untuk indikator KswRT3, KswSC1, KS3 dan CP3 lebih kecil dari 0,5 maka dilakukan eliminasi terhadap indikator tersebut.

Uji validitas diskriminan dilakukan dengan mengukur skor *cross loading*. Tabel 4 menampilkan hasil *cross loading* item-item yang di dalam variabel KSW, AIP, KS, KIAP dan KIA. Item-item tersebut menunjukkan skor loading lebih tinggi pada konstraknya sendiri.

Tabel 3: Hasil Uji AVE, Composite Reliability, R Square dan Cronbach Alpha

Konstruk	AVE $>0,5$	Composite Reliability $>0,7$	R-Square <1	Cronbach Alpha $>0,6$	Communality $>0,5$	Redundancy < 1
KSW	0,5521	0,924	0	0,9076	0,5521	0
AIP	0,6558	0,8486	0	0,7534	0,6558	0
KS	0,9226	0,9598	0	0,9166	0,9226	0
KIAP	0,711	0,8805	0,5528	0,7972	0,711	0,1128
KIA	0,8133	0,9284	0,112	0,9018	0,8133	0,038
CP	0,9198	0,9582	0	0,9207	0,9198	0
KSW * AIP	0,7306	0,9878	0	0,9872	0,7306	0
KSW * KS	0,8101	0,9884	0	0,9876	0,8101	0

Tabel 4: Cross Loading

	KSW	AIP	KS	KIAP	KIA	CP
KswFT1	0,8897	0,5178	0,4332	0,6705	0,1101	0,2675
KswFT2	0,8653	0,5642	0,308	0,5662	0,004	0,1574
KswFT3	0,7296	0,4308	0,2922	0,4587	0,0278	0,1249
KswRT1	0,6658	0,3984	0,2515	0,4909	-0,0086	0,1035
KswRT2	0,7445	0,4146	0,2367	0,5671	-0,0319	0,1945
KswSC2	0,7431	0,3368	0,4245	0,5931	0,2196	0,1853
KswSC3	0,6312	0,4572	0,2754	0,6126	0,0596	0,1397
KswTI1	0,6001	0,2559	0,1132	0,3601	0,1558	0,3269
KswTI2	0,7579	0,4998	0,272	0,5397	0,0733	0,2946
KswTI3	0,7522	0,3832	0,1864	0,4711	0,0171	0,2312
Aip1	0,609	0,9443	0,1744	0,5578	0,0057	-0,0276
Aip2	0,4464	0,7918	0,2857	0,2928	0,0149	0,0668
Aip3	0,2326	0,67	-0,0964	0,1802	0,1262	0,013
Ks1	0,3914	0,2364	0,9664	0,3703	0,0483	0,2185
Ks2	0,3562	0,1119	0,9546	0,3193	-0,0629	0,2684
Kiap1	0,6491	0,3506	0,4314	0,8826	0,298	0,344
Kiap2	0,5049	0,4715	0,1083	0,814	0,2989	0,4623
Kiap3	0,6807	0,4272	0,3363	0,8314	0,1682	0,2224
Kia1	-0,0013	0,0395	-0,0476	0,2634	0,9468	0,2429
Kia2	0,1635	0,0344	0,0442	0,3369	0,9577	0,2695
Kia3	-0,0176	-0,0127	-0,0628	0,0414	0,7913	0,0749
CP1	0,2903	0,0842	0,25	0,3782	0,1542	0,9347
CP2	0,2435	-0,0328	0,2393	0,386	0,2973	0,9829

Tabel 5: Hasil Output SEM (*Path Coefficient*)

Hipotesis	Jalur	Sample Mean	St Dev	St Error	T Statistic	Hasil
Hipotesis 1	KSW → KIAP	0,849	0,1384	0,1384	6,0541	Terdukung
Hipotesis 2	KSW*AIP→KIAP	-0,2067	0,2224	0,2224	0,737	Tidak
Hipotesis 3	KSW*KS→ KIAP	-0,2513	0,2912	0,2912	0,8913	Tidak
Hipotesis 4	KIAP → KIA	0,2204	0,0975	0,0975	2,3958	Terdukung

* $p < 0,05$. ** $p < 0,01$;

ns = tidak signifikan (*not significant*)

Hasil analisa data yang ada di Tabel 4 dan Tabel 5 menunjukkan hasil yang bervariasi yaitu 2 hipotesis terdukung dan 2 hipotesis lainnya tidak terdukung. Kualitas Situs Web berpengaruh secara signifikan positif terhadap Kualitas Informasi Akuntansi Persepsian ($p < 0,01$ dan t -statistik 6,0541). Dengan demikian, Hipotesis 1 terdukung. Selanjutnya, Asimetri Informasi Persepsian (AIP) tidak terbukti memoderasi hubungan antara Kualitas Situs Web dengan Kualitas Informasi Akuntansi Persepsian (t -statistik 0,737). Dengan demikian Hipotesis 2 tidak terdukung. Uji statistik yang hasilnya juga tidak signifikan adalah Hipotesis 3. Kredibilitas Signal (KS) tidak terbukti memoderasi hubungan antara Kualitas Situs Web dengan Kualitas Informasi Akuntansi Persepsian (t statistik 0,8913). Terakhir, uji statistik pada Hipotesis 4 menunjukkan bahwa Kualitas Informasi Akuntansi Persepsian berpengaruh secara signifikan positif terhadap Kepercayaan akan Kualitas Informasi Akuntansi ($p < 0,05$, dengan t statistik 2,3958).

SIMPULAN

Kualitas Situs Web (KSW) menunjukkan hubungan signifikan terhadap Kualitas Informasi Akuntansi Persepsian (KIAP) pada Hipotesis 1. Hal ini ditunjukkan oleh $p < 0,01$ pada $t = 6,0541$. Dengan demikian, hasil ini mendukung penelitian yang telah dilakukan pada pengguna situs web untuk keperluan komersial (Wells *et al.* 2011) dan keperluan pengembangan penelitian sistem informasi (Loiacono *et al.* 2007). Konstruk Kualitas Situs Web (KSW) berupa *Informational Fit to Task*, *Response Time*, *Security*, dan *Tailored*

Information dalam penelitian Wells *et al.* (2011) dan dalam penelitian Loiacono *et al.* (2007) mempengaruhi persepsi pengguna informasi (para MI). Para MI tersebut berupaya mendapatkan informasi akuntansi melalui situs web.

Dua variabel pemoderasi dalam model penelitian ini ternyata tidak berhasil mendukung Hipotesis 2 dan Hipotesis 3. Hubungan antara Kualitas Situs Web (KSW) dengan Kualitas Informasi Akuntansi Persepsian (KIAP), tidak terbukti dimoderasi oleh Asimetri Informasi Persepsian (AIP). Hal ini ditunjukkan oleh t statistik = 0,737. Dengan demikian Hipotesis 2 tidak terdukung. Selanjutnya, pengaruh Kualitas Situs Web (KSW) terhadap Kualitas Informasi Akuntansi Persepsian (KIAP), tidak terbukti dimoderasi oleh Kredibilitas Signal (KS). Hal ini ditunjukkan oleh t statistik = 0,8913. Hasil ini menunjukkan bahwa Hipotesis 3 juga tidak terdukung.

Pengaruh Kualitas Informasi Akuntansi Persepsian (KIAP) terhadap Kepercayaan akan Kualitas Informasi Akuntansi (KIA) menunjukkan signifikansi $p < 0,05$ pada $t = 2,3958$. Dengan demikian Hipotesis 4 terdukung. Hasil ini menunjukkan bahwa para MI melakukan investasi atas surat berharga emiten berdasarkan kepercayaan (*trust*) atas informasi akuntansi ketika mereka mengakses secara *real time*. Flowerday dan Solms (2005) yang mencatat bahwa proses penyajian laporan keuangan mempengaruhi kepercayaan para pengguna informasi akuntansi.

Para MI diharapkan memiliki kompetensi melakukan analisa laporan keuangan dan mengumpulkan informasi relevan lainnya melalui situs web. Mereka juga diharapkan

memiliki pengetahuan bisnis dan kemahiran teknis (pengetahuan hibrid) mengenai informasi teknologi (Hartono 2009). Lebih lanjut, mereka juga diharapkan mempunyai peran semu (*pseudo*) sebagai auditor untuk melakukan *review* SPI emiten.

DAFTAR REFERENSI

- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). 2013. *Internal Control-Integrated Framework*.
<http://www.coso.org/documents/internal%20control-integrated%20framework.pdf>
(diakses 7 Februari 2014).
- Davidson, B.I., N. K. Desai, dan G. J. Gerard. 2013. The effect of continuous auditing on the relationship between internal audit sourcing and the external auditor's reliance on the internal audit function. *Journal of Information Systems* 27 (1): 41-59.
- Doyle, J.T., W. Ge, dan S. McVay. 2007. Accruals quality and internal control over financial reporting. *The Accounting Review* 82 (5): 1141-1170.
- Everard, A., dan D. F. Galletta. 2005. How presentation flaws affect perceived site quality, trust, and intention to purchase from an online store. *Journal of Management Information Systems* 22 (3): 55-95
- Flowerday, S., dan R. V. Solms. 2005. Real time information integrity= system integrity + data integrity + continuous assurances. *Computers and Security* 24 (8): 604-613.
- Fogg, B.J., dan H. Tseng. 1999. The elements of computer credibility. *The ACM CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, Pittsburgh USA*: 15-20.
- Gefen, D., D. Straub, dan M. C. Boudreau. 2000. Structural equation modeling and regression: Guidelines for research practice. *Communications of the Association for Information Systems* 4.
- Hair, J.F., W. C. Black, B. J. Babin, dan R. E. Anderson. 2010. *Multivariate data analysis, seventh edition*. New Jersey: Prentice Hall.
- Hartono, J. 2008. *Metodologi penelitian sistem informasi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hartono, J. 2009. *Sistem teknologi informasi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hartono, J. 2011. *Konsep dan aplikasi structural equation modeling berbasis varian dalam penelitian bisnis*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Herwidayatmo. 2009. *Peranan pasar modal dalam memperkuat eksistensi keuangan negara pasca-UU No 8/1995 tentang pasar modal, dalam era baru kebijakan fiskal pemikiran, konsep, dan implementasi*. Kompas.com (diakses 13 Desember 2013).
- Jensen, M.C., dan W. H. Meckling. 1976. Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics* 3 (4): 305-360.
- Kirmani, A. dan R. R. Akshay. 2000. No pain, no gain: A critical review of the literature on signaling unobservable product quality. *Journal of Marketing* 64 (2): 66-79.
- Kotb, A. dan C. Roberts. 2011. The impact of e-business on the audit process: An investigation of the factors leading to change. *International Journal of Auditing* 15 (2): 150-175.
- Loiacono, E.T., R. T. Watson., dan D. L. Goodhue. 2007. Webqual: An instrument for consumer evaluation of web sites. *International Journal of Electronic Commerce* 11 (3): 51-87.
- Malaescu, I., dan S. G. Sutton. 2015. The reliance of external auditors on

- internal audit's use of continuous audit. *The Journal of Information Systems* 29 (1): 95-114.
- McKnight, D.H., V. Choudhury, dan C. Kacmar. 2002. Developing and validating trust measures for e-commerce: An integrative typology. *Information Systems Research* 13 (3): 334-359.
- Nikolaou, IE., A. Chymi, dan K. Evangelinos. 2013. Environmental information, asymmetric information, and financial markets: A game-theoretic approach. *Environmental Modeling Assessment* 18 (6): 615-628.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2011. *Daftar reksa dana yang efektif pada tahun 2010*. <http://aria.bapepam.go.id/reksadana/files/berita/PPRD%20EFEKTIF%202010-2011.pdf> (diakses 15 Februari 2014).
- Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB). 2004. *An audit of internal control over financial reporting performed in conjunction with an audit of financial statements*. http://pcaobus.org/Rules/Rulemaking/Docket008/2004-03-09_Release_2004-001-all.pdf (diakses 7 Februari 2014).
- Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB). 2007. *Proposed auditing standard: An audit of internal control over financial Reporting that is integrated with an audit of financial statement*. http://pcaobus.org/Rules/Rulemaking/Docket%202021/2007-06-12_Release_No_2007-005A.pdf (diakses 7 Februari 2014).
- Ross, F.E. (1986). Internal control and audit of real time digital systems, *Journal of Accountancy* 119 (4): 46-56.
- Vasarhelyi, M. A., dan F. B. Halper. 1991. The continuous audit of online systems. *Journal of Practice and Theory* 10 (1): 110-125.
- Vasarhelyi, M. A. 1999. *Towards an intelligent audit: Online reporting, online audit, and other assurance services*. New Jersey: Rutgers University, Newark.
- Vasarhelyi, M. A., R. A. Teeter, dan J. P. Krahel. 2010. Audit education and the real time economy. *Accounting Education* 25 (3): 405-423.
- Wells, J.D., J. S. Valacich, dan T. J. Hess. 2011. What signal are you sending? How website quality influences perceptions of product quality and purchase intentions. *MIS Quarterly* 35 (2): 373-396.

THEORY OF PLANNED BEHAVIOR DAN READINESS FOR CHANGE DALAM MEMPREDIKSI NIAT IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2010

Nadhira Afdalia

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
e-mail: nadhira.afdalia@yahoo.com

Grace T.Pontoh

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
e-mail: gracetpontoh@gmail.com

Kartini

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
e-mail: hanafikartini@rocketmail.com

Abstract

Theory of Planned Behavior (TPB) has been widely applied in various fields of behavioral research, to address behaviors that are not under the full control of the individual. This research aimed to analyzing the effect of: 1) attitude toward the behavior; 2) subjective norm; 3) perceived behavioral control; and 4) readiness for change on the intention to implementing the Government Regulation No.71 Year 2010 concerning the accrual-based governmental accounting standard. This research used a quantitative approach with the closed questionnaire method. The research samples were all heads of the offices and fields of the office of the Revenue of Regional Finance and Asset Management of the cities and regencies in Central Sulawesi. The research results indicates that the variables of the attitude toward behavior, subjective norm, and readiness for change have the positive and significant effect on the intention, where as the perceived behavioral control variable does not indicate the significant relationship with the intention.

Keywords: *Theory of planned behavior, readiness for change, intention.*

Abstrak

*Theory of Planned Behavior (TPB) telah digunakan dalam penelitian tentang keperilakuan untuk menunjukkan bahwa perilaku tidak sepenuhnya di bawah pengaruh dari individu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh (1) sikap terhadap perilaku, (2) norma subjektif, (3) kontrol perilaku persepsian, dan (4) kesiapan untuk berubah terhadap niat untuk mengimplementasikan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner. Sampel penelitian ini adalah kepala dinas dan kepala bidang di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota dan Kabupaten seluruh Sulawesi Tengah. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa *attitude toward behavior, subjective norms, dan readiness for change* mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap niat, sementara itu *perceived behavioral control* tidak mengindikasikan pengaruh yang signifikan terhadap niat.*

Kata kunci: *Theory of planned behavior, readiness for change, niat.*

PENDAHULUAN

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan salah satu teori yang telah diterap-

kan diberbagai bidang penelitian perilaku. TPB menyatakan bahwa kombinasi dari sikap terhadap perilaku, norma subyektif, dan kon-

trol perilaku persepsian mengarah pada pembentukan niat perilaku (*behavioral intention*) dan selanjutnya membentuk perilaku (*behavior*) (Jogiyanto, 2008). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI merupakan perilaku yang bersifat wajib (*mandatory behavior*). Menurut Hartwick dan Barki (1994) meskipun suatu perilaku bersifat wajib, namun dalam penerapannya dapat bervariasi. Hal ini berarti aparat dapat memilih mengimplementasikan atau tidak mengimplementasikan PP Nomor 71 tahun 2010 dengan alasan atau pertimbangan tertentu.

Data hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan (BPK) RI perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah pada 12 pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah menunjukkan bahwa masalah penatausahaan dan pengelolaan aset tetap, persediaan, serta kewajiban perpajakan merupakan masalah utama yang dihadapi hampir semua pemda di Sulawesi Tengah (BPK RI Sulawesi Tengah 2014). Diharapkan melalui penerapan PP Nomor 71 tahun 2010 yang wajib diimplementasikan pada tahun 2015 masalah-masalah tersebut dapat diatasi.

Penelitian yang terkait perilaku *mandatory* sebagian besar dilakukan pada bidang perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Mustikasari (2007) dengan menggunakan model TPB, menjelaskan bahwa perilaku tidak patuh (*noncompliance*) wajib pajak sangat dipengaruhi oleh variabel sikap, norma subjektif, dan control perilaku yang dipersepsikan. Penelitian yang dilakukan oleh Pangestu dan Rusmana (2012) menunjukkan bahwa sikap dan control perilaku berpengaruh signifikan terhadap niat, sedangkan norma subjektif tidak berpengaruh terhadap niat untuk berperilaku patuh. Penelitian oleh Taylor dan Todd (1995) membuktikan bahwa model TPB memberikan pemahaman yang lebih lengkap dalam menjelaskan tentang niat perilaku dan penggunaan.

Berbeda dengan penelitian-penelitian TPB sebelumnya, penelitian ini terkait dengan perilaku *mandatory* di bidang pengimplemen-

tasian regulasi, yaitu peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI. Penelitian ini juga menambahkan variabel *readiness for change*, dengan pertimbangan bahwa kesiapan kolektif perilaku individu dalam organisasi merupakan faktor penting untuk mendukung perubahan organisasi. Ajzen (1991) juga menyatakan bahwa model TPB masih memungkinkan untuk ditambahkan variabel prediktor lain selain variabel pembentukan niat. Berdasarkan pemikiran mengenai pentingnya niat dalam berperilaku dan pentingnya kesiapan untuk berubah sebagai faktor penting dalam keberhasilan perubahan suatu organisasi, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh 1) sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*); 2) norma subjektif (*subjective norm*); 3) control perilaku persepsian (*perceived behavior control*); dan 4) kesiapan untuk berubah (*readiness for change*) terhadap niat (*intention*) mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai standar akuntansi pemerintahan berbasis akruaI dengan menggunakan *Theory of Planned Behavior (TPB)* dan *Readiness for Change* sebagai landasan teori.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis AkruaI

Akuntansi berbasis akruaI adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Waktu pencatatan (*recording*) dalam akuntansi berbasis akruaI, sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat. Komponen laporan keuangan berdasarkan PP No. 71 tahun 2010, terdiri dari (a) laporan realisasi anggaran (LRA), (b) laporan perubahan saldo anggaran lebih (laporan perubahan (SAL), (c) neraca, (d)

laporan operasional (LO), (e) laporan arus kas (LAK), (f) laporan perubahan ekuitas (LPE), dan (g) catatan atas laporan keuangan.

Perbedaan kongkrit yang paling memerlukan perhatian adalah jenis/komponen laporan keuangan. Perbedaan mendasar SAP PP 24/2005 dengan SAP Akrua terletak pada PSAP 12 mengenai Laporan Operasional. Entitas pemerintah melaporkan secara transparan besarnya sumber daya ekonomi yang didapatkan dan besarnya beban yang ditanggung untuk menjalankan kegiatan pemerintahan. Surplus/defisit operasional merupakan penambah atau pengurang ekuitas/kekayaan bersih entitas pemerintahan bersangkutan.

Walaupun pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran berbasis akrua berlaku efektif mulai tahun 2010 untuk laporan keuangan, tetapi apabila entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP ini entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP berbasis kas menuju akrua paling lama 4 (empat) tahun setelah tahun anggaran 2010. Penerapan SAP berbasis akrua dapat dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP berbasis kas menuju akrua menjadi penerapan SAP berbasis akrua. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP berbasis akrua secara bertahap pada pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan, sedangkan untuk pada pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010.

Theory of Planned Behaviour (TPB)

TPB merupakan pengembangan lebih lanjut dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) atau teori tindakan beralasan (Ajzen 1991). TPB yang menjelaskan bahwa tindakan manusia diarahkan oleh tiga macam kepercayaan, yaitu (a) kepercayaan perilaku (*behavioral beliefs*), yaitu kepercayaan tentang kemungkinan terjadinya perilaku, (b) kepercayaan normatif (*normative beliefs*), yaitu kepercayaan tentang ekspektasi normatif dari orang lain dan motivasi untuk menyetujui ekspektasi tersebut, (c) kepercayaan kontrol (*control beliefs*), yaitu kepercayaan tentang keberadaan faktor-faktor yang akan memfasilitasi atau merintangi

kinerja dari perilaku dan kekuatan persepsian dari faktor-faktor tersebut.

Secara keseluruhan, kepercayaan-kepercayaan perilaku membentuk suatu sikap menyukai atau tidak menyukai terhadap perilaku, kepercayaan normatif menghasilkan tekanan sosial atau norma subyektif, dan kepercayaan kontrol akan memberikan kontrol perilaku persepsian. Bersama-sama, sikap terhadap perilaku, norma subyektif, dan kontrol perilaku persepsian, akan menimbulkan niat perilaku (*behavioral intention*) dan selanjutnya terbentuk perilaku (*behavior*).

Sikap (Attitude)

Fishbein dan Ajzen (1975) mendefinisikan sikap sebagai jumlah dari efeksi (perasaan) yang dirasakan seseorang untuk menerima atau menolak suatu obyek atau perilaku dan diukur dengan suatu prosedur yang menempatkan individual pada skala *evaluative* dua kutub, misalnya baik atau jelek, setuju atau menolak. Sikap menurut Ajzen (2002) merupakan suatu keadaan internal (*internal state*) yang memengaruhi pilihan tindakan individu terhadap objek, orang atau kejadian tertentu. Sikap merupakan kecenderungan kognitif, afektif, dan tingkah laku yang dipelajari untuk merespon secara positif maupun negatif terhadap objek, situasi, institusi, konsep atau seseorang.

Berdasarkan teori ini, sikap individu terhadap suatu perilaku diperoleh dari keyakinan terhadap konsekuensi yang ditimbulkan oleh perilaku tersebut, yang diistilahkan dengan *behavioral beliefs* (keyakinan terhadap perilaku). Keyakinan terhadap perilaku menghubungkan perilaku dengan hasil tertentu, atau beberapa atribut lainnya seperti biaya atau kerugian yang terjadi saat melakukan suatu perilaku. Dengan kata lain, seseorang yang yakin bahwa sebuah tingkah laku dapat menghasilkan *outcome* yang positif, maka individu tersebut akan memiliki sikap yang positif, begitu juga sebaliknya.

Norma Subyektif (Subjective Norm)

Norma-norma subyektif adalah persepsi atau pandangan seseorang terhadap kepercayaan-

kepercayaan orang lain yang akan memengaruhi niat untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan (Jogiyanto 2008). Norma subyektif menggambarkan sejauh mana seseorang memiliki motivasi untuk mengikuti pandangan orang terhadap perilaku yang akan dilakukannya (*normative belief*) jika individu merasa itu adalah hak pribadinya untuk menentukan apa yang akan dia lakukan bukan ditentukan oleh orang lain di sekitarnya, maka dia akan mengabaikan pandangan orang tentang perilaku yang akan dilakukannya. Fishbein dan Ajzen (1975) menggunakan istilah "*motivation to comply*" untuk menggambarkan fenomena ini yaitu apakah individu mematuhi pandangan orang lain yang berpengaruh dalam hidupnya atau tidak.

Keyakinan normatif berkenaan dengan harapan-harapan yang berasal dari *referent* atau orang dan kelompok yang berpengaruh bagi individu (*significant others*) seperti orang tua, pasangan, teman dekat, rekan kerja atau lainnya, tergantung pada perilaku yang terlibat (Ajzen 2005). *Norma Subjektif* didefinisikan sebagai adanya persepsi individu terhadap tekanan sosial yang ada untuk menunjukkan atau tidak suatu perilaku. Individu memiliki keyakinan bahwa individu atau kelompok tertentu akan menerima atau tidak menerima tindakan yang dilakukannya. Apabila individu meyakini apa yang menjadi norma kelompok, maka individu akan mematuhi dan membenarkan perilaku yang sesuai dengan kelompoknya.

Kontrol Perilaku Persepsian (*Perceived Behavior Control*)

Schifter dan Ajzen (1985) menambahkan sebuah konstruk yang sebelumnya tidak ada di dalam TRA. Konstruk ini ditambahkan ke TPB untuk mengontrol perilaku yang dibatasi oleh keterbatasan-keterbatasan kurangnya sumber daya untuk melakukan perilaku. Konstruk yang ditambahkan tersebut adalah kontrol perilaku persepsian (*perceived behavioral control*). Kontrol perilaku persepsian didefinisikan sebagai kemudahan atau kesulitan persepsian untuk melakukan perilaku (Ajzen

1991). Ajzen (2005) menamakan kondisi ini dengan kontrol perilaku persepsian.

Banyak faktor yang dapat mengganggu hubungan antara niat dan perilaku. Keberhasilan kinerja dan perilaku tergantung dari kemampuan seseorang untuk mengontrol faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku, walaupun kontrol kemauan (*volitional control*) adalah salah satu yang paling memengaruhi perilaku dibandingkan dengan faktor-faktor yang lain, keterbatasan-keterbatasan personal dan hambatan-hambatan eksternal dapat juga mengganggu kinerja dari perilaku (Ajzen 1991). Ajzen (1991) mencoba menyediakan suatu kerangka konseptual untuk membahas permasalahan dari kontrol volitional yang kurang lengkap dengan menambahkan sebuah konstruk yaitu kontrol perilaku persepsian.

Perlu diperhatikan bahwa TPB tidak secara langsung berhubungan dengan jumlah dari kontrol yang sebenarnya dimiliki seseorang, tetapi teori ini lebih mempertimbangkan pengaruh-pengaruh yang mungkin dari kontrol perilaku yang dipersepsikan dalam pencapaian tujuan-tujuan perilaku. Jika niat menunjukkan keinginan seseorang untuk mencoba perilaku tertentu, kontrol persepsian lebih kepada mempertimbangkan beberapa konstrain-konstrain yang realistik yang mungkin terjadi.

Kesiapan Untuk Berubah (*Readiness for Change*)

Kesiapan untuk berubah merupakan suatu sikap yang komprehensif yang dipengaruhi secara simultan oleh empat faktor, yaitu apa yang berubah (*the content*), bagaimana perubahan tersebut dilakukan (*the process*), keadaan di mana perubahan tersebut akan berlangsung (*the context*), dan karakteristik dari orang yang diminta untuk melakukannya (*the individuals*). Keempat faktor tersebut secara bersama-sama terefleksi ke dalam ingatan seseorang atau sekelompok orang secara kognitif dan emosional untuk cenderung menerima, menganut, dan mengadopsi perubahan yang dipersiapkan dan direncanakan untuk mengganti keadaan saat ini (Holt *et al.*, 2007).

Kesiapan individu dalam organisasi untuk berubah akan menunjukkan kesiapan organisasi.

Teori Holt menjelaskan bahwa kesiapan untuk berubah menyediakan fondasi atas resistensi dari perilaku yang diadaptasi oleh perubahan. Menurut Walinga (2008) disebutkan bahwa teori kesiapan untuk berubah diyakini sebagai perubahan kognisi dari tiap individu. Menurut Holt, *et al.* (2007) kesiapan (*readiness*) merupakan faktor yang paling penting dalam mendukung inisiatif individu untuk melakukan perubahan. Kesiapan didefinisikan sebagai keyakinan, intensi, sikap dan perilaku yang mendukung perubahan dan kapasitas organisasi untuk sukses meraihnya. Kesiapan untuk berubah merupakan suatu konstruk multi dimensional yang terdiri dari empat dimensi, yaitu kesesuaian (*appropriateness*), kepercayaan diri untuk berubah (*change efficacy*), dukungan manajemen (*management support*), dan keuntungan bagi diri (*personal valence*).

Menerapkan perubahan organisasi yang kompleks melibatkan tindakan dari banyak individu, setiap individu memberikan suatu kontribusi sebagai upaya implementasi. Hal ini dikarenakan implementasi seringkali merupakan kerjasama tim, masalah dapat muncul ketika beberapa individu merasa berkomitmen untuk melaksanakan implementasi tetapi yang lainnya tidak. Weiner (2009) mengamati bahwa anggota organisasi dapat berkomitmen untuk menerapkan perubahan organisasi karena mereka ingin (mereka menghargai perubahan), karena mereka harus (mereka memiliki sedikit pilihan), atau karena mereka seharusnya (mereka merasa wajib). Komitmen yang berdasarkan motif 'keinginan untuk' mencerminkan komitmen tertinggi untuk menerapkan perubahan organisasi.

Secara khusus, kesiapan organisasi untuk berubah mengacu kepada komitmen dan keyakinan-sendiri dari semua anggota organisasi untuk mengimplementasikan perubahan organisasi. Pengertian ini mengandung kata 'kesiapan' yang berarti kondisi yang tepat secara psikologis maupun perilaku untuk mengambil suatu tindakan. Mengacu pada definisi yang dikemukakan oleh Bandura

(1977) dalam teori kognitif sosial mengenai komitmen tujuan, yaitu komitmen perubahan yang mengacu pada keyakinan-bersama dari anggota organisasi untuk melakukan tindakan dalam implementasi perubahan (Weiner 2009).

Niat (*Intention*)

Niat (*intention*) didefinisikan sebagai keinginan untuk melakukan perilaku. Niat tidak selalu statis, niat dapat berubah seiring berjalannya waktu. Semakin lebar interval waktu, semakin mungkin terjadi perubahan-perubahan pada niat (Jogiyanto 2008). TPB mengatakan bahwa seseorang dapat bertindak berdasarkan intensi atau niatnya hanya jika ia memiliki kontrol terhadap perilakunya (Ajzen 2002).

Niat merupakan suatu fungsi dari dua penentu dasar, penentu yang pertama berhubungan dengan faktor pribadi adalah sikap terhadap perilaku dan penentu yang kedua dari niat yang berhubungan dengan pengaruh sosial adalah norma subjektif. TPB menjelaskan bahwa seseorang dapat bertindak berdasarkan intensi atau niatnya jika ia memiliki kontrol terhadap perilakunya (Ajzen 2002), kontrol perilaku persepsian mempunyai implikasi motivasional terhadap niat-niat.

Pengaruh Sikap Terhadap Niat

Penentu niat yang berhubungan dengan faktor pribadi adalah sikap terhadap perilaku individual (Jogiyanto 2008). Sikap adalah perasaan positif atau negatif dari seseorang jika harus melakukan perilaku yang akan ditentukan (Jogiyanto 2008). Sikap aparatur mengenai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 akan menimbulkan motivasi untuk mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, sehingga akan mendorong niat untuk mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 secara optimal dan sesuai peraturan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ozer dan Yilmaz (2011) menunjukkan bahwa sikap memiliki kemampuan prediksi lebih daripada norma subyektif dan kontrol perilaku persepsian. Pangestu dan Rusmana (2012), Mustika-

sari (2011), Hidayat dan Nugroho (2010), Smart (2012) serta Bidin *et al.* (2011) meneliti di bidang perpajakan telah membuktikan secara empiris bahwa sikap berpengaruh positif terhadap niat. Semakin positif sikap wajib pajak untuk patuh terhadap pajak maka niat wajib pajak untuk patuh akan semakin besar (Pangestu dan Rusmana 2012), sedangkan penelitian yang dilakukan Mustikasari (2007) menunjukkan bahwa apabila sikap ketidakpatuhan pajak positif, maka niat untuk tidak patuh pajak juga akan tinggi. Berdasarkan penjelasan dan hasil penelitian tersebut dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H1: Sikap terhadap Peraturan Pemerintah nomor 71 berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat untuk mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Pengaruh Norma Subyektif Terhadap Niat

Niat juga ditentukan oleh pengaruh sosial yaitu norma subyektif Jogiyanto (2008). Variabel kedua dari model TPB ini didefinisikan sebagai persepsi atau pandangan seseorang terhadap kepercayaan-kepercayaan orang lain yang akan mempengaruhi niat untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan Jogiyanto (2008). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa norma subyektif berpengaruh positif terhadap niat seperti Bidin *et al.* (2011) serta Hidayat dan Nugroho (2010) di bidang perpajakan, penelitian yang dilakukan oleh Sihombing (2004) menunjukkan bahwa norma subyektif merupakan faktor penentu niat terbaik di negara timur. Taylor dan Todd (1995) mengatakan bahwa norma subyektif adalah prediktor niat yang penting baik pada pengguna yang memiliki pengalaman sebelumnya atau tidak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mustikasari (2007) di bidang perpajakan menunjukkan bahwa pengaruh orang sekitar (*perceived social pressure*) yang kuat akan memengaruhi niat *tax professional* untuk berperilaku patuh. Penelitian yang dilakukan oleh Ajzen dan Fishbein (1970) menyatakan bahwa dalam situasi orientasi *cooperative* norma

subyektif memiliki pengaruh yang tinggi terhadap niat dibandingkan dengan ketika diterapkan dalam situasi orientasi motivasi yang kompetitif. Implementasi Peraturan Pemerintah merupakan situasi yang berorientasi pada motivasi *cooperative*. Berdasarkan penjelasan dan hasil penelitian tersebut dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H2: Norma subyektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat untuk mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Pengaruh Kontrol Perilaku Persepsian Terhadap Niat

Ajzen (1991) mengatakan bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan memengaruhi niat didasarkan atas asumsi bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan oleh individu akan memberikan implikasi motivasi pada orang tersebut. Kontrol perilaku persepsian ditentukan oleh adanya *control beliefs* yaitu kepercayaan tentang keberadaan faktor-faktor yang akan memfasilitasi atau justru menghalangi perilaku (Jogiyanto 2008). Jika individu merasa dirinya memiliki kualifikasi dan kemampuan yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan basis akrual secara penuh sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 71 Tahun 2010, maka kemungkinan niatnya untuk mengimplementasikan basis akrual secara penuh sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 akan semakin tinggi dan pada akhirnya akan memilih untuk mengimplementasikannya secara optimal dan menghasilkan kinerja terbaik.

Penelitian yang dilakukan oleh Huda *et al.* (2012) menunjukkan pengaruh yang signifikan antara kontrol perilaku persepsian dan niat. Hal serupa juga ditunjukkan oleh penelitian Pangestu dan Rusmanan (2012) di bidang perpajakan, kontrol perilaku persepsian berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi persepsi wajib pajak atas kendali dan kesanggupan yang dimilikinya akan mendorong niat wajib pajak untuk patuh. Sesuai dengan teori *planned behavior* oleh Ajzen &

Fishbein (1970), factor persepsi pengendalian perilaku memiliki karakteristik untuk memperkuat dan melemahkan niat. Jika perilaku yang dianggap bisa dilakukan, niat akan diperkuat. Jika perilaku dianggap sulit atau tidak mungkin untuk dilakukan, niat melemah. Berdasarkan penjelasan dan hasil penelitian tersebut dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H3: Kontrol perilaku persepsian berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat untuk mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Pengaruh Kesiapan untuk Berubah Terhadap Niat

Implementasi sistem akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah merupakan bentuk perubahan. Kesiapan organisasi untuk berubah mengacu kepada komitmen dan keyakinan-sendiri dari semua anggota organisasi untuk mengimplementasikan perubahan organisasi. Disamping itu dibutuhkan sumber daya aparatur yang siap untuk menghadapi perubahan sehingga efektifitas implementasi dapat terlaksana dengan baik. Penelitian Eby *et al.* (2010) menunjukkan bahwa individu-individu yang percaya diri mereka mampu beradaptasi dengan mudah terhadap perubahan cenderung akan memandang perubahan yang terjadi dalam organisasi akan sangat menguntungkan sehingga akan mendukung implementasi per-

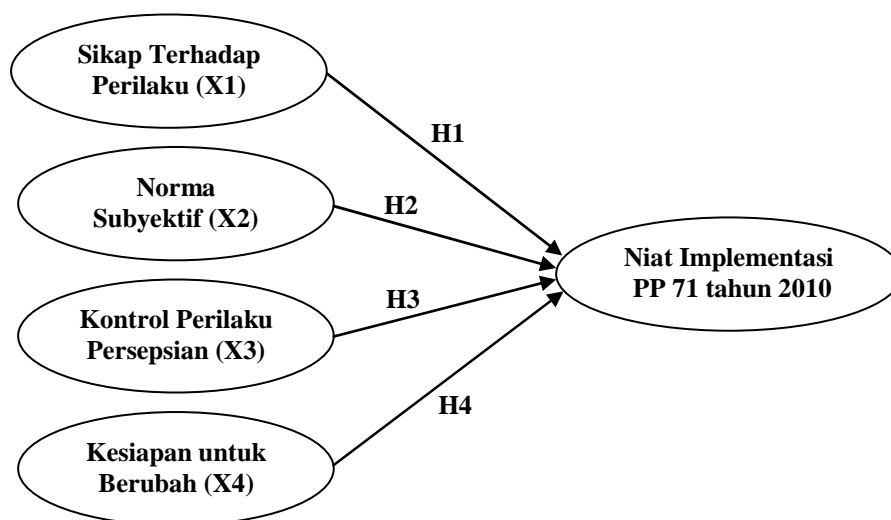
ubahan yang tentunya akan memengaruhi niat mereka untuk mengimplementasikan perubahan. Penelitian Nugraheni (2012) yang mendukung penelitian Eby *et al.* (2010) mengatakan kesiapan untuk berubah akan memengaruhi pola pikir, perasaan, dan perhatian individu yang tercermin dalam perilaku yang berawal dari niatnya. Penelitian yang dilakukan Kwahk dan Lee (2008) secara khusus menemukan bahwa *readiness for change* memiliki efek tidak langsung pada niat perilaku untuk menggunakan sistem *Enterprise Resource Planning* (ERP). Berdasarkan penjelasan dan hasil penelitian tersebut dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H4: Kesiapan untuk berubah berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat untuk mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

METODA PENELITIAN

Jenis Penelitian, Lokasi, Waktu, dan Sampel Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel sikap, norma subyektif, kesiapan untuk berubah, dan kontrol perilaku persepsian terhadap niat implementasi PP Nomor 71 tahun 2010. Model penelitian yang menunjukkan hubungan antara variabel penelitian dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1: Model Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota dan Kabupaten se-Sulawesi Tengah Desember 2013 sampai Februari 2014. Populasi dalam penelitian ini, yaitu seluruh kepala dinas dan kepala bidang dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah (DPPKAD) Kota dan Kabupaten se-Sulawesi Tengah yang berjumlah 56 responden. Seluruh anggota populasi dijadikan sampel penelitian dengan pertimbangan bahwa pejabat DPPKAD memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai PP Nomor 71 tahun 2010.

Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data subyek (*self-report data*). Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan skala likert 5 poin, dari kategori sangat tidak setuju sampai kategori sangat setuju dengan jenis skala ordinal. Sebelum kuesioner digunakan, terlebih dahulu dilakukan uji pilot terhadap 33 orang mahasiswa kelas magister akuntansi di UNHAS untuk mengetahui validitas indikator variabel penelitian.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan analisis statistik *Partial Least Square* (PLS) untuk mengetahui hubungan antar variabel yang diteliti. Analisis data menggunakan PLS terdiri dari dua sub model yaitu model pengukuran (*outer model*) untuk menilai validitas konstruk dan reliabilitas instrumen, dan model struktural (*inner model*) untuk menguji hipo-

tesisone-tailed, dengan skor atau nilai T-statistik harus lebih besar dari nilai T-Tabel (1,64) pada taraf alpha 5 persen. Validitas konstruk dapat diukur dengan parameter skor *loading* di model penelitian (*rule of thumbs* > 0,7) dan menggunakan parameter AVE, *communality*, R^2 , dan *redundancy*. Skor AVE harus >0,5, *Communality* >0,5, dan *redundancy* mendekati 1. Jika skor *loading* <0,5 maka indikator ini dapat dihapus dari konstruksya. Jika skor *loading* antara 0,5-0,7 sebaiknya indikator yang memiliki skor *loading* tersebut tidak dihapus sepanjang skor AVE dan *communality* indikator tersebut >0,5. Uji validitas konvergen diukur dengan melihat skor AVE dan *communality* yang masing-masing harus bernilai diatas 0,5. Uji Validitas diskriminan parameter yang diukur adalah dengan membandingkan akar dari AVE suatu konstruk harus lebih tinggi dibandingkan dengan korelasi antar variabel laten tersebut, atau dengan melihat skor *cross loading*. Uji reliabilitas dapat dilihat dari nilai *cronbach's alpha* harus >0,6 dan nilai *composite reliability* harus >0,7 (Jogiyanto dan Abdillah 2009: 81).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Demografi Responden

Kuesioner yang disebar kepada responden sebanyak 56, kuesioner yang kembali sebanyak 45, kuesioner yang tidak lengkap 6, dan kuesioner yang diolah sebanyak 39. Data demografi responden dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1: Data Demografi Responden

Data Demografi				
No	Umur	Pendidikan Terakhir	Jabatan	Lama Menduduki Jabatan
1	30-35 tahun (20,51%)	S1(28,21 %)	Kepala dinas DPPKAD (7,69%)	< 1 tahun (15,39%)
2	36-40 tahun (20,51%)	S2 (71,79%)	Kepala Bidang (92,31%)	1- 3 tahun (64,1%)
3	41-45 tahun (20,51%)			4 - 6 tahun (17,95%)
4	46-50 tahun (7,69%)			>6 tahun (2,56%)
5	51-55 tahun (23,07%)			
6	>56 tahun (7,69%)			

Sumber: Data diolah, 2013

Hasil Uji Validitas Konstruk, Validitas Konvergen, dan Validitas Diskriminan

Hasil uji validitas konstruk dengan menggunakan *software Smart PLS* ver. 2.0 M3, menunjukkan bahwa indikator AT1, PBC1, PBC2, PBC3, PBC4, RC1, dan RC2 kurang valid, karena nilai *loading factor* kurang dari 0,70. Analisis selanjutnya indikator AT1, PBC2, PBC3, PBC4, RC1, dan RC2 masih tetap digunakan karena nilai AVE dan *Communality* > 0,5. PBC1 tidak diikuti karena memiliki nilai *loading factor* kurang dari 0,7 pada konstraknya dan nilai AVE dan *Communality* < 0,5. Setelah diadakan revisi pengujian *outer model*, didapatkan hasil seluruh item pernyataan telah valid, yaitu *loading factor* > 0,5, AVE > 0,5 dan *Communality* > 0,5 serta *Redudancy* mendekati 1.

Hasil uji validitas konvergen menunjukkan bahwa semua AVE dan *Communality* memiliki nilai di atas 0,5, yang berarti bahwa indikator-indikator konstruk memenuhi syarat validitas konvergen. Hasil uji validitas diskriminan pada Tabel 2 menunjukkan bahwa indikator yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria validitas diskriminan karena nilai akar AVE semuanya lebih besar dari korelasi variabel laten.

Hasil Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas dengan menggunakan *Cronbach's alpha* dan *composite reliability* pada Tabel 3 menunjukkan nilai *cronbach's alpha* dan *composite reliability* untuk masing-masing variabel di atas nilai 0,7, namun variabel *perceived behavior control* memiliki nilai *cronbach's alpha* 0,638657, namun nilai *composite reliability* di atas 0,7 sehingga masih dapat diterima.

Hasil Uji Model Struktural

Hasil perhitungan SmartPLS menunjukkan hasil estimasi *R-square intention to implementation* peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 adalah sebesar 0,335343, yang artinya bahwa 33,53% variabel sikap (*attitude*), norma subyektif (*subjective norm*), kontrol perilaku persepsian (*perceived behavior control*), dan kesiapan untuk berubah (*readiness for change*) memengaruhi variabel *intention to implementation*, sedangkan sisanya sebesar 66,47% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini. Artinya masih terdapat variabel lain diluar model yang berpengaruh terhadap variabel *intention to implementation*. Kemungkinan variabel lain yang berpengaruh penting terhadap niat implementasi regulasi adalah variabel dukungan organisasi (*organization support*).

Tabel 2: Average Variance Extracted (AVE) dan Akar AVE

Variabel	AVE	Akar AVE
<i>Attitude (AT)</i>	0,614845	0,78412
<i>Subjective Norm (SN)</i>	0,795208	0,89174
<i>Perceived Behavior Control (PBC)</i>	0,574954	0,75825
<i>Readiness for Change (RC)</i>	0,636740	0,79795
<i>Intention (I)</i>	0,851433	0,92273

Sumber: Data diolah, 2013

Tabel 3: Uji Reliabilitas Variabel.

Variabel	<i>Composite Reliability</i>	<i>Cronbachs Alpha</i>	Keterangan
<i>Attitude (AT)</i>	0,860334	0,815225	Reliabel
<i>Subjective Norm (SN)</i>	0,885196	0,772236	Reliabel
<i>Perceived Behavior Control (PBC)</i>	0,801235	0,638657	Reliabel
<i>Readiness for Change (RC)</i>	0,895846	0,872168	Reliabel
<i>Intention (I)</i>	0,944715	0,911229	Reliabel

Sumber: Data diolah, 2013

Hasil Uji Hipotesis

Tabel 4: Hasil Uji Hipotesis (*Path Coefficients*)

	<i>Original Sample (O)</i>	<i>T Statistics (O/STERR)</i>	<i>Keterangan</i>
AT → I	0,184800	1,715688	Diterima
PBC → I	-0,163645	1,203452	Ditolak
SN → I	0,183547	1,671433	Diterima
RC → I	0,459393	3,561792	Diterima

Sumber: Data diolah, 2013

Pada Tabel 4 dapat dilihat hasil uji hipotesis yang menunjukkan bahwa variabel sikap, norma subyektif, dan kesiapan untuk berubah seluruhnya memiliki nilai *t* statistik yang lebih besar dibandingkan dengan nilai *t* tabel 1,64 (α 0,05) dan nilai *original sample* bernilai positif. Hal ini berarti variabel sikap, norma subyektif, dan kesiapan untuk berubah berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat untuk mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Variabel kontrol perilaku persepsian memiliki nilai *t* statistik yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai *t* tabel 1,64 (α 0,05) dengan nilai *original sample* bernilai negatif. Hal ini berarti variabel kontrol perilaku persepsian tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat untuk mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Sikap terhadap perilaku pada penelitian ini adalah perasaan negatif atau positif dari aparatur pemerintah daerah Kota dan Kabupaten se Sulawesi Tengah, terhadap nilai kebaikan, nilai kebijaksanaan, nilai kesukaan, dan nilai kesenangan dari implementasi peraturan pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap terhadap perilaku merupakan salah satu variabel penentu dari niat seseorang. Sejalan dengan pendapat Ajzen dan Fishbein (1970) yang menyatakan bahwa sikap terhadap perilaku dapat memprediksi niat perilaku seseorang. Data demografi menunjukkan 71,79% responden memiliki pendidikan S2 dan 92,31% memiliki jabatan kepala bidang. Apabila dihubungkan dengan variabel sikap terhadap perilaku, tingkat pendidikan dan jabatan responden dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman yang lebih banyak, yang akan menjadi dasar dalam melakukan evaluasi ter-

hadap hasil dari implementasi PP Nomor 71 Tahun 2010. Menurut Ajzen (1991) kepercayaan-kepercayaan perilaku, ditentukan oleh evaluasi terhadap hasil yang dihubungkan dengan perilaku dan juga kekuatan-kekuatan dari asosiasi-asosiasi tersebut.

Aparatur pemerintah daerah kota dan kabupaten se Sulawesi Tengah yang percaya bahwa perilaku implementasi PP Nomor 71 Tahun 2010 akan mengarahkan terutama ke hasil-hasil positif, maka mereka akan mempertahankan sikap yang baik terhadap melakukan perilaku tersebut, dan sebaliknya aparatur pemerintah daerah yang percaya melakukan perilaku tersebut akan mengarahkan ke hasil-hasil negatif akan mempertahankan sikap yang kurang baik. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ozel dan Yilmaz (2011), Pangestu dan Rusmana (2012), Mustikasari (2011), Hidayat dan Nugroho (2010), Smart (2012), serta Bidin *et al.* (2011). Tiga variabel yang digunakan sebagai alat untuk memprediksi niat dalam *theory of planned behavior*, berdasarkan hasil penelitian ini sikap memiliki kemampuan prediksi yang lebih baik terhadap niat dibandingkan dengan dua variabel lainnya.

Jogiyanto (2008) menjelaskan bahwa norma subyektif (*subjective norm*) diasumsikan sebagai suatu fungsi kepercayaan-kepercayaan seseorang, bahwa individu-individu tertentu atau kelompok-kelompok menyetujui atau tidak menyetujui melakukan suatu perilaku. Apabila dihubungkan dengan hasil penelitian ini, aparatur pemerintah daerah kota dan kabupaten se Sulawesi Tengah memiliki norma subyektif yang kuat, yang dibentuk oleh kepercayaan-kepercayaan normatif mereka, bahwa implementasi PP Nomor 71 Tahun

2010, akan mendapat dukungan dari atasan atau pimpinan, rekan kerja, ataupun bawahan mereka. Kepercayaan normatif tersebut, menjadi motivasi bagi aparatur pemerintah daerah untuk bertindak sesuai dengan harapan normatif mereka. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Ajzen (2005) bahwa apabila individu meyakini apa yang menjadi norma kelompok, maka ia akan mematuhi dan membentuk perilaku yang sesuai dengan kelompoknya. Jogiyanto (2008) memandang norma subyektif sebagai dua bentuk pengaruh, yaitu pengaruh interpersonal dan pengaruh eksternal. Dalam penelitian ini, pengukuran norma subyektif terkait dengan pengaruh interpersonal, yang berasal dari pimpinan dan rekan kerja.

Data demografi responden menunjukkan 58,8% responden berusia diatas 40 tahun, 71,8% memiliki pendidikan S2, dan lama bekerja diatas 1 tahun sebanyak 84,6%. Data-data tersebut merupakan bagian dari faktor sosial yang dapat membentuk norma subyektif. Semakin tua usia seseorang dan semakin lama ia bekerja, maka pengalaman hidup yang dipeolehnya akan semakin banyak. Begitu juga dengan tingkat pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan pengalaman yang diperolehnya juga semakin banyak. Ajzen (2005), menjelaskan bahwa beberapa faktor sosial yang dapat membentuk keyakinan normatif seseorang, yaitu; usia, jenis kelamin, pendidikan, pendapatan, pengalaman, dan pengetahuan. Keyakinan normatif akan membentuk norma subyektif yang akan mempengaruhi niat perilaku seseorang.

Kontrol perilaku persepsian (*perceived behavioral control*) berhubungan dengan persepsi manusia mengenai kemudahan atau kesulitan dalam melakukan suatu perilaku yang diinginkan (Ajzen 2005). Dalam penelitian ini, kontrol perilaku persepsian mengacu pada keputusan pribadi, sumber daya, pengetahuan, dan kemampuan individu untuk mengimplementasikan PP Nomor 71 Tahun 2010. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kontrol perilaku persepsian tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat untuk

mengimplementasikan PP Nomor 71 Tahun 2010. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Hidayat dan Nugroho (2010) yang menggunakan *Theory of Planned Behavior* (TPB) untuk menjelaskan perilaku ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian yang sama juga ditemukan oleh Pontoh *et al.* (2013), yang menyatakan bahwa persepsi Kontrol Komunikasi dan Manajemen Data Nasional (KOMANDAN) Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) tidak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap niat menggunakan KOMANDAN SIKD. Namun berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, semakin besar kontrol perilaku persepsian, semakin kuat niat seseorang untuk melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan.

Penjelasan yang dapat diajukan dari hasil penelitian ini, yaitu aparatur pemerintah daerah beranggapan bahwa implementasi PP Nomor 71 Tahun 2010 dianggap belum begitu perlu, karena secara teknis pelaksanaannya belum dilakukan oleh pemerintah daerah. Aparatur pemerintah juga mempercayai bahwa mereka belum mempunyai sumber daya dan faktor-faktor pendukung yang dapat memfasilitasi implementasi PP Nomor 71 Tahun 2010. Dalam Jogiyanto (2008) dijelaskan bahwa kepercayaan-kepercayaan yang paling utama menentukan niat dan tindakan adalah sekumpulan kontrol yang berhubungan dengan kehadiran atau ketidak-hadiran dari sumber-sumber daya yang dibutuhkan. Olehnya itu, untuk membangun kepercayaan-kepercayaan kontrol dari aparatur pemerintah daerah, salah satu langkah yang dapat dilakukan, yaitu dengan menyediakan anggaran untuk melakukan pelatihan dan sosialisasi secara bertahap dan berkelanjutan. Melalui kegiatan ini, diharapkan aparatur pemerintah mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai PP Nomor 71 Tahun 2010.

Kesiapan organisasi untuk berubah erat kaitannya dengan komitmen (*commitment*) dan keyakinan-sendiri (*self efficacy*) dari semua anggota organisasi untuk mengimplementasikan perubahan organisasi. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kesiapan untuk berubah (*readiness for change*) merupakan

prediktor terbaik dalam memprediksi niat implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Kesiapan untuk berubah, menunjukkan harapan dari aparatur pemerintah daerah kota dan kabupaten se Sulawesi Tengah, bahwa perubahan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual melalui implementasi PP Nomor 71 Tahun 2010, dapat membawa perubahan yang lebih baik bagi perencanaan, peningkatan, pengelolaan, dan pengendalian asset, serta penilaian kinerja. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Eby *et al.* (2010), Nugraheni (2012), dan Kwakh dan Lee (2008).

Kesiapan dari aparatur pemerintah daerah kota dan kabupaten se-Sulawesi untuk melakukan perubahan, salah satunya didukung oleh masa kerja dari aparatur. Data demografi responden menunjukkan 79,49% responden memiliki masa kerja atau lama menduduki jabatan kurang dari tiga tahun. Hanpachern, Morgan, dan Griego (1998) menyatakan bahwa masa kerja merupakan salah satu prediktor kesiapan untuk berubah, karyawan yang baru bekerja dalam suatu perusahaan memiliki kesiapan untuk berubah yang lebih tinggi dibandingkan karyawan yang telah lama bekerja. Responden pada penelitian ini seluruhnya adalah termasuk dalam tingkat jabatan pimpinan. Dalam hal ini Hanpachern, Morgan, dan Griego (1998) menyatakan bahwa karyawan yang termasuk kedalam tingkat jabatan pimpinan akan lebih siap untuk berubah, karena mereka dibekali terlebih dahulu dengan informasi yang lengkap mengenai pelaksanaan perubahan.

Strategi sosialisasi dan pelatihan mengenai penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010, dilakukan oleh pemerintah Kota dan Kabupaten se-Sulawesi Tengah secara berjenjang dari pimpinan level kebijakan sampai dengan pelaksana teknis. Tujuannya adalah untuk meningkatkan *skill* pelaksana, membangun *awareness*, dan mengajak keterlibatan semua pihak. Disamping itu, kegiatan ini juga dapat membentuk komitmen dan keyakinan-sendiri (*self efficacy*) dari aparatur pemerintah daerah. Tingkatan *self efficacy* yang tinggi akan menimbulkan niat yang lebih kuat untuk mem-

bentuk suatu perilaku (Bandura, 1977). Pertimbangan-pertimbangan keyakinan-sendiri diyakini memengaruhi respon-respon emosional dari individual. Individual-individual akan cenderung menyukai dan menikmati perilaku-perilaku yang mereka rasakan mereka mampu melakukannya dengan baik. Pernyataan ini didukung oleh hasil penelitian Betz dan Hackett (1981) yang menemukan bahwa persepsi-persepsi keyakinan sendiri secara signifikan berhubungan dengan perasaan atau niat.

SIMPULAN

Sikap terhadap perilaku dan norma subyektif dari TPB, serta kesiapan untuk berubah merupakan penentu dari niat implementasi peraturan pemerintah nomor 71 Tahun 2010. Aparatur pemerintah daerah memercayai dan berharap bahwa implementasi PP Nomor 71 Tahun 2010 akan membantu aktivitas kerja mereka, dapat memberikan hasil yang positif, dan implementasi tersebut mendapat dukungan dari atasan serta rekan kerja mereka. Dari ketiga variabel penentu niat tersebut, kesiapan untuk berubah merupakan prediktor terbaik dalam memprediksi niat. Hal ini berarti pada dasarnya aparatur pemerintah daerah telah siap menghadapi implementasi PP nomor 71 tahun 2010. Namun masih terdapat kendala yang menghambat kinerja aparatur, yaitu pengetahuan, kemampuan, dan sumber daya dari aparatur. Kendala-kendala ini ditunjukkan oleh variabel kontrol perilaku persepsian yang tidak berpengaruh signifikan terhadap niat implementasi implementasi PP Nomor 71 Tahun 2010. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyarankan agar peneliti selanjutnya dapat menambahkan lingkup lokasi penelitian agar generalisasi hasil penelitian dapat lebih luas. Metode eksperimen juga dapat diterapkan, agar memberikan gambaran yang semakin utuh dan menyeluruh mengenai faktor-faktor lain yang dapat menjadi prediktor niat. Terakhir, penelitian ini dapat diperluas dengan menambahkan variabel ekspektasi kinerja dan dukungan organisasi, atau dapat juga dengan menggunakan model TPB yang diuraikan.

DAFTAR REFERENSI

- Ajzen, I., dan M. Fishbein. 1970. The prediction of behavior from attitudinal and normative variable. *Journal of Experimental Social Psychology* 6 (4): 466-487.
- Ajzen, I. 1991. The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*. 50 (2): 179 –211.
- Ajzen, I. 2002. Perceived behavioral control, self-efficacy, locus of control, and theory of planned behavior. *Journal of Applied Social Psychology* 32 (4): 665-683.
- Ajzen, I. 2005. *Attitudes, personality, and behavior (2nd Edition)*. England: Open University Press/McGraw- Hill.
- Betz. N. E., dan G. Hackett. 1981. The relationship of career-related self-efficacy expectations to perceived career option in college women and men. *Journal of Counseling Psychology* 28 (5): 399-410.
- Bandura, A. 1977. Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. *Psychological Review* 84 (2): 191-215.
- Bidin, Z., F. M. Shamsudin, M. S. Shalihen, dan O. M. Zainudin. 2011. Factors influencing intention to comply with local sale tax in Malaysia. *Society of Interdisciplinary Business Research (SIBR) Conference on Interdisciplinary Business Research*.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sulawesi Tengah. 2014. *Hasil pemeriksaan atas LKPD TA 2013 tujuh kota dan kabupaten di Sulawesi Tengan mendapat opini WDP*. <http://www.palu.bpk.go.id/?p=14583> (D akses 20 Juni 2014).
- Eby, L., D. Adams, J. Russel, dan S. Gaby. 2000. Perceptions of organizational readiness for change: Factor related to employees reactions to the implementation of team based selling. *Human Relations* 53 (3): 419-442.
- Fishbein, M., dan I. Ajzen, I. 1975. *Belief, attitude, intention, and behavior: An introduction to theory and research*. MA: Addison-Wesley.
- Hartwick, J., dan H. Barki. 1994. Explaining the role of user participation in information system use. *Management Science* 40 (4): 440-465.
- Hanpachern, C., G. A. Morgan, dan O. V. Griego. 1998. An extension of the theory of margin: A framework for assessing readiness for change. *Human Resource Development Quarterly* 9 (4): 339-350.
- Hidayat, W., dan A. A. Nugroho. 2010. Studi empiris theory of planned behavior dan pengaruh kewajiban moral pada perilaku ketidakpatuhan pajak wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 12 (2): 82-93.
- Holt, D. T., A. A. Armenakis, H. S. Feild, dan S. G. Harris. 2007. Readiness for organizational change: The systematic development of a scale. *The Journal of Applied Behavioral Science* 43 (2): 232-255.
- Huda, N., N. Rini, Y. Mardoni, dan P. Putra. 2012. The analysis of attitudes, subjective norms, and behavioral control on muzakki's intention to pay zakah. *International Journal of Business and Social Science* 3 (2): 271-279.
- Jogiyanto. 2008. *Sistem informasi keperilakuan*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Jogiyanto., dan W. Abdillah. 2009. *Konsep dan aplikasi PLS (Partial Least square) untuk penelitian empiris*. Yogyakarta: BPFE.
- Kwahk, K-Y., dan J-N. Lee. 2008. The role of readiness for change in ERP implementation and empirical validation.

- Journal Information and Management* 45 (7): 474-481.
- Mustikasari, E. 2007. Kajian empiris tentang kepatuhan wajib pajak badan di perusahaan industri pengolahan di Surabaya. *Simposium Nasional Akuntansi X Makassar*.
- Nugraheni, A. L. 2012. Pelatihan self efficacy untuk meningkatkan kesiapan pegawai dalam menghadapi perubahan pada karyawan PT. PLN (Persero) PUSDIKLAT. Tesis., Universitas Indonesia.
- Ozer, G., dan E. Yilmaz. 2011. Comparison of the theory of reasoned action and the theory of planned behavior: An application on accountans information technology usage. *African Journal of Business Management* 5 (1): 50-58.
- Pangestu, F., dan O. Rusmana. 2012. Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tax compliance penyetoran SPT masa (Survey pada PKP yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto). *Simposium Nasional akuntansi XV Banjarmasin*.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Berbasis Akrua)*.
- Pontoh, G. T., M. Mustafa, Haliah, dan Kartini. 2013. Analisis pemanfaatan sistem informasi KOMANDAN SIKD pada provinsi dan kabupaten/kota di Sulawesi. *Jurnal BPPK* 6 (1).
- Sihombing, S. O. 2004. Hubungan sikap dan perilaku memilih satu merek: Komparasi antara theory of planned behavior dan theory of trying. Disertasi., Universitas Gadjah Mada.
- Schifter, D.E., and I. Ajzen. 1985. Intention, perceived control, and weight loss: An application of the theory of planned behavior. *Journal of Personality and Social Psychology* 49 (3): 843-851.
- Smart, M. 2012. The application of the theory of planned behaviour and structural equation modelling in tax compliance behaviour: A New Zealand study. Disertasi., University of Canterbury.
- Taylor, S., dan P. A. Todd. 1995. Understanding information technology usage: A test of competing models. *Informational Systems Research* 6 (2): 144-176.
- Walinga, J. 2008. Toward a theory of change readiness: The role of appraisal, focus, and perceived control. *The Journal of Applied Behavioral Science* 44 (3): 315-347.
- Weiner, B. J. 2009. A theory of organizational readiness for change, implementation science. *Implementation Science* 4 (67).

CPD FOR MEMBERS OF AUDITING PROFESSION IN INDONESIA: PROVIDERS' POINT OF VIEW

Ayu Chairina Laksmi

Accounting Department, Faculty of Economics, Universitas Islam Indonesia

e-mail: rien1977@yahoo.com

Abstract

In accounting, CPD is a relatively new area of research and therefore worthy of attention. CPD for public accountants and CPA (Certified Public Accountant) holders in Indonesia are compulsory, however, studies into the compulsory CPD is still limited. Using semi-structured interview as its data collection method and thematic analysis as its data analysis tools, this study investigates CPD for the members of auditing profession through CPD providers' – which is the Indonesian Institute of Certified Public Accountants or IICPA and the Indonesian Institute of Accountants or IIA – point of view. Through purposive sampling employed in this study, three people from the IICPA and one person from IIA are interviewed in 2011 and 2012. The people interviewed are the staff who plan, organise and monitor CPD offerings directly. The findings of this study demonstrate that the IICPA is the main provider of CPD for the members of auditing profession, however, their compliance to IFAC requirements on CPD is still questionable. The IIA is also another CPD provider, although the number of auditing profession members who join their CPD declines every year. The roles of IICPA in offering CPD are to educate through improving knowledge and professionalism and to ensure public accountants' compliance towards rules and regulations. Both IICPA and IIA do not appear to have a framework in offering their CPD. Furthermore, they also do not organise CPD based on the needs of individual CPD participants from different level in the organisation. Finally, the findings also show that unlike the IIA that do not focus their CPD based on specific needs, the IICPA focuses their CPD offerings on both individual and organisational needs.

Key words: CPD, Continuing Professional Development, auditing profession, Indonesia

Abstrak

Di bidang akuntansi PPL merupakan area penelitian yang relatif masih baru dan oleh karenanya layak untuk mendapatkan perhatian. PPL untuk akuntan publik dan pemegang sertifikat CPA (Certified Public Accountant) di Indonesia wajib dilaksanakan, akan tetapi studi yang meneliti PPL wajib ini masih terbatas. Dengan menggunakan interview semi terstruktur sebagai metode pengumpulan data dan analisis tematik sebagai alat pengolah data, studi ini menginvestigasi PPL untuk anggota profesi auditing di Indonesia melalui sudut pandang penyedia PPL yaitu Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Melalui purposive sampling studi ini mewawancarai tiga orang dari IAPI dan satu orang dari IAI. Semua partisipan yang diwawancarai di studi ini adalah para staf yang secara langsung merencanakan, mengatur dan memonitor aktivitas PPL yang ditawarkan kepada anggota profesi auditing di Indonesia. Hasil studi ini menunjukkan bahwa IAPI adalah penyedia PPL yang utama. Akan tetapi kepatuhan IAPI terhadap peraturan dari IFAC mengenai PPL masih dipertanyakan. IAI juga menyelenggarakan PPL meski jumlah anggota profesi auditing yang mengambil PPL dari IAI terus menurun setiap tahunnya. Peran IAPI dalam kaitannya dengan PPL adalah mendukung dengan cara meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme dan juga untuk memastikan kepatuhan akuntan publik terhadap peraturan dan perundangan yang ada. Baik IAPI maupun IAI tidak mempunyai suatu kerangka dalam menawarkan PPL mereka. Selain itu, IAPI dan IAI tidak menyelenggarakan PPL berdasarkan kebutuhan yang berbeda dari individu partisipan PPL berdasarkan tingkatnya di dalam organisasi. Hasil studi ini juga menunjukkan bahwa tidak seperti IAI yang tidak memfokuskan PPL mereka terhadap suatu kebutuhan khusus, IAPI memfokuskan PPL mereka baik untuk kebutuhan pribadi maupun kebutuhan organisasi.

Kata Kunci: PPL, Pendidikan Profesional Berkelanjutan, profesi audit, Indonesia

INTRODUCTION

Continuing Professional Development or CPD is an important activity and also a condition of membership in many professions, including accounting. Professional accountants have a responsibility to the public, and to professional accountants themselves, to ensure that they continue to develop and maintain the competence demanded by their professional roles and by the clients who use their services (Paisey, Paisey and Tarbert 2007). Furthermore, professional accountants must ensure that they keep up to date with any matters related to their profession (Guthrie 2004; Paisey, Paisey and Tarbert 2007; Rothwell and Herbert 2007; Ciccotosto, Nandan and Smorfitt 2008; IFAC 2008; De Lange, Jackling and Suwardy 2010; De Lange *et al.* 2012; Lindsay 2012; Udin *et al.* 2012). Keeping up to date has become paramount for professional accountants since accounting knowledge continues to develop and change rapidly (Berg 2007).

In the accounting context, CPD is a relatively new research area. According to Paisey and Paisey (2004) although professional issues in the accounting profession have been discussed extensively, CPD is still an under-researched area and is therefore worthy of attention. This study investigates CPD for the auditing profession in Indonesia, in particular CPD for public accountants and CPA holders. At the moment, the members of auditing profession in Indonesia gather in these two accounting professional bodies: 1) Indonesian Institute of Accountants (the IIA) and; 2) Indonesian Institute of Certified Public Accountants (the IICPA).

Currently, public accountant is the only accounting profession in Indonesia that is required to undertake CPD by the law. The Public Accountant Act (the Act Number 5 of 2011) affirms that the public accountants must undertake CPD. There are also other auditors who are CPA holders but have not yet registered as public accountant. The IICPA in its bylaw (IICPA 2012) states that CPD is a continuous learning that is compulsory for its members in order to maintain, improve and develop their professional competencies. Si-

milarly, the IIA (2012) also states that CPD is compulsory for all of its members and CPD for the members follows IFAC's rule. It can be concluded that both public accountants and CPA holders who are members of the IICPA and the IIA must undertake CPD according to the law and professional bodies' regulation.

The overall aim of this study is to investigate how and why CPD for the public accountants and CPA holders in Indonesia is conducted from the providers' point of view. This study focuses on the IICPA and the IIA as the CPD providers for the members of auditing profession in Indonesia. The study uses qualitative methodology since this study aims to find out how and why the CPD providers organise their CPD. Small sample size is acceptable in qualitative methodology since generalisability is not the issue (McCracken 1988; Shank 2002; Bryman and Bell 2006). Data is collected through semi-structured interview and thematic analysis is used as a data analysis tools in analysing themes that surface from the interview. Thematic analysis is one common data analysis in qualitative research and it has demonstrated its usefulness in investigating CPD for the professional accountants.

Three people from the IICPA and one person from the IIA are interviewed in this study. These people are the key staff who plan and organise CPD offerings for the members of auditing profession. The representatives from the IICPA are: (1) the Chief Professional Education Officer who is responsible for organising CPD activities for the auditing profession in Indonesia; (2) the Chief Education Implementation Agency, the agency is responsible for overseeing and monitoring the organisation of CPD by the Professional Education Officer; and (3) a member of the Education Implementation Agency. The representative from the IIA is the Director of Education and Certification whose duty is to oversee all matters related to education, including CPD, and also members' professional certification. To protect the identity of the participants of this study, they are identified simply as Interviewee 1, Interviewee 2, Interviewee 3 and Interviewee 4 as shown in Table 1 below.

Table 1: The IICPA Representatives' Profile

No.	Identifier	Position
1	Interviewee 1	Chief Professional Education Officer - IICPA
2	Interviewee 2	Member of Education Implementation Agency - IICPA
3	Interviewee 3	Chief Education Implementation Agency - IICPA
4	Interviewee 4	Director of Education and Certification - IIA

The next section discusses a literature review of CPD and followed by discussion on research methodology used in this study. The findings of this study are presented in results and discussion section. Conclusion provides recommendations, limitations, future research directions, and final remarks.

LITERATURE REVIEW

This section provides a review of the literature on CPD. The review discusses choice of CPD provider, compliance to IFAC requirements on CPD, role of professional body, CPD framework, different CPD for different level in the organisation, organisation's role in offering CPD, and focus of CPD offering.

Choice of CPD Provider

Currently there are two professional bodies for accountants in Indonesia. These bodies are the Institute of Certified Public Accountants (IICPA) and the Indonesian Institute of Accountants (IIA). Public accountants and CPA holders in Indonesia must become members IICPA. Furthermore, they can also be a member of IIA and register with various governmental institutions such as the Central Bank, the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency and the State Audit Board. Despite the various professional and government bodies, which bodies that are allowed to organise CPD for the public accountants and CPD holders in Indonesia is still unclear. Therefore, it is useful to investigate whether all or some of the aforementioned professional and regulatory bodies are also CPD providers.

Compliance to IFAC Requirements on CPD

The International Education Standards (IES) 7 published by IFAC in 2004 and then redrafted in 2012 contains the requirement of CPD for

IFAC members. The IES 7 (IFAC 2004) suggests the IFAC member bodies to promote to their members, stakeholders and the public, the benefits of CPD highlighting the importance of continuous improvement of competence and a commitment to lifelong learning and to facilitate access to CPD opportunities and resources to assist professional accountants in meeting their responsibility for lifelong learning. The IIA is a member body of IFAC The IICPA is the member body of the IIA (IIA 2012) and, hence, the IICPA must conform to the IFAC requirements in offering CPD to the members of auditing profession in Indonesian.

Currently, there is limited literature or information available regarding how the CPD offerings by the CPD providers conform to the IFAC requirements. Therefore, it is helpful to find out whether or not the CPD offering for the members of auditing profession in Indonesia conform to the IES 7 from the CPD providers' point of view.

Role of Professional Body

Professional bodies are definers, controllers, supporters and also suppliers of CPD activities (Dix 1995; Friedman and Phillips 2004; Friedman 2012). Many of these activities have been part of the normal working of a professional body long before CPD is formalised. Moreover, in recent years there has been a proliferation of CPD policy-making by professional bodies (Rapkins 1996). These policies are the means by which professional bodies have responded to the changes faced by members in technology and knowledge, the demand for quality assurance and accountability from the public, and the need to increase the competitiveness of the economy.

Most professionals are always kept up to date with developments and changes in their

field of practice. Nonetheless, CPD has been conceived as basic activities and ad hoc, and it is aimed more to respond immediate specific needs and updating rather than a continuing development process (Jones and Robinson 1997; Friedman 2012). Although it is recognised that such an urgent need for professional development will always need to be met, the changing demands faced by the profession needs a more planned approach to CPD (Rapkins 1996). As a result, professional bodies have put themselves at the forefront of the development of this approach through CPD.

Furthermore, Rapkins (1996) also argues that in building a favourable environment for CPD, there must be a recognition and development partnership between all those who will benefit from and have the responsibility for CPD. Those parties are individual professionals, professional bodies, employers, providers, and communities. The professional bodies as the initiator - and often the provider - of CPD, play an important role. The need for continuous learning should be instilled during initial professional education to establish a synthesis of initial and continuing education. Thus, professionals must get support and guidance on CPD and it is one of the tasks of professional bodies

Up to now, it is still unclear who is responsible in offering, planning and monitoring CPD for the public accountants and CPA holders in Indonesia. As previously mentioned, there are two accounting professional bodies in Indonesia. Therefore, it will be advantageous to find out the role of accountant professional bodies in Indonesia in offering CPD.

CPD Framework

A CPD framework is considered useful for professional associations in offering CPD for their members. Some well-known non-accounting professional bodies have developed CPD frameworks to support their CPD offerings. The Association of University Administrators UK (2009), for example, maintains that their CPD framework provides the basis for a common national approach to CPD for professional staffs, provides institutions

with a broad structure within which to identify the CPD needs of professional staffs in their organisations and to plan and deliver development activities to meet those needs. From medical practitioner professional body, the Royal Australian and New Zealand College of Obstetricians and Gynaecologists (2011) provides a CPD framework as part of their Learning, Education and Professionalism project and they believe that it offers flexibility, breadth, and rigour needed to facilitate relevant and effective CPD for today's medical specialists.

According to Allinson (2010), CPD framework helps the professionals to consider their current and future desired practice roles. A CPD framework is beneficial in the sense that it covered the whole aspect of CPD. Thus, the framework provided a structured and fundamental platform for the development of professional competency of individual professionals and sustainability the profession as a whole. Furthermore, Allinson (2010) also argues that CPD is also implemented to the mutual benefits of the individual professional, employers, the profession, and society as a whole. Consequently, a framework can facilitate in bringing together the various stakeholders' point of views regarding CPD and what CPD should be doing in fulfilling the professionals' needs. Given the importance of a CPD framework, it is useful to investigate the framework used by CPD providers for the Indonesian public accountants and CPA holders in offering their CPD.

Different CPD for Different Level in the Organisation

CPD participants' different level in the organisation does matter in CPD. Wood and Anderson (2003) find that those who are in the 3-5 years on the profession are more open to CPD opportunities than more established professionals whom they perceive as less so. Studies by Hustler *et al.* (2003) and Sim and Radloff (2009) demonstrate that more recently qualified professionals have more positive dispositions towards CPD. A more complex reason may be that the more recent generation of pro-

professionals has a higher regard for education. It can also be argued that the more senior professionals are afraid of change due to feeling less well prepared than their younger counterparts (Sim and Radloff 2009). Hustler *et al.* (2003) also argue that there is a practice of segmentation, which is an activity of identifying distinct groupings in the workforce, for example by age, gender, experience or responsibility and planning their needs in relation to their expected beliefs, attitudes and dispositions towards their professional life.

Pool, Poell and Cate (2013) find that younger and older professionals perceive CPD differently since CPD purpose and the contributing learning activities are considered to change during the lifespan. They argue that the requirements and needs of different age group of professionals should be considered when developing strategies for CPD. Learning from the abovementioned studies, it will be more beneficial if CPD is designed to meet different needs of different segments or levels in the organisations. Therefore identifying common characteristics in segments of the workforce may lead to CPD that is tailored to the different segments.

It is arguably a difficult task to meet all individual needs in terms of CPD. Nevertheless, it is the duty of professional bodies to try to meet their members' individual needs. Professional bodies should have a clear CPD policy that defines CPD, the aims of CPD and how they will achieve those aims. Rapkins (1996) maintains that it is best when professional bodies provide a structured and systematic CPD throughout a professional career. From accounting profession, De Lange, Jackling and Suwady (2010) find that one-size fits all approach to CPD is inappropriate and that professional bodies should aim CPD at different level in the organization. In another words, CPD for the professionals – including accountants - should be differentiated according to their career stages of level in the organisation. Therefore, it is important to find out whether or not CPD for the Indonesian public accountants and CPA holders is already customised to different level of organisation.

Focus of CPD Offerings

Knowles, Holton and Swanson (2005) maintain that exploring the gaps between research and practice is a primary role for the professionals. The call to action is to implement best known practices and to assess valid learning needs, create and implement valid strategies for achieving learning goals and conduct valid assessment of learning and that effort should be directed at organisation needs as well as those of individual professionals. Sim and Radloff (2009) argue that professionals need to focus their CPD on both personal level and on workplace level. They elaborate further that CPD helps individual professionals to reflect on their current practice. The reflective practitioners take ownership of their learning and are driven by motivation to learn in order to advance their practice in their workplace. As a result, organisational needs of having competent staff can be fulfilled by CPD indirectly. Learning needs of individual professional and organisational needs, hence, should be both taken into account. This study will try to seek the CPD providers' opinion regarding the focus of CPD they offer to the members of auditing profession. Should CPD be focused on individual personal development only, or should the organizations' needs be taken into account as well when determining CPD.

RESEARCH METHODOLOGY

This study employs a qualitative methodology since the aim of this study is to find out how and why CPD for the members of auditing profession in Indonesia is conducted from the CPD providers' point of view. Hennink, Hutter and Bailey (2011) explains that qualitative methodology are typically used for providing an in-depth understanding of the research issues that involves the perspectives of the study population and the context in which they live. In particular qualitative research is also useful for exploring new topics or understanding complex issues; for explaining people's belief and behavior, and for identifying the social or cultural norms of a culture or society (Hennink, Hutter and Bailey 2011). Therefore, qualitative me-

thodology is suitable for this study since research CPD in the accounting context is considered as new area and worthy of attention.

The data collection method chosen is semi-structured interview since this method allowed the participants to have authority over their own stories, which means that they are seen as “experts”. This is important since CPD for accounting profession in Indonesia is a rarely investigated area, thus, lots of information needed to be gathered to answer the research question of this study. Moreover, semi-structured interviews offer a more flexible approach to interview process than structured interviews (Bryman and Bell 2006; Ryan Coughlan and Cronin 2009) and interviews enable the words and perspective of the participants to emerge (Hesse-Biber and Leavy 2010). The semi structured interviews in this study are conducted with four participants from accounting professional bodies in Indonesia in 2011 and 2012.

Coding is conducted in this study prior to data analysis. The coding of the data follows the guideline set out by Saldana (2013) and Miles, Huberman and Saldana (2014). The First Cycle coding and the Second Cycle coding are employed in order to find the perfect fit for the data of this study. Both of the cycles coding are very helpful in identifying various themes emerged in this study. Thematic analysis is employed in this study as a data analysis tools. A theme captures something important about the data in relation to the proposed research questions, and represents some level of patterned response or meaning within the data set (Braun and Clarke 2006). Three stages of thematic analysis are conducted in this study and the stages follow Boyatzis (1998), Braun and Clarke (2006), Howitt and Cramer (2008), and Jones and Forshaw (2012). The first stage is transcribing textual material. This process is based on the qualitative data collection method employed in this study, which is the semi-structured interview. Reading and transcribing the data increased this investigator’s familiarity with the materials. In other words, the transcription process was part of the process of analysis. The whole process from

interview to translation of interview texts assisted this investigator to become familiar with the text early and this continued throughout the data analysis. The second stage of the analysis is conducting analytic effort. This refers to the amount of work or processing that this investigator applies to the text in order to generate the final themes, which are the endpoint of thematic analysis (Braun and Clarke 2006; Howitt and Cramer 2008). The analytic efforts conducted in this study are: (a) this investigator becomes increasingly familiar with the text via semi-structured interviews, and transcribing and translating the interview texts, so that understanding can be achieved, thereby avoiding partial knowledge of the data; (b) this investigator works to obtain the details of the data, both by analysing each sentences and entire passages from the study participants’ answers, in order to summarise the overall themes; (c) this investigator processes and reprocesses the data in order to achieve as close a fit of the analysis to the data as possible; (d) this investigator checks and rechecks the fitness of the data analysis process. The third and last stage is identifying themes and sub-themes. According to Braun and Clarke (2006), researchers differ considerably in terms of how and how carefully they choose to refine the themes, which emerge from their analysis. Therefore, this investigator works carefully to decide on appropriate coding for the data and on the useful and employable themes that emerged from those data. This investigator continues with this process until the work is deemed to be has gone as far as possible. This process of continuing with analysis in qualitative methodology until one can go no further is known as ‘saturation’ (Hennink, Hutter and Bailey 2011; Jones and Forshaw 2012; Richards and Morse 2013).

For validity, this study follows the guidelines provided by Kvale and Brinkmann (2009). This study relies on the quality of the interview process for the validity of the materials and interviewing a number of participants in order to be able to verify one another’s answers. Preparation before interview such as carefully drafted interview questions, the use

of a good quality audio recording, interview guide, and also allocating a minimum of one hour for each interview help this investigator to conduct good quality interviews. Building a rapport with the participants during the interviews is also crucial in this study. This investigator also tries to gather as many stories as possible from the participants in order to understand and to make meaning of their experiences and understanding regarding CPD. Moreover, this study also follows the interview guide to ensure that the interviews run smoothly and in the right direction. After all, 'the best guarantee of the validity of interview material is careful, concrete level, interviewing within the context of a good interviewing partnership' (Weiss 1994, p. 150).

RESULTS AND DISCUSSION

From the CPD providers' point of view, Interviewee 1, 2, 3, and 4 unanimously state that the IICPA is the only CPD provider for the public accountants and CPA holders in Indonesia and it is appointed directly by the Indonesian Government through the Law no 5 of 2011. Interviewee 4 explains as follows regarding CPD providers for the members of auditing profession:

"Definitely the IICPA (is the CPD provider) for the public accountants. But there are also other institutions that are recognised by the IICPA. One of those institutions is the IIA. Recognised means not all of (CPD) credit points (from other providers) are fully recognised."

Thus, the findings demonstrate that the IIA is not the main CPD provider for the auditing profession in Indonesia. The IIA provides CPD but credit points from that CPD will not be fully recognised by the IICPA. When asked whether or not other organisations also providing CPD for the public accountants in Indonesia, Interviewee 1 replies:

"I don't know whether or not the other organisations provide CPD. But the IICPA should be the one to organise CPD for the public accountants. I think

the Law No. 5 of 2011 already appointed the IICPA to organise CPD. But the Ministry of Finance also has an interest in CPD, which is why they give the (CPD) topics to us. Usually, their topics are related to government's regulations. So they only give us the topics or the speakers, but we organise it (CPD)."

Meanwhile, Interviewee 2 states that the IICPA is the only CPD provider for public accountants in Indonesia. Interviewee 2 also explains that although the IICPA is the only provider, it also gives a leeway for the public accountants to undertake CPD from other providers, for example from the IIA or other organisations. However, the IICPA only recognises 15 per cent of the total credit points. The reason for the restriction is CPD quality from other organisations cannot be monitored by the IICPA:

"Because, we can't monitor the quality of CPD (for the public accountants) if other organisations organise it. If the IICPA organises CPD, we monitor it through the presence sheet. Every (CPD) participant must sign the presence sheet, if the CPD is a one day seminar; they have to sign twice, in the morning and in the lunch time."

Similar answer regarding CPD held by other providers apart from the IICPA is received from Interviewee 3:

"Well, what we want is this: we want to guard the (CPD) content, we must avoid it (CPD content) to get out of control. We need to make the content strict in order to maintain accounting practices (in Indonesia) in accordance with the competence development program launched by the IICPA. For example, this year we want to shift our focus to International Auditing Standard (IAS) preparation. So this year we're preparing for IAS, last year we were preparing for IFRS. (But) other providers only did whatever they like

to do. So that's the goal of this program (CPD). Besides we have a (control) mechanism through presence sheet. We want to make sure that the (CPD) participants were there so the eight credit points (given to them) are really controlled, not only fictitious."

The findings on choice of CPD providers demonstrate that the Indonesian government appoints the IICPA as the main CPD provider for the public accountants. The IICPA also has the authority to assess CPD undertaken by the public accountants from other providers. Nonetheless, the IICPA only recognises 15 per cent of CPD credit points for CPD undertaken from organisations other than the IICPA due to quality control issue. Moreover, for other members of the auditing profession such as the CPA holders, there are no current regulations regarding their CPD providers. Thus, it can be assumed that they can undertake CPD from any providers.

The CPD providers are also asked whether or not the current CPD offerings meet the IFAC requirements of CPD as stated in the IES 7. For this question, Interviewee 3 does not want to answer because he is not ready to answer the question. When he is asked further regarding the IFAC requirement of 120 credit points in three-year period, he answers that the current regulation requires the public accountants to undertake 30 credit points per year, hence, in 3 years period it will be accumulated to 90 credit points. He also emphasises that the IICPA calculates the CPD credit points per year, not every three-year period. The reason for that is as follows:

"...so they (the public accountants) will be more disciplined, that is based on my own experience in organising CPD. Now we have CPD all year long. At first we only had CPD towards the end of the year and they (public accountants) must achieve the (CPD) target in three-year period. Just imagine if a person procrastinates and does all the credit points towards the end of the third

year, that's not good. So I think for us (the IICPA), we have to be strict".

The findings also demonstrate that Interviewee 2 does not really know the content of the IES 7. Nonetheless, Interviewee 2 acknowledges that the IICPA must adhere to the IES 7 since the IICPA is a member body of the IIA and the IIA is a member body of IFAC. The IICPA already put in their best efforts to follow the IES 7 for example by organising CPD for the members, set the minimum credit points requirements and provides updated topics. When asked further regarding the requirements of 120 credit hours of CPD in three-year period, Interviewee 2 explains that the majority of the public accountants are doing more than 30 credit points of CPD per year. One CPD seminar has 8 credit points and normally people do more than 4 days of CPD per year, hence, the 30 credit points will be achieved automatically. Similarly, Interviewee 1 does not read the IES 7 content, however, Interviewee 1 assures that the IICPA already follows the IFAC requirements on CPD credit points. For the quality of CPD, however, Interviewee 1 is not so sure whether or not they have follow IFAC's requirements. Representing the IIA, Interviewee 4 explains that CPD that they organise has followed IFAC requirements:

"Sure, we follow (IFAC requirements), the (CPD) structure follows them. But nowadays we hardly get public accountants as participants of our CPD. So, now we mainly serve non-public accountants and the public. But our (CPD) structure, minutes calculation, who the instructors are, we follow IFAC (requirements)."

Furthermore, Interviewee 4 provides answer below when asked whether or not the IICPA – which is a member body of the IIA at the time of interview – follows IFAC requirements:

"I didn't get that information (CPD organised by the IICPA). If I'm not mistaken, the IICPA refers to the Ministry of Finance regulations. For their CPD, they (the IICPA) refer to their internal

requirements. I don't know whether or not they have followed the IES 7. The IICPA should comply but they have their independence, autonomy. Therefore, we can't give them any sanctions if they don't follow the IES 7."

The abovementioned answers demonstrated that the IIA representative understands IFAC requirements on CPD and implements them. Conversely, the representatives from the IICPA are not sure whether or not they have followed the IFAC requirements in providing CPD for their members. This finding is quite interesting since the CPD providers for the members of auditing profession should adhere to global and national regulations of CPD that are applied to them. The IIA should monitor the IICPA's CPD because the IICPA is a member body of the IIA. Since the IIA is a member body of IFAC, the IICPA needs to adhere to IFAC regulations apart from adhering to the Indonesian government's regulation on CPD.

Professional bodies undoubtedly play an important role in organising and offering CPD for the members and this has supported by the literature (Dix 1995; Rapkins 1996; Friedman and Phillips 2004; Friedman 2012). When asked regarding the IICPA role regarding CPD, Interviewee 1 explains as follows:

"Yes, we are the profession's organisation; one of our roles is to organise education of this profession, in the form of CPD. So our role is to improve the horizon, knowledge, and professionalism of this profession... Knowledge in auditing, knowledge as an accountant."

Quite different from Interviewee 1, Interviewee 2 put emphasis on public accountants' compliance to the rules and regulations:

"We have one role which is to ensure the public accountants follow the rules. If they don't undertake CPD, we will be warned by the Ministry of Finance. Furthermore, we need to ensure they receive the latest information regarding development in accounting, auditing,

industry, regulations, and so on. By updating their knowledge, they automatically will maintain their competence."

Interviewee 3's answer is similar to Interviewee 1 in terms of the IICPA role in organising CPD for the public accountants. Interviewee 3 states the IICPA does all of the procedures in organising CPD from planning to execution. The IICPA needs to maintain the quality and continuity of CPD because it is the place where the public accountants can meet and interact with each other. Thus, it can be concluded that the IICPA roles in offering CPD are to educate the members of auditing profession through improving knowledge and professionalism and to ensure public accountants' compliance towards rules and regulation from the government bodies. Interviewee 4 from the IIA mentions as follows regarding their role in offering CPD:

"The IIA's role is to continue organising CPD. Before the IICPA received its independence as an organisation in, the public accountants undertake their CPD from the IIA. But since 2010, the number went down drastically to near zero. It went down especially since the new Law no. 5 of 2011 was enacted. The IIA's CPD credit points can be recognised (by the IICPA) but only a few per cent of credit point. That's the IICPA's internal rule. The IIA has no authority since the new Law states that the IICPA is the public accountants' regulator. The IICPA is a member body of the IIA but for CPD, well you know how it is. There's a collaboration between the IICPA and other organisations, especially in regions like Surabaya, Palembang, Medan, etc. As far as I know, the IICPA asks for an income-sharing, 70 per cent of the income is for them. So we never... we never consider a collaboration with the IICPA in organising CPD due to that big income-sharing. "

From the above discussion, it can be concluded that the IICPA is indeed plays an important role as a CPD provider for the public accountants in Indonesia. They have a strong position and are supported by the Law. This finding regarding the IICPA as a definer, controller, and also suppliers of CPD activities supports previous literature by Dix (1995), Friedman and Phillips (2004) and Friedman (2012). However, there is also a concern about monopoly of CPD by not recognising fully CPD credit points from other providers. Furthermore, there is also a question regarding CPD for CPA holders, who are also members of the auditing profession. It appears that the Indonesian government and the IICPA put more emphasis on CPD for the public accountants rather than the CPA holders.

As previously mentioned, a CPD framework is beneficial in underpinning CPD offering for the professionals (Allinson 2006). The findings of this study demonstrate that CPD providers do not have a particular framework in organising and offering CPD for the members of auditing profession in Indonesia. Interviewee 1 explains that the IICPA uses the need of auditors as the basis for its CPD offerings. Furthermore, Interviewee 1 explains that the IICPA focuses on giving a variety of topic such as financial accounting, auditing, management accounting, taxation and soft skills such as leadership, IT, report writing, or, human resource management etc. Regarding CPD framework, Interviewee 2 explains that every year the IICPA must submit a catalogue of CPD to the Ministry of Finance. So the catalogue will provide topics of CPD for one year ahead. The catalogue is based on development and updates of the current standards and regulations. The CPD participants' feedbacks are also taken into account into catalogue development by the IICPA. The IICPA also asks for feedbacks and input from the people in the Accounting Standards Council and also the Auditing Standards Council for the interesting and current topics. The Accounting Standards Council is the council that set the accounting standards in Indonesia and is under the IIA. The Auditing Standards

Council is under the IICPA and its role is to set the auditing standards for the public accounting profession in Indonesia. Interviewee 3 explains that the IICPA does not have any framework in organising CPD. Instead, the IICPA put emphasis on the focus of CPD. The IICPA focuses on giving face-to-face and interactive CPD to the CPD participants. They also focus on restricting CPD undertaken from other providers apart from the IICPA in order to ensure the right direction of CPD. The variety of accounting firm sizes in Indonesia also poses another problem. The Big Four firms may have more internal training facilities, when compared to smaller accounting firms. As a result, the IICPA works hard to ensure that CPD does not discriminate towards the accounting firm sizes. Furthermore, the IICPA focuses more on core accounting topics such as financial standards, auditing, stock market, and banking. Interviewee 3 also admits that soft skills are indeed important, however, there is a limited space and time to allocate. The IICPA also tries to accommodate the non-public accountants participants – such as the CPA holders - by organising special CPD with no credit points but offer cheaper registration fees. The topics are usually technical knowledge topics such as audit working papers. Although the special CPD offer a cheaper registration fee, the CPD offerings will be of high quality according to the CPD standards set by the IICPA. Interviewee 4 explains that the IIA uses the Indonesian Financial Accounting Standards as the framework that underpins their CPD offerings.

To sum up, the findings on CPD framework reveals that the IICPA as the sole provider of CPD for the members of auditing profession currently does not have a framework to underpin the current offerings. Instead of a framework, the IICPA uses the need of the auditors, the development and updates of the current standards and regulation as the basis in organising CPD for the auditors. Similarly, the IIA also does not have a certain framework for its CPD and only uses the Indonesian Financial Accounting standards as guidance. Therefore, this finding does not

support Allinson (2006) and also different from other professional bodies that have a framework to underpin their CPD offerings. It can be concluded based on the above findings that CPD for the auditing profession in Indonesia is still at ad-hoc level without a thorough planning and organisation.

The CPD providers are asked whether or not the current CPD offerings cater for different level of organisations. Interviewee 1 explains that the IICPA does not differentiate between CPD for public accountants or non-public accountants. However, the IICPA sometimes organises special CPD only for the non-public accountants such as the CPA holders. According to Interviewee 1, the special CPD will help the smaller accounting firms with limited resources in providing trainings for the staff. Similarly, Interviewee 2 comments that the IICPA only differentiate CPD for public accountants and non-public accountants:

“The differences between CPD for public accountants and non-public accountants are: CPD for non-public accountants is more detailed, workshop type, tends to discuss real practice such as journal and paperwork making; and the price is cheaper since we’re assuming lots of people will be interested.”

Interviewee 3 states that the current CPD offerings are mainly aimed at the public accountants. Furthermore, accounting firms normally send their public accountants staff to attend CPD events and sometimes non-public accountant staff too when the CPD topics are interesting or important to them. Similar to other interviewees, Interviewee 4 explains as follows:

“We don’t... differentiate. We don’t classify our CPD based on the participants’ level in their organisations. What we see is the (CPD) topics. For example, we have the latest financial accounting standards, so in three days (of CPD) we provide a lot of topics on that standards. This means we focus more on introduction to theory. But

when the topic is about gap analysis, that’s more focused. Usually, the participants will be like ‘okay’, so if they don’t understand the standards they will not join the gap analysis. Yes, gap analysis is for the more experienced ones. So we decide our topics not based on their needs but we prefer to provide a lot of menus (CPD topics) that they can choose based on their needs. There’s no disappointment (from attending the wrong CPD topics), but even if there is, they won’t protest to us. Our outlets already explain (to the participants) what the topics will be about.”

The above findings demonstrate that the CPD providers for the members of auditing profession in Indonesia do not differentiate CPD for different level of organisation. This finding does not support previous research by Rapkins (1996); Wood and Anderson (2003); Hustler *et al.* (2003); De Lange, Jackling and Suwardy (2010) and Pool, Poell and Cate (2013). In particular, De Lange, Jackling and Suwardy (2010) points out that professional bodies should differentiate CPD based on the level of organisations since each career stage has different needs. Nonetheless, it appears that the IICPA already provides some form of differentiated CPD for the non-public accountants but still without taking into account their career stage.

CPD offerings must have a focus since individual needs may differ from organisations’ needs. This study investigates the focus of CPD offered by the CPD providers, individual needs or organisation needs or both. Interviewee 1 explains as follows:

“The committee (at the IICPA), are from accounting firms. Therefore, accounting firms’ needs can be represented by them. I’m a partner (at an accounting firm) myself. So at least we know what we need. We also have a gathering, we call it FORKAP (Forum Komunikasi Akuntan Publik/Public Accountants Communication Forum),

it's an accounting firms forum, and it's also a kind of gathering forum for the accounting firms. The IICPA only focuses on its individual members, but we also have this forum and we work together (in that forum). We even have outing programs when we're bored with classrooms (activities). We've tried outbound activities. We're planning to do it again this November."

Meanwhile, Interviewee 2 explains that the IICPA determined the needs of accounting firms from the feedback forms distributed to all of the CPD participants at the end of CPD events.

"Usually we get accounting firms' needs from feedback forms. Because what we do is... we have CPD for partners (public accountants) only, with CPD credit points. But we also have CPD for staff with no CPD credit points. CPD for the staff are more detailed. Let's just say CPD for partners, it (CPD) only gives outlines. On the contrary, CPD for staff are more of a workshop, with a longer duration and also a cheaper price."

Interviewee 3 explains that the IICPA just piloted a number of partnerships with one of the Big Four firms to hold an in-house CPD event and the event is open for everyone to attend. Furthermore, according to Interviewee 3, the IICPA intends to design a curriculum together with accounting firms and help smaller accounting firms that do not have their own training facilities. Interviewee 4 maintains that at the IIA does not include accounting firms' needs in focusing their CPD offerings:

"We don't usually communicate with the accounting firms (to find what they need). But accounting firms' staff come to us. Yes, the ones who don't need CPD credit points. They (accounting firms) send them to us. CPD for latest financial standards, syariah accounting, they come to us. But the public accountants don't come (to our CPD). Even Big Four send (their staff) to us."

The findings on focus of CPD offerings demonstrate that the IICPA focuses on both individual and organisational needs and this confirm previous study by Knowles, Holton and Swanson (2005) and Sim and Radloff (2009). The IICPA is also quite proactive in collaborating with accounting firms and seek feedback from them regarding their needs of CPD. Individual needs also a focus for the IICPA and the feedback from CPD participants are useful in determining CPD topics. On the contrary, the IIA appears to be not having a specific focus on their CPD offerings. Regardless, their CPD is somewhat popular with the non-public accountants members of the auditing profession and this is maybe due to the fact that IIA offers plenty of popular topics to choose from.

CONCLUSION

Several major findings emerge from the interviews conducted with three representatives from the IICPA and one representative from the IIA. For the choice of CPD provider, it is found that the IICPA is the main provider of CPD for the auditing profession. The IICPA also has the authority to recognise CPD undertaken with other CPD providers, such as the IIA. The findings also demonstrate that the representatives from the IICPA are not sure whether or not they have followed IFAC requirements in providing CPD. Conversely; the IIA appears to be more aware that their CPD must adhere to IES 7 published by IFAC in 2004. In terms of role of professional body, the findings demonstrate that the IICPA roles in offering CPD are to educate the members of auditing profession through improving knowledge and professionalism and to ensure public accountants' compliance towards rules and regulation from the government bodies. Similarly, the IIA's role is also as a CPD provider although the number of public accountants who undertake CPD with the IIA dwindles every year. Concerning CPD framework to underpin CPD offerings, both the IICPA and the IIA maintain that they do not have a specific framework. Current updates on governmental rules and regulations; and also on ac-

counting standards have helped the CPD providers on planning and organising CPD offerings. The CPD providers' answers also demonstrate that both the IICPA and the IIA do not cater for different level of organisations in offering CPD. However, the IICPA put some efforts in providing special CPD for non-public accountants participants. Hence, some forms of differentiated CPD for the members of auditing profession do exist and these certainly beneficial considering non-public accountants' needs – including CPA holders - must also be accommodated. Furthermore, the IICPA seems to focus their CPD offerings on both individual and organisational needs. In contrast to the IICPA, the IIA do not focus on particular needs for their CPD. However, the IIA states that they offer a broad variety of CPD topics to choose from.

Based on the findings of this study, the following recommendations can be made: 1) It will be beneficial for the members of auditing profession in Indonesia to have more options regarding recognised CPD providers; 2) CPD providers should be aware of and comply to IFAC requirements on CPD; 3) A CPD framework can be established by the professional bodies to support CPD offerings. A framework will help to focus CPD offerings in order to meet individual and organisational needs of the members of auditing profession; 4) The professional bodies as CPD providers and the Indonesian government should also take into accounts non-public accountants members of the profession, especially the CPA holders. CPD for the CPA holders should also be made compulsory and be monitored. This is to ensure that the members of the auditing profession in Indonesia are all maintaining and updating their competence continuously. Furthermore, the CPA holders are only steps away from becoming public accountants, thus, their existence and their needs are equally important and should be accommodated; 5) CPD should cater for different level of of organisations or career stage, hence, the professional bodies as CPD providers should be able to capture different needs of CPD and satisfy those needs; 6) CPD provid-

ers should focus on both individual and organisational needs. In order to meet those needs, CPD providers should be proactive in seeking feedback from individual participants and also from accounting firms – be it Big Four or small firms - in Indonesia.

This study limits its scope to investigate CPD for the members of auditing profession in Indonesia from CPD providers' point of view. Another limitation of this study is it does not investigate CPD for other accounting profession in Indonesia, such as tax accountants, management accountants, public sector accountants, accounting educators, etc. The nature of qualitative methodology employed in this study also possesses some inherent limitations since reality is seen as multiple, subjective; and also cannot be generalised to the population. Future reserch on this particular topic can also include CPD participants, using quantitative methods or combination of qualitative and quantitative methods; and also involve other accounting professions in order to acquire a broader view of CPD.

REFERENCES

- Allinson, Y. 2010. Demystifying the new CPD. *The Australian Journal of Pharmacy* 91: 34.
- Association of University Administrator. 2009, *Continuous Professional Development framework for staff working in professional services in higher education*, <http://www.aua.ac.uk/professional_development/cpd/framework_doc/documents/cpd_framework.pdf> (accessed 30 July 2011).
- Berg, M. C. 2007. Continuing Professional Development – The IFAC position, *Accounting Education* 16 (4): 319-27.
- Boyatzis, R. E. 1998. *Transforming qualitative information: Thematic analysis and code development*. Thousand Oaks: Sage Publication, Inc.

- Braun, V., and V. Clarke. 2006. Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology* 3 (2): 77-101.
- Bryman, A., and E. Bell. 2006. *Business research methods*. Oxford: Oxford University Press.
- Ciccotosto, S., R. Nandan, and D.B. Smorfitt. 2008. Issues facing small accounting practices in regional North Queensland: An exploratory study. *Australian Accounting Review* 18 (4): 324-333.
- De Lange, P., B. Jackling, and T. Suwardy. 2010. *Access to CPD opportunities and resources to assist professional accountants to meet their commitment to lifelong learning: Evidence from the Asia Pacific region*. IAAER. http://files.iaaer.org/research/de_Lange_Final_Report.pdf?1406817147 (accessed 7 September 2011).
- De Lange, P., B. Jackling, I.G. Basioudis, A. Halabi, S. Ravenscroft, and T. Suwardy. 2012. *A framework of best practice of Continuing Professional Development for the accounting profession*. IAAER. http://files.iaaer.org/research/Delange_and_Jackling_et_al_Final_Report_Dec_10_2012.pdf?1406817950 (accessed 9 March 2013).
- Dix, C. 1995. Continuing professional development: Challenge and change. In *Continuing professional development: Perspectives on CPD in practice*, ed. S. Clyne. London: Kogan Page Limited.
- Friedman, A. L., and M. Phillips. 2004. Continuing professional development: developing a vision. *Journal of Education and Work* 17 (3): 361-376.
- Friedman, A. L. 2012. *Continuing professional development: Lifelong learning of millions*. Abingdon: Taylor & Francis.
- Guthrie, L. 2004. Action reply. *Financial Management* November: 26-27.
- Hennink, M., I. Hutter, and A. Bailey. 2011. *Qualitative research methods*. London: SAGE Publications.
- Hesse-Biber, S. N., and P. Leavy. 2010. *The Practice of qualitative research*. London: SAGE Publications.
- Howitt, D., and D. Cramer. 2008. *Introduction to research methods in psychology*. Prentice Hall.
- Hustler, D., O. McNamara, J. Jarvis, M. Londra, A. Campbell, and J. Howson. 2003. *Teachers' perspectives of Continuing Professional Development*: DfES Research Report No. 429. London: DfES.
- IFAC. 2004. *International Education Standard IES 7*. IFAC <<http://web.ifac.org/publications/international-accounting-education-standards-board/handbook#handbook-of-international-e>> (accessed 22 August 2011).
- . 2008. *Approaches to Continuing Professional Development (CPD) measurement*. IFAC. <http://www.ifac.org/sites/default/files/publications/files/approaches-to-continuing-pr.pdf> (accessed 30 August 2011).
- IIA. 2012. *CPD Profile*. <<http://www.iaiglobal.or.id/v02/ppl/pp1.php?id=6>> (accessed 1 September 2012).
- IICPA. 2012. *Directory 2012*. 27 January 2012 ed. IICPA. Jakarta: 1 August 2012.
- Jones, N. and G. Robinson. 1997. Do organizations manage continuing professional development? *Journal of Management Development* 16 (3): 197-207.
- Jones, S., and M. Forshaw. 2012. *Research methods in psychology*. Harlow: Pearson Prentice Hall.
- Knowles, M. S., E.F. Holton III, and R.A. Swanson. 2005. *The adult learner: The Definitive classic in adult education*

- and human resource development. San Diego: Elsevier, Inc.
- Kvale, S., and S. Brinkmann. 2009. *Interviews: Learning the craft of qualitative research interviewing*. Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc.
- Lindsay, H. 2012. Pattern of learning in the accountancy profession under an output-based continuing professional development scheme. *Accounting Education: An International Journal* 21 (6): 615-630.
- McCracken, G. 1988. *The Long interview*. Newbury Park: Sage Publications, Inc.
- Miles, M. B., A.M. Huberman, and J. Saldaña. 2014. *Qualitative data analysis: A Methods sourcebook*. 3rd ed. Thousand Oak: SAGE Publications, Inc .
- Paisey, C., and N.J. Paisey. 2004. An analysis of accounting education research in Accounting Education: an international journal – 1992–2001. *Accounting Education: an International Journal* 13 (1): 69-99.
- Paisey, C., N.J. Paisey, and H. Tarbert. 2007. Continuing professional development activities of UK accountants in public practice. *Accounting Education* 16 (4): 379-403.
- Pool, I., R. Poell, and O. T. Cate. 2013. Nurses' and managers' perceptions of continuing professional development for older and younger nurses: A Focus group study. *International Journal of Nursing Studies* 50 (1): 34-43.
- Royal Australian and New Zealand College of Obstetricians and Gynaecologists. 2011. *Continuing Professional Development for medical practitioners*. http://www.ranzcog.edu.au/leapframework/history_research.shtml. (accessed 1 August 2011).
- Rapkins, C. 1996. Best practice for Continuing professional development: Professional bodies facing the challenge, in *Continuing Professional Development: Issues in Design and Delivery*. ed. I Woodward. London: Cassell.
- Richards, L., and J. M. Morse. 2013. *Readme first for a user's guide to qualitative methods*, 3rd ed. Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc.
- Rothwell, A. and I. Herbert. 2007. Accounting professionals and CPD: Attitudes and engagement-some survey evidence. *Research in Post-Compulsory Education* 12 (1): 121-138.
- Ryan, F., M. Coughlan, and P. Cronin. 2009. Interviewing in qualitative research: the one-to-one interview. *International Journal of Therapy and Rehabilitation* 16 (6): 309-314.
- Saldaña, J. 2013. *The coding manual for qualitative researchers* 2nd ed. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Shank, G. D. 2002. *Qualitative research: A Personal skills approach*. Upper Saddle River: Pearson Education Inc.
- Sim, J. and A. Radloff. 2009. Profession and professionalisation in medical radiation science as an emergent profession. *Radiography* 15 (3): 203-208.
- Udin, N. M., N. A. A. Manaf, Z. Ishak, and R. AR. 2012. *KnowledgeManagement International Conference (KMICE)*, 4-6 July, 2012: *Tax professionals' views on Continuing Professional Development (CPD) programs*. Johor Baru: Malaysia. <http://www.kmice.cms.net.my/ProcKMICE/KMICE2012/PDF/CR178.pdf> (accessed 2 March 2014).
- Weiss, R. S. 1994. *Learning from strangers: The Art and method of qualitative interview studies*. New York: Free Press.
- Wood, D. E., and J. Anderson. 2003. Towards the learning profession: Identifying characteristics of successful Continuing Professional Development in schools. *Management in Education* 17 (21): 21-24.

KEPEMILIKAN KELUARGA, HUBUNGAN POLITIK DAN *FAMILY ALIGNED BOARD* TERHADAP IMPLEMENTASI TATA KELOLA PERUSAHAAN

Bayu Wirawan

Universitas Indonesia

Email: bayu.wirawan@gmail.com

Vera Diyanty

Universitas Indonesia

Email: vera.diyanty@ui.ac.id

Abstract

This research aims to investigate the effect of family-owned companies, family aligned board and political connection to the implementation of firm's corporate governance. It is argued that family owned companies selects a board based on family relationship to protect their interest and decides that the policy maximizes their wealth. This will affect the implementation of good corporate governance mechanism. The samples are non-financial companies for the year of 2012. The results demonstrate that family ownership has a positive effect to the family aligned board and has a negative effect to the implementation of good corporate governance. Furthermore, the political connection does not have a negative effect to the implementation of good corporate governance.

Keywords: *Family-owned companies, family aligned board, political connection, corporate governance.*

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dampak dari kepemilikan keluarga, family aligned board dan hubungan politik terhadap implementasi tata kelola perusahaan. Penelitian ini berpendapat bahwa perusahaan dengan kepemilikan keluarga memilih a board berdasarkan pada hubungan keluarga untuk melindungi niat mereka dan memutuskan kebijakan memaksimalkan kekayaan mereka. Hal ini akan mempengaruhi implementasi dari tata kelola perusahaan yang baik. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan non keuangan tahun 2012. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga memiliki pengaruh positif terhadap family aligned board dan memiliki hubungan negatif terhadap implementasi tata kelola perusahaan. Selanjutnya, hubungan politik tidak memiliki pengaruh negatif terhadap implementasi tata kelola perusahaan.

Kata kunci: Perusahaan kepemilikan keluarga, family aligned board, hubungan politik, tata kelola perusahaan

PENDAHULUAN

Pasca krisis finansial pada tahun 1997 dan skandal *fraud* Enron telah memicu bahwa penerapan tata kelola perusahaan menjadi salah satu perhatian dari para pelaku usaha dan regulator. Implementasi tata kelola perusahaan baik di sektor privat maupun publik di Indonesia menjadi hal penting di era reformasi. Penerapan tata kelola perusahaan yang

baik menjadi salah satu usaha meminimalkan dampak dari krisis keuangan yang terjadi serta terjadinya *fraud* di dalam perusahaan yang kemungkinan akan menurunkan nilai perusahaan.

Berdasarkan survei mengenai penerapan tata kelola perusahaan, Indonesia menempati urutan kedua terbawah hanya di atas Pakistan (Klapper dan Love 2004). Hasil

penilaian dari *Credit Lyonnais Securities Asia* (CLSA) pada tahun 2004 juga menunjukkan bahwa Indonesia memiliki skor yang buruk di dalam masalah penegakan hukum dan budaya tata kelola perusahaan (Kaihatu 2006). Hasil penilaian atas implementasi Good Corporate Governance (GCG) secara keseluruhan menggunakan ASEAN CG Scorecard (International Institute for Communication and Development 2013; 2014) menempatkan Indonesia di posisi kelima di ASEAN dengan nilai indeks 43,29 pada 2012 dan 54,55 pada 2013. Fakta ini menunjukkan bahwa penerapan tata kelola perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan sudah mengalami peningkatan tetapi masih memiliki kekurangan baik dari regulasi yang mengatur dan kepatuhan atas regulasi yang ada (Asian Development Bank 2014). Hasil penilaian tersebut juga menunjukkan bahwa banyak diantara perusahaan publik di Indonesia yang memperoleh penilaian negatif atas indeks tata kelola perusahaan terkait masalah transparansi dan tanggung jawab dewan komisaris. Hampir 20% perusahaan yang dinilai oleh IICD tidak mengungkapkan kapan penetapan komisaris independen dan juga banyak diantaranya yang telah menjabat lebih dari 9 tahun sehingga independensi komisaris menjadi diragukan. Selain itu kurang terbukanya proses penentuan komisaris tersebut. Padahal peran dan tanggung jawab dewan komisaris merupakan salah satu bagian penting untuk mendorong kualitas tata kelola perusahaan.

Permasalahan yang juga disoroti antara lain mengenai kepemilikan perusahaan, ada sebanyak 30% perusahaan yang dinilai memiliki mekanisme struktur kepemilikan piramida. Hal ini memicu terjadinya permasalahan keagenan yang lainnya yaitu ekspropriasi terhadap pemegang saham minoritas oleh pemegang saham pengendali/mayoritas (Diyanty 2012).

Banyak faktor yang mempengaruhi implementasi tata kelola perusahaan, misalkan penegakan hukum disuatu negara, struktur kepemilikan perusahaan dan juga hubungan politik perusahaan. Haque, Arun, dan Kirkpatrick (2011) melakukan penelitian di

Bangladesh mengenai pengaruh dari konsentrasi kepemilikan perusahaan yang dikendalikan keluarga dan hubungan politik perusahaan terhadap penerapan tata kelola perusahaan. Semakin terkonsentrasi kepemilikan keluarga di dalam perusahaan semakin besar pengaruh keluarga dalam memberikan keputusan untuk menempatkan anggota keluarganya sebagai direksi dan komisaris pada perusahaan yang dikendalikannya. Claessens, Djankov, dan Lang (2000) dan Arifin (2003) menemukan lebih dari 50% perusahaan di Indonesia dikendalikan oleh keluarga. Claessens, Djankov, dan Lang (2000) menyatakan bahwa grup bisnis yang dikendalikan oleh keluarga melalui struktur kepemilikan piramid cenderung melakukan ekspropriasi terhadap pemegang saham non pengendali. Menurut Haggard, Taylor-Clarke, dan Kennett (2003) masalah *entrenchment* juga dapat terjadi apabila keluarga selaku pendiri perusahaan (*founder's family*) memiliki kepemilikan saham yang kecil pada perusahaan induk, namun memiliki hak kendali yang cukup besar sehingga dapat melakukan kendali terhadap anak perusahaan melalui kepemilikan sahamnya. Anggota keluarga dari *founder's family* yang menduduki posisi sebagai pimpinan puncak memiliki hak kendali sehingga tidak mudah dikenakan sanksi disiplin, berbeda dengan manajer profesional tanpa kepemilikan saham yang signifikan. Hal ini menyebabkan praktik tata kelola cenderung tidak dapat berjalan dengan baik dan kebijakan perusahaan yang diambil lebih cenderung mementingkan kepentingan pengendali perusahaan yaitu keluarga.

Berdasarkan penelitian Claessens, Djankov, dan Lang (2000), Arifin (2003) ditemukan bahwa lebih dari 50% struktur kepemilikan perusahaan di Indonesia didominasi oleh kepemilikan dari keluarga dan/atau afiliasinya. Struktur kepemilikan keluarga di Indonesia pada tahun 1996, hampir dua per tiga perusahaan terbuka di Indonesia dimiliki oleh keluarga Claessens, Djankov, dan Lang (2000). Proporsi kepemilikan keluarga yang besar mendorong penetapan manajemen yang memiliki relasi dengan keluarga baik oleh pemegang saham pengendali melalui meka-

nisme pemungutan yang didominasi oleh suara pemegang saham pengendali. Kecenderungan dari unsur keluarga untuk mempertahankan status *quo*-nya dapat menjadi penyebab penerapan tata kelola perusahaan yang tidak baik agar keuntungan sebagai pemegang saham mayoritas atas pemegang saham minoritas dapat tetap dipertahankan, bahkan tidak hanya melalui manajemen saja melainkan menggunakan juga dewan komisaris yang terafiliasi dengan keluarga (Haque, Arun, & Kirkpatrick 2011).

Selain oleh faktor keluarga, status *quo* untuk tidak melakukan praktik tata kelola perusahaan dengan baik juga didorong oleh unsur politik (Haque, Arun, & Kirkpatrick 2011). Unsur politik dalam konteks ini seperti argumen dari Vermonte (2012) mengenai timbulnya hubungan timbal balik antara partai politik dengan perusahaan atau individu bermodal besar. Hubungan tersebut bermula dari pendanaan yang dibutuhkan dari partai politik perlu disokong dari dunia usaha dengan imbalan yang dapat berupa tender proyek pemerintah, peraturan pemerintah, penegakan peraturan yang berlaku, atau kebijakan pemerintah yang memudahkan bagi bisnis tertentu.

Hubungan politik perusahaan memiliki berbagai macam pengaruh terhadap perusahaan tersebut. Fisman (2001) melakukan penelitian mengenai nilai dari kedekatan politik yang dimiliki perusahaan dengan penguasa. Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa harga saham dari perusahaan yang memiliki tingkat ketergantungan terhadap Soeharto (*Soeharto Dependency Index*) jatuh lebih signifikan ketika ada isu Soeharto akan meninggalkan posisi Presiden. Pengaruh hubungan politik dengan nilai perusahaan juga terdapat dalam kasus di Amerika Serikat. Perusahaan yang memiliki hubungan politik dengan partai penguasa memiliki nilai lebih tinggi (Goldman, Rocholl, dan So 2009). Perusahaan yang memiliki hubungan politik memiliki tingkat *leverage* yang lebih tinggi, biaya terkait *financial distress* lebih sedikit, dan kualitas pelaporan akuntansi yang rendah (Faccio 2007). Studi lain mengenai hubungan

politik di Indonesia dilakukan oleh Susilo (2013) yang menemukan bahwa perusahaan yang memiliki hubungan politik memiliki biaya ekuitas yang lebih rendah dan biaya utang yang lebih tinggi.

Pengaruh dari hubungan politik perusahaan tidak hanya pada performa finansialnya saja melainkan juga berpengaruh pada praktek penerapan tata kelola perusahaan. Menurut Micco, Panizza, dan Yanez (2007) ada kemungkinan pelaporan keuangan perusahaan yang memiliki hubungan politik menyesuaikan laporan keuangannya dengan kepentingan pemegang saham pengendali sehingga mengorbankan kepentingan pemegang saham lainnya. Menurut Bebchuck dan Neeman (2005), politisi dalam hal ini pemerintah memiliki andil di dalam penentuan tingkat perlindungan investormelalui peraturan, kebijakan, dan penerapannya sehingga pihak-pihak yang berkepentingan seperti insider perusahaan, pemegang saham institusional, dan pengusaha akan berusaha untuk melobi politisi agar memperoleh tingkat perlindungan yang sesuai. Kelompok insider perusahaan dapat menggunakan aset dari perusahaan untuk menanggung biaya melobi politisi, sedangkan kelompok kepentingan lain perlu menanggung biaya melobi secara langsung.

Dalam perusahaan yang didominasi kepemilikan keluarga, peran insider dalam perusahaan merupakan bagian dari peran keluarga yang memiliki kendali atas perusahaan tersebut. Kondisi ini pada akhirnya mengakibatkan perlindungan investor dapat menjadi lebih menguntungkan bagi pihak *insider* dengan mengambil keuntungan bagi pihaknya sendiri atas pemegang saham minoritas.

Hal ini juga didukung oleh penelitian Boubakri, Cosset, dan Saffar (2008) yang menyatakan bahwa pemerintah juga memfasilitasi perubahan kebijakan publik yang menguntungkan perusahaan yang memiliki hubungan politik. Haque, Arun, dan Kirkpatrick (2011) menunjukkan bahwa pemilik perusahaan menggunakan aset perusahaan untuk kepentingan melobi politisi agar peraturan mengenai tata kelola perusahaan dan penega-

kannya menguntungkan bagi pengusaha tersebut ditambah dengan kondisi Bangladesh yang merupakan negara berkembang yang memiliki tingkat korupsi yang tinggi. Haque, Arun, dan Kirkpatrick (2011) menyimpulkan bahwa perusahaan yang memiliki hubungan politik memiliki penerapan tata kelola perusahaan yang lebih buruk. Dengan mengacu pada penelitian Haque, Arun, dan Kirkpatrick (2011), penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah dominasi dari kepemilikan keluarga, dan hubungan politik berpengaruh pada penerapan dan praktik tata kelola perusahaan serta pemilihan anggota direksi dan komisaris di Indonesia. Penelitian ini penting dilakukan di Indonesia, mengingat 50% lebih struktur kepemilikan dikendalikan oleh keluarga (Diyanty 2012). Indonesia juga memiliki rekam jejak mengenai hubungan antara perusahaan dan politisi yang kuat mulai pada era Presiden Soeharto (Fisman 2001), dan masih terus berlanjut hingga pasca reformasi (Carney dan Child 2013) serta korupsi tetap menjadi salah satu permasalahan utama hingga sekarang¹. Dengan demikian isu mengenai hubungan politik perusahaan dengan tata kelola perusahaan juga menarik untuk diteliti lebih lanjut.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori Keagenan dan Kepemilikan Keluarga

Permasalahan keagenan tidak hanya terjadi antara pemegang saham dengan manajemen, melainkan di perusahaan yang kepemilikannya dapat juga terjadi antara pemilik saham mayoritas dan manajemen dengan pemegang saham minoritas (Villalonga dan Amit 2006).

Salah satu kelemahan praktik tata kelola di Indonesia terkait dengan minimnya pengungkapan mengenai kepemilikan tidak langsung di dalam perusahaan, selain itu juga masih banyak yang belum mengungkapkan anggota dewan direksi atau komisaris yang

menjabat di tempat lain, dan minimnya pengungkapan mengenai proses nominasi di jajaran dewan komisaris atau direksi. Kelemahan-kelemahan tersebut dapat disebabkan dengan struktur kepemilikan yang secara langsung akan mempengaruhi siapa pengendali dari perusahaan tersebut.

Secara umum struktur kepemilikan dari perusahaan-perusahaan di Asia masih banyak didominasi oleh unsur kekeluargaan (Classen, Djankov, dan Lang 2000). Classen, Djankov, dan Lang (2000) melakukan penelitian di negara-negara Asia Selatan yang menunjukkan bahwa sulit untuk membedakan batasan antara pemilik perusahaan dengan pengelola perusahaan sebagai manajemen, banyak diantaranya dijalankan oleh anggota keluarga pemilik. Di Indonesia sendiri masih didominasi oleh perusahaan keluarga, perusahaan yang struktur kepemilikannya sudah tersebar hanya sebesar 0,6% (Classen, Djankov, dan Lang 2000). Carney dan Child (2013) melakukan penelitian kembali mengenai perkembangan struktur kepemilikan di Asia Selatan. Indonesia mengalami sedikit peningkatan di dalam perusahaan yang kepemilikannya tersebar menjadi 3,8% dan penurunan kepemilikan keluarga di perusahaan terbuka sebesar 11,3% dari survey Classen, Djankov, dan Lang (2003) yaitu dari 68,6% menjadi 57,3% (Carney dan Child 2013).

Perusahaan dengan dominasi kepemilikan keluarga dapat memiliki kinerja yang lebih efisien dikarenakan biaya untuk melakukan pengawasan yang lebih kecil (Fama dan Jensen, 1983). Biaya pengawasan lebih kecil disebabkan karena kepemilikannya yang terkonsentrasi sehingga konflik yang terjadi lebih sedikit dibandingkan dengan perusahaan dengan kepemilikan tersebar. Di samping itu perusahaan dengan kepemilikan keluarga yang dominan dikelola oleh anggota keluarganya sendiri sehingga dapat lebih dipercaya, sehingga konflik keagenan menjadi berkurang (Fama dan Jensen 1983).

Di sisi lain permasalahan keagenan yang timbul bukan lagi antara pemilik dan manajemen, melainkan pemegang saham minoritas dengan pemilik keluarga, termasuk

¹Berdasarkan survey dari Transparency International pada tahun 2013, indek persepsi korupsi Indonesia berada pada peringkat 114 dari 177 negara dengan nilai 32 dari 100 (100 dipersiapkan paling bersih) (Transparecny International, 2013).

manajemen yang berasal dari keluarga. Pemegang saham mayoritas, dalam hal ini keluarga, memiliki kecenderungan untuk mempertahankan dominasinya di dalam perusahaan, melalui manajemennya dan juga pembatasan praktik GCG (Classen, Djankov, dan Lang 2000). Pembatasan praktik GCG pada akhirnya membatasi perlindungan terhadap pemegang saham minoritas, bertentangan dengan prinsip tata kelola perusahaan untuk perlakuan yang setara terhadap pemegang saham. Sehingga akhirnya konflik kepentingan ini berujung pada ekspropriasi oleh pemegang saham keluarga terhadap pemegang saham minoritas, dengan praktik tata kelola perusahaan yang tidak cukup baik (Faccio, Lang, dan Young 2001).

Hubungan Politik Perusahaan

Perusahaan dapat dikatakan memiliki hubungan politik apabila paling tidak salah satu dari pimpinan perusahaan, pemegang saham mayoritas atau kerabat mereka pernah atau sedang menjabat sebagai pejabat tinggi negara, anggota parlemen, atau pengurus partai yang berkuasa (Faccio 2006).

Penelitian awal mengenai hubungan politik ialah mengenai hubungan kedekatan antara perusahaan dengan penguasa, salah satunya ialah oleh Fisman (2001) yang meneliti tentang nilai dari koneksi politik. Dalam penelitian tersebut subjek penelitiannya ialah perusahaan terbuka di Indonesia pada masa Suharto yang memiliki kedekatan politik dengan Suharto kala itu. Penelitian tersebut menunjukkan adanya pengaruh terhadap volatilitas harga saham perusahaan yang memiliki kedekatan politik ketika ada isu yang menggoyang Presiden Suharto. Carney dan Child (2013) menyatakan bahwa hubungan politik perusahaan dengan kroni Suharto telah menurun semenjak reformasi, hubungan politik perusahaan di Indonesia pada tahun 2008 pun turun sampai 51% (dari tahun 1996). Contoh lain mengenai pengaruh hubungan politik antara perusahaan dengan partai penguasa juga tercermin di Amerika, perusahaan dengan hubungan politik memiliki nilai perusahaan yang lebih tinggi (Goldman, Rocholl, dan So 2009)

Pengaruh lain dari hubungan politik perusahaan ialah dapat meningkatkan nilai perusahaan jika melalui koneksi politik dapat menghapus rente ekonomi yang tidak adil. Hal ini perlu juga didukung dengan tata kelola yang baik agar nilai perusahaan tidak hanya diperuntukkan kepentingan pemilik dan politisi yang memiliki hubungan saja. Jika indikator hubungan politik juga menjadi penentu investasi maka dengan adanya hubungan politik nilai perusahaan juga akan meningkat (Faccio 2006). Hubungan politik perusahaan juga dapat menjadi substitusi atas pembiayaan dari luar negeri, dan dapat dimanfaatkan untuk mempermudah perusahaan dalam memperoleh pinjaman dalam negeri sehingga tidak perlu mencari pembiayaan dari investor luar negeri. Bagi perusahaan yang memiliki hubungan politik keuntungan lainnya ialah perusahaan dengan hubungan politik memiliki akses yang lebih terhadap pembiayaan hutang, pajak yang lebih rendah, dan kekuatan pasar yang kuat (Leuz dan Gee 2006).

Di Indonesia penelitian mengenai hubungan politik perusahaan dimulai pada era Suharto oleh Fisman (2001) yang menghasilkan bahwa ada pengaruh dari kedekatan politik perusahaan dengan penguasa terhadap harga saham perusahaan. Penelitian lain di Indonesia terkait dengan hubungan politik perusahaan ialah oleh Wulandari (2012) yang membahas mengenai pengaruh koneksi politik dan struktur kepemilikan terhadap kinerja perusahaan. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa perusahaan yang memiliki hubungan politik memiliki kinerja yang lebih buruk dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki hubungan politik.

Purwoto (2011) juga melakukan penelitian atas hubungan politik dan keburaman laporan keuangan dengan kesinkronan dan risiko *crash* harga saham. Proksi untuk hubungan politik menggunakan tiga pendekatan yaitu anggota dewan komisaris dan direksi yang pernah atau sedang menjabat di pemerintahan, *CAR* (*cumulative abnormal return*) ketika ada peristiwa politik, dan juga pinjaman dari bank pemerintah. Hasilnya ialah hubungan politik akan memiliki dampak ter-

hadap ketersediaan informasi spesifik terhadap perusahaan tersebut, perusahaan cenderung mengaburkan informasi spesifik melalui pelaporan yang kurang berkualitas.

Haque, Arun, dan Kirkpatrick (2011), dalam penelitiannya di Bangladesh sebagai salah satu negara berkembang menemukan bahwa pengusaha atau pemegang saham pengendali atau keluarga memiliki kepentingan ekonominya dan memanfaatkan proses politik untuk kepentingan ekonominya tersebut. Pemegang saham pengendali memanfaatkan celah pada sistem politik di negara berkembang yang banyak mengaitkan hubungan kroni dan tingkat korupsi yang masih tinggi untuk kepentingan ekonomi dirinya dan perusahaannya. Selain itu dengan hak pengendaliannya terhadap perusahaannya yang sangat kuat dari pemegang saham pengendali dan tidak adanya penegakan aturan ketat atas praktek tata kelola yang baik sehingga berdampak pada implementasi tata kelola perusahaan yang buruk. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Haque, Arun, dan Kirkpatrick (2011), menjelaskan adanya pengaruh negatif dari kepemilikan yang terkonsentrasi, susunan direksi yang terkoneksi dengan keluarga, serta hubungan politik dari perusahaan terhadap kualitas dari tata kelola perusahaannya.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh dari Kepemilikan Keluarga terhadap Komposisi Dewan Direksi dan Dewan Komisaris yang Terafiliasi dengan Keluarga

Menurut Haque, Arun, dan Kirkpatrick (2011), jika pemegang saham pengendali adalah keluarga, maka keluarga cenderung memiliki insentif dan kekuatan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri dalam bentuk kompensasi yang berlebih, transaksi hubungan istimewa, atau dividen di dalam bentuk pengeluaran perusahaan untuk kepentingan pribadi. Hasil penelitiannya memperkuat hasil penelitian Fama dan Jensen (1983), Shleifer dan Vishny (1997), dan Faccio, Lang, dan Young (2001).

Haque, Arun, dan Kirkpatrick (2011) menyatakan bahwa perusahaan yang didominasi oleh kepemilikan keluarga secara langsung akan memberikan pengaruhnya di dalam

manajemen perusahaan tersebut. Claessens *et al.* (2002) menyatakan bahwa sebanyak 84,6% manajer perusahaan di Indonesia ditetapkan oleh pengendali akhir. Dengan cara itu juga perusahaan lebih berpeluang untuk memanfaatkan kontrolnya dalam mengekspropriasi pemegang saham minoritas melalui manajemen yang mereka pilih.

Anderson dan Reeb (2005) menyatakan bahwa terdapat kecenderungan perusahaan keluarga akan menghindari adanya dewan komisaris yang berasal dari kalangan independen untuk menjaga kepentingan keluarga sebagai pemegang kendali. Kepemilikan terkonsentrasi pada keluarga diduga memiliki pengaruh terhadap pengendalian dalam proses politik untuk penentuan dewan komisaris dan dewan direksi. Hal ini dilakukan untuk melindungi kepentingan dari keluarga pemegang saham pengendali

Berdasarkan argumen tersebut maka dapat dihipotesiskan berikut:

H1: Kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap komposisi dewan komisaris dan direksi yang terafiliasi dengan keluarga di dalam perusahaan.

Pengaruh Kepemilikan Keluarga dan Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi terhadap Implementasi Tata Kelola Perusahaan

Haque, Arun, dan Kirkpatrick (2011) menunjukkan adanya pengaruh negatif dari struktur kepemilikan dan proses politik penentuan dewan komisaris dan direksi terhadap penerapan tata kelola perusahaan di Bangladesh. Semakin banyak direksi dan komisaris yang terafiliasi dengan keluarga maka keputusan yang diambilpun akan semakin menguntungkan pemegang saham pengendali dan merugikan pemegang saham.

Siagian (2011) membuktikan bahwa di Indonesia secara empiris tingkat kepemilikan keluarga memiliki pengaruh negatif terhadap penerapan tata kelola perusahaan karena menghindari tata kelola yang cenderung mengurangi kontrol dari pemegang saham pengendali. Dengan demikian hipotesis kedua adalah:

H2: Kepemilikan keluarga serta komposisi dewan komisaris dan direksi terafiliasi

keluarga berpengaruh negatif terhadap penerapan tata kelola perusahaan.

Pengaruh dari Hubungan Politik Perusahaan terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Vermonte (2012) menyatakan bahwa pendanaan dari partai politik di Indonesia tidak cukup hanya dari iuran anggota partainya, partai juga memerlukan sumber pendanaan lain dari sumbangan perusahaan atau individu yang tak jarang turut melibatkan perjanjian transaksional. Bentuk timbal balik terhadap pemberi dana dapat berupa lobi politik, tender proyek, atau kebijakan yang menguntungkan bagi perusahaan atau individu terkait. Dasar pemikiran ini juga yang membuat perusahaan berusaha melakukan lobi politik untuk mempertahankan status quo di dalam kebijakan terkait tata kelola perusahaan agar tetap mendapatkan kontrol atas pemegang saham minoritas.

Micco, Panizza, dan Yanet (2007) menyatakan bahwa perusahaan dengan hubungan politik memiliki kemungkinan untuk melakukan penyesuaian di dalam pelaporan keuangan untuk kepentingan pemegang saham pengendali sehingga mengorbankan pemegang saham minoritas. Penelitian dari Bebchuk dan Neeman (2005) menunjukkan bahwa transaksi *insider* di dalam perusahaan yang kepemilikannya terkonsentrasi di keluarga menggunakan aset dari perusahaan untuk kepentingan pribadi, salah satu penggunaan aset perusahaan ialah untuk mempengaruhi politisi dan birokrat untuk tetap menjaga perlindungan investor yang rendah. Dengan perlindungan investor yang tetap rendah maka pemegang saham pengendali akan dapat terus memanfaatkan pemegang saham minoritas melalui ekspropriasi.

Selain melalui perlindungan investor yang lemah, penerapan tata kelola juga dipengaruhi oleh transparansi dari perusahaan yang terkoneksi politik. Leuz dan Gee (2006) memiliki argumen bahwa koneksi politik dapat menjadi substitusi bagi pinjaman dari luar negeri. Perusahaan terkoneksi politik dapat memperoleh akses pembiayaan hutang (Amelia 2013). Menurut Leuz dan Gee (2006) efek substitusi ini membuat tingkat transparansi dari perusahaan akan lebih buruk

akibat dari tidak perlunya mengikuti keperluan pelaporan dan transparansi sesuai dengan standar pembiayaan dari luar negeri. Perusahaan terkoneksi politik akan membiarkan transparansi seadanya dan mendapatkan pembiayaan hutang akibat koneksi politik yang dimilikinya.

Perusahaan yang terkoneksi politik akan memanfaatkan kontrol yang dimilikinya untuk melakukan lobi politik agar standar, aturan, dan penegakan atas tata kelola perusahaan tetap di posisi status quo, posisi tidak maksimal (Haq, Arun, dan Kirkpatrick 2011). Selain itu perusahaan yang memiliki koneksi politik, tingkat transparansinya akan menjadi lebih rendah karena transparansi tidak dinilai menjadi sebuah nilai tambah akibat telah mendapat akses pembiayaan dari koneksi politiknya (Leuz dan Gee 2006). Berdasar uraian di atas dirumuskan hipotesis ketiga berikut:

H3: Hubungan politik perusahaan berpengaruh negatif terhadap penerapan tata kelola perusahaan.

METODA PENELITIAN

Data dan Sampel

Dalam penelitian ini data yang digunakan ialah data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2011, data untuk indeks penilaian tata kelola perusahaan dari IICD serta status hubungan politik dari proses penelusuran pada google.com. Sampel penelitian menggunakan perusahaan non-finansial dari 100 perusahaan yang tercatat di bursa pada tahun 2012 dengan kapitalisasi pasar terbesar dan memiliki informasi yang lengkap di dalam laporan tahunannya. Alasan pemilihan sampel ini ialah karena indeks terakhir penilaian CG oleh IICD yang dapat diperoleh dari IICD adalah indeks tahun 2012. Penulis tidak mengambil sampel penelitian sebelum tahun 2012, dikarenakan pengukuran indeks dilakukan dengan pendekatan yang berbeda bukan dengan Asean Score Card yang menjadi dasar pengukuran indeks 2012. Tabel 1 berikut menyajikan hasil pemilihan sampel penelitian.

Tabel 1: Hasil Seleksi Pemilihan Sampel

Kriteria Seleksi	Jumlah
Perusahaan yang memiliki Indeks ASEAN CG Scorecard dari IICD	100
Perusahaan di dalam sektor keuangan	(24)
Perusahaan Non-finansial	76
(Seluruh perusahaan memiliki data yang lengkap)	
Total Sampel	76

Operasionalisasi Variabel

Variabel Dependen

Terdapat dua variabel dependen dari penelitian ini. Variabel dependen pertama ialah *family aligned board* atau anggota dewan komisaris dan direksi perusahaan yang terafiliasi dengan keluarga dari pemegang saham pengendali. Variabel ini merupakan proksi dari adanya pengaruh terhadap proses politik di dalam pengambilan keputusan oleh dewan (Haque, Arun, dan Kirkpatrick 2011). Pengukuran variabel ini menggunakan persentase dari anggota dewan direksi dan komisaris yang memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali terhadap jumlah keseluruhan dari anggota dewan, baik anggota dewan direksi ataupun dewan komisaris.

Variabel dependen kedua ialah penerapan tata kelola perusahaan. Penerapan tata kelola perusahaan ini dinilai menggunakan Indeks IICD tahun 2012 berdasarkan proksi ASEAN CG Scorecard. Penilaian melalui *scorecard* menurut ACMF (2011) ini dibagi kedalam dua tingkatan yaitu:

Level 1

Tingkatan pertama terdiri atas 185 poin pertanyaan yang dibagi ke dalam lima bagian sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan menurut OECD. Setiap poin pertanyaan ini memiliki nilai satu apabila pengungkapan perusahaan telah memenuhi secara lengkap dan jelas atas poin pertanyaan tersebut. Kelima prinsip OECD tersebut memiliki poin pertanyaannya masing-masing, yaitu 26 untuk prinsip hak pemegang saham, 17 untuk prinsip perlakuan yang setara, 21 untuk prinsip peran dari *stakeholders*, 41 untuk prinsip pengungkapan dan transparansi, 79 untuk prinsip tanggung jawab dewan direksi dan komisaris (total 185 poin).

Level 2

Tingkatan kedua bersifat tambahan mengenai bonus dan juga penalti atas praktik tata kelola perusahaan. Sebanyak 11 poin pertanyaan tentang bonus diberikan pada perusahaan yang menjalankan praktik tata kelola melebihi standar minimum. Sebanyak 23 poin pertanyaan tentang penalti diberikan pada perusahaan yang menjalankan praktik tata kelola perusahaan dengan buruk. Atas kedua kriteria penilaian inilah didapatkan hasil penilaian dari praktik tata kelola perusahaan terbuka di ASEAN. Informasi yang digunakan sebagai acuan untuk melakukan penilaian ini diperoleh dari informasi yang dapat diakses oleh publik dalam Bahasa Inggris. Informasi tersebut mulai dari laporan tahunan yang diterbitkan perusahaan terbuka, laporan keberlanjutan, halaman web perusahaan, artikel perusahaan dan lainnya (ACMF 2011).

Variabel Independen

Terdapat 3 variabel independen utama yang diuji di dalam penelitian ini. Tiap model hipotesis menggunakan variabel independen yang berbeda, penjelasannya adalah sebagai berikut: (1) Kepemilikan keluarga. Kepemilikan keluarga ialah persentase saham dari perusahaan yang dimiliki oleh keluarga. Definisi keluarga yang digunakan di dalam penelitian ini sesuai dengan definisi yang digunakan di dalam La Porta, Silanes, dan Shleifer (1999). Keluarga merupakan keseluruhan individu dan perusahaan yang kepemilikannya tercatat (kepemilikan 5% ke atas wajib dicatat), kecuali perusahaan publik, negara, institusi keuangan (lembaga investasi, reksa dana, asuransi, bank, atau dana pensiun) dan publik (yang kepemilikannya tidak wajib dicatat). (2) *Family-aligned board*. *Family-aligned board* adalah persentase dewan direksi

dan/atau komisaris yang memiliki hubungan dengan keluarga pemegang saham pengendali. *Family-aligned executive* adalah direktur utama atau *CEO* perusahaan merupakan bagian atau memiliki hubungan dengan keluarga pemegang saham. Variabel ini bersifat *dummy*, akan bernilai 1 bila direktur utama perusahaan memiliki hubungan atau bagian dari keluarga pemegang saham. (3) *Hubungan politik perusahaan*, perusahaan dikatakan memiliki hubungan politik jika paling tidak salah satu dari pimpinan perusahaan (dewan komisaris atau dewan direksi), pemegang saham mayoritas atau kerabat mereka pernah atau sedang menjabat sebagai pejabat tinggi negara, anggota parlemen atau dekat dengan politisi atau partai (Faccio, Lang, dan Young 2001). Variabel ini bersifat *dummy*, bernilai 1 bila perusahaan memiliki hubungan politik. Kriteria yang digunakan untuk menentukan memiliki hubungan politik mengacu pada penelitian Faccio (2006) yaitu: 1) Dewan direksi dan/atau dewan komisaris rangkap jabatan sebagai pejabat pemerintah. 2) Dewan direksi dan/atau komisaris merupakan mantan pejabat pemerintah. 3) Pemilik perusahaan atau pemegang saham merupakan politisi, pejabat pemerintah, atau mantan pejabat pemerintah. 4) Pemilik perusahaan atau pemegang saham memiliki hubungan kedekatan dengan politisi/partai politik, pejabat pemerintah, atau mantan pejabat pemerintah.

Variabel Kontrol

Variabel kontrol dalam penelitian ini ditetapkan berdasarkan penelitian Haque, Arun, dan Kirkpatrick (2011) yaitu ukuran perusahaan, komposisi aset perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan usia perusahaan.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi berganda dengan menggunakan model dalam penelitian Haque, Arun, dan Kirkpatrick (2011).

Model penelitian untuk menguji hipotesis 1 (**H1**) ialah sebagai berikut:

$$FAB = \alpha + \beta_1(FOWN) + \beta_2(SIZE) + \beta_3(CASS) + \beta_4(PROF) + \beta_5(LEV) + \beta_6(AGE) + \beta_7(INDS\ dummies) + \varepsilon$$

Model penelitian untuk menguji hipotesis kedua (**H2**) ialah sebagai berikut:

$$CGI = \alpha + \beta_1(FAB) + \beta_2(FEXC) + \beta_3(FOWN) + \beta_4(SIZE) + \beta_5(CASS) + \beta_6(PROF) + \beta_7(LEV) + \beta_8(AGE) + \beta_9(INDS\ dummies) + \varepsilon$$

Model penelitian untuk menguji hipotesis ketiga (**H3**) ialah sebagai berikut:

$$CGI = \alpha + \beta_1(PCON) + \beta_2(SIZE) + \beta_3(CASS) + \beta_4(PROF) + \beta_5(LEV) + \beta_6(AGE) + \beta_7(INDS\ dummies) + \varepsilon$$

Keterangan Variabel:

FAB : *Family-aligned Board* atau anggota dewan komisaris dan direksi yang terafiliasi dengan keluarga pemilik saham. Persentase jumlah anggota dewan komisaris dan direksi yang memiliki hubungan keluarga.

CGI : Penilaian tata kelola perusahaan menggunakan *CG scorecard*.

FEXC : Variabel *dummy* untuk ketua dewan direksi berasal dari keluarga pemegang saham pengendali.

PCON : Hubungan politik perusahaan, paling tidak pemegang saham pengendali, anggota dewan baik dewan direksi atau dewan komisaris pernah atau sedang menjabat sebagai pejabat tinggi negara atau politisi.

FOWN: Persentase kepemilikan keluarga, termasuk anak dan saudara dari pemilik.

SIZE : Ukuran perusahaan yang dilihat dari logaritma natural dari total aset perusahaan.

CASS : Komposisi dari aset perusahaan, perbandingan antara aset tetap dan total aset.

LEV : *Leverage*, perbandingan antara total utang dan total aset.

INDSdummies variabel *dummy* yang menyatakan sektor industri perusahaan tersebut berdasarkan indeks sektor menurut BEI.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif disajikan pada tabel 2. Dari tabel ini dapat dilihat bahwa rata-rata kualitas penerapan tata kelola perusahaan berdasarkan ASEAN CG Scorecard pada perusahaan non-finansial di Indonesia ialah 40,27 dan nilai tengah dari indeks tata kelola ialah 36,59 dari skor maksimal 100. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari 50 persen dari sampel penelitian yang merupakan perusahaan dengan tingkat kapitalisasi pasar 100 terbaik, penerapan tata kelola di Indonesia masih dibawah nilai 40. Dengan demikian terlihat bahwa implementasi praktek CG di Indonesia secara keseluruhan masih rendah.

Variabel hubungan politik menunjukkan bahwa dari 76 sampel perusahaan, sebanyak 25 perusahaan atau 32,89% memiliki hubungan politik. Hubungan tersebut berasal bukan hanya dari adanya bekas pejabat negara di dalam dewan komisaris atau dewan direksi, namun juga dari hubungan kedekatan pemilik perusahaan dengan politisi. Variabel FOWN mempunyai nilai rata-rata sebesar 0,4456 dan median 0,5361. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari 50% persentase kepemilikan merupakan persentasi kepemilikan keluarga. Bahkan ada perusahaan yang kepemilikan saham

oleh keluarga mencapai nilai maksimum berada 0,9815. Hal ini menunjukkan sampel perusahaan masih didominasi kepemilikan keluarga walaupun cukup bervariasi persentasi kepemilikannya. Terdapat 25 perusahaan yang memiliki hubungan politik dan secara umum memiliki perbedaan karakteristik dengan perusahaan yang tidak memiliki hubungan politik. Secara rata-rata CGI perusahaan yang memiliki koneksi politik mempunyai indeks 39,16 sedangkan perusahaan yang tidak memiliki hubungan politik memiliki rata-rata indeks 42,52. Perusahaan yang memiliki hubungan politik juga memiliki rata-rata kepemilikan keluarga yang lebih besar yaitu 45,56% dibandingkan dengan perusahaan tanpa hubungan politik yaitu 42,72%. Dari komposisi anggota dewan direksi dan komisaris yang terafiliasi dengan keluarga pemilik, perusahaan dengan hubungan politik memiliki rata-rata lebih besar yaitu 14,52% dibandingkan yang tidak memiliki hubungan politik yaitu sebesar 11,96%. Untuk pemimpin eksekutif yang memiliki relasi dengan keluarga pemilik, terdapat 26,32% pada perusahaan yang memiliki hubungan politik dan 28% pada perusahaan yang tidak memiliki hubungan politik.

Tabel 2: Statistik Deskriptif

Variabel	Mean	Median	Std.Dev.	Min	Max
CGI	0,4027	0,3659	0,1237	0,2081	0,7536
PCON	0,3289		0,4730	0,0000	1,0000
FOWN	0,4456	0,5361	0,3181	0,0000	0,9815
FAB	0,1367	0,1111	0,1412	0,0000	0,5000
FEXC	0,2632		0,4433	0,0000	1,0000
SIZE	29,9352	29,9974	1,0497	27,5211	32,6700
CASS	0,3679	0,3323	0,2227	0,0086	0,8704
PROF	0,1150	0,0927	0,1012	-0,1081	0,4155
LEV	0,5035	0,5012	0,2695	0,1347	2,1156
AGE	1,9488	2,4301	1,2055	-1,7918	3,4012

Keterangan: CGI = indeks ASEAN CG scorecard; PCON = variabel dummy hubungan politik perusahaan (1 bila ada hubungan politik); FOWN = proporsi kepemilikan keluarga; FAB = proporsi anggota dewan komisaris dan direksi yang terafiliasi dengan keluarga; FEXC = variabel dummy ketua dewan direksi yang berasal dari keluarga pengendali (1 bila ketua dewan direksi berasal dari keluarga pengendali); SIZE = log natural dari total asset; CASS = proporsi aset tetap dari total asse; PROF = return on asset; LEV = tingkat leverage (total liabilities/total asset); AGE = log natural dari tanggal tercatat dalam bursa.

Analisis Hasil Regresi

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis dengan regresi berganda terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik sehingga data telah mencapai kriteria *BLUE*. Hasil Analisis regresi model 1, model 2 dan model 3 disajikan berturut-turut pada table 3, 4 dan 5.

Analisis Hasil Regresi Model Hipotesis 1

Hasil regresi menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap komposisi dewan komisaris dan dewan direksi yang terafiliasi dengan keluarga. Hasil penelitian ini sesuai dengan argumen dari Anderson dan Reeb (2004) yang menyatakan bahwa perusahaan yang didominasi keluarga akan memiliki kecenderungan untuk menghindari pihak inde-

penden dan memilih direksi dan komisaris yang memiliki hubungan dengan keluarga.

Pagano dan Volpin (2005) menjelaskan hal ini terjadi karena keluarga sebagai pemegang saham pengendali akan memanfaatkan kendalinya untuk menetapkan direksi dan komisaris yang sejalan dengan mereka sehingga keuntungan atas pemegang saham minoritas dapat dimanfaatkan oleh pemegang saham pengendali, dalam hal ini ialah keluarga. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian Haque, Arun, dan Kirkpatrick (2011) yang menyatakan bahwa variabel kepemilikan keluarga berperan signifikan dan positif terhadap pemilihan komposisi dewan direksi dan dewan komisaris yang terafiliasi dengan keluarga.

Tabel 3: Hasil Regresi (Robust) Model Hipotesis 1

$$FAB = ? + ?1(FOWN) + ?2(SIZE) + ?3(CASS) + ?4(PROF) + ?5(LEV) + ?6(AGE) + ?7(INDS dummies) + ?$$

H1: Kepemilikan keluarga memiliki pengaruh positif terhadap komposisi dewan komisaris dan direksi yang terafiliasin dengan keluarga di dalam

Variabel Dependen

FAB

Variabel	Ekspektasi	1		2		Sig
		Coeff.	Prob. T	Sig. Coeff.	Prob. T	
C		-0,9088	0,0510*	-0,2119	0,6050	
FOWN	+	0,2760	0,0000***	0,2768	0,0000***	
SIZE	?	0,0320	0,0580*	0,0105	0,4410	
CASS	?	0,0422	0,6190	-0,0330	0,5590	
PROF	?	0,1322	0,3310	-0,0400	0,7580	
LEV	?	-0,1531	0,0010***	-0,1273	0,0030***	
AGE	?	-0,0151	0,1920	-0,0039	0,7460	
INDS Dummy		Ya		Tidak		
F-Statistic		8,79***		16,45***		
R-square		0,5012		0,3887		
Observasi		76		76		

Keterangan FAB = proporsi anggota dewan komisaris dan direksi yang terafiliasi dengan keluarga; FOWN = proporsi kepemilikan keluarga; SIZE = log natural dari total asset; CASS = proporsi aset tetap dari total asset; PROF = return on asset; LEV = tingkat leverage (total liabilities/total asset); AGE = log natural dari tanggal tercatat dalam bursa.

Keterangan: *** signifikan pada level 0,01
 ** signifikan pada level 0,05
 * signifikan pada level 0,10

Analisis Hasil Regresi Model Hipotesis 2

Hasil regresi model 2 menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap implementasi penerapan praktek tata kelola perusahaan. Hasil dari regresi ini sejalan dengan hasil pengujian dari Haque, Arun, & Kirkpatrick (2011). Bebchuk dan Neeman (2005) juga menjelaskan mengenai bagaimana keluarga sebagai salah satu kelompok kepentingan dominan pada perusahaan dengan persentase kepemilikan keluarga yang tinggi akan mengutamakan kepentingannya. Untuk menjaga kepentingan keluarga dan memanfaatkan kendalinya dalam mengambil keuntungan melalui ekspropriasi maka perusahaan dengan kepemilikan keluarga yang besar akan menjaga *status quo* untuk tidak menerapkan tata kelola perusahaan dengan baik. Sedangkan proposi dewan komisaris dan direksi yang berasal dari keluarga tidak ber-

pengaruh signifikan terhadap praktek tata kelola perusahaan tetapi menunjukkan arah yang sama dengan prediksinya yang negatif. Hal ini menunjukkan bahwa adanya direksi dan komisaris yang terafiliasi keluarga tidak memiliki pengaruh yang kuat dalam mendorong perusahaan untuk tidak mengimplementasikan penerapan CG yang baik. Hal ini sangat dimungkinkan karena dalam komposisi direksi dan komisaris juga terdapat anggota direksi dan komisaris yang merupakan anggota independen dalam arti bukan bagian dari keluarga yang mengendalikan perusahaan. Dengan demikian pengaruh dari direksi dan komisaris independen cukup kuat untuk memaksa perusahaan dalam mengimplementasikan sistem tata kelola perusahaan sehingga kepentingan pemegang saham minoritas atau non pengendali dapat terjaga.

Tabel 4: Hasil Regresi OLS Model Hipotesis 2

CGI = ? + ?1(FAB) + ?2(FEXC) + ?3(FOWN) + ?4(SIZE) + ?5(CASS) + ?6(PROF) + ?7(LEV) + ?8(AGE) + ?9(INDS dummies) + ?							
H1:Kepemilikan keluarga serta komposisi dewan komisaris dan direksi terafiliasi keluarga memiliki pengaruh negatif terhadap penerapan tata kelola perusahaan							
Variabel Dependen CGI							
Variabel	Ekspektasi	1			2		
		Coeff.	Prob. T	Sig	Coeff.	Prob. T	Sig
C		-1,1772	0,0070	***	-1,1913	0,0020	***
FAB	-	0,0094	0,9400		-0,0107	0,9340	
FEXC	-	-0,0091	0,8100		-0,0109	0,7590	
FOWN	-	-0,1044	0,0360	**	-0,1092	0,0300	**
SIZE	+	0,0514	0,0010	***	0,0531	0,0000	***
CASS	-	0,0081	0,9040		0,0598	0,3060	
PROF	+	0,2974	0,0260	**	0,2907	0,0260	**
LEV	-	0,0182	0,7140		0,0266	0,5840	
AGE	+	0,0135	0,2610		-0,0065	0,5500	
INDS Dummy		Ya		Tidak			
F-Statistic		4,11***		5,07***			
R-square		0,3837		0,30270			
Observasi		76		76			

Keterangan: CGI = indeks ASEAN CG Scorecard; FAB = proporsi anggota dewan komisaris dan direksi yang terafiliasi dengan keluarga; FEXC = variabel dummy ketua dewan direksi yang berasal dari keluarga pengendali (1 bila ketua dewan direksi berasal dari keluarga pengendali); FOWN = proporsi kepemilikan keluarga; SIZE = log natural dari total asset; CASS = proporsi aset tetap dari total asset; PROF = return on asset; LEV = tingkat leverage (total liabilities/total asset); AGE = log natural dari tanggal tercatat dalam bursa.

Keterangan: *** signifikan pada level 0,01

** signifikan pada level 0,05

* signifikan pada level 0,10

Analisis Hasil Regresi Model Hipotesis 3

Hasil regresi model 3 menunjukkan bahwa hubungan politik tidak terbukti berpengaruh negatif terhadap implementasi praktek tata kelola perusahaan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Haque, Arun, dan Kirkpatrick (2011) yang membuktikan bahwa adanya hubungan atau kepentingan politik berpengaruh negatif terhadap implementasi praktek tata kelola perusahaan.

Hal ini dapat dijelaskan bahwa perusahaan yang memiliki hubungan politik belum tentu tidak menerapkan tata kelola perusahaan dengan baik. Perusahaan dapat saja menerapkan tata kelola perusahaan dan juga memanfaatkan hubungan politiknya untuk meningkatkan nilai perusahaannya. Hubungan politik memberikan efek terhadap nilai perusahaan melalui arus kas yang lebih nyata dibandingkan

dengan tata kelola perusahaan yang tidak langsung terlihat. Jadi adanya hubungan politik ternyata lebih banyak dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan perusahaan yang akan berdampak pada kinerja perusahaan bukan untuk menggunakan pengaruh politiknya tersebut dalam rangka mencegah penerapan tata kelola perusahaan (Sthienchoak 2013).

Pengaruh Variabel Kontrol

Semakin besar perusahaan maka kebutuhan akan tata kelola yang lebih baik pun akan timbul agar dapat mengatasi konflik keagenan yang lebih besar (Jensen & Meckling 1976). Hasil ini juga sejalan dengan penelitian mengenai penerapan tata kelola perusahaan sebelumnya oleh Haque, Arun, dan Kirkpatrick (2011) dan Siagian (2011).

Tabel 5: Hasil Regresi OLS Model Hipotesis 3

CGI = ? + ?1(PCON) + ?2(SIZE) + ?3(CASS) + ?4(PROF) + ?5(LEV) + ?6(AGE) + ?7(INDS dummies) + ?										
H1: Hubungan politik perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap penerapan tata kelola perusahaan										
Variabel Dependen										
CGI										
Variabel	Ekspektasi	1			2			3		
		Coeff.	Prob. T	Sig	Coeff.	Prob. T	Sig	Coeff.	Prob. T	Sig
C		-1,1772	0,0040	***	-1,1913	0,0000	***	-1,1913	0,0090	***
PCON	-	0,0132	0,6280		0,0117	0,6660		0,0106	0,6880	
FAB	-		0,8100					0,0135	0,9150	
FEXC	-		0,0360					-0,0102	0,7910	
FOWN	-		0,0010					-0,1044	0,0380	**
SIZE	+	0,0541	0,0000	***	0,0589	0,0000	***	0,0507	0,0010	***
CASS	-	-0,0148	0,8330		0,0634	0,2980		-0,0116	0,8650	
PROF	+	0,2453	0,0720	*	0,2329	0,0820	*	0,2952	0,0280	*
LEV	-	-0,0022	0,9630		0,0048	0,9200		0,017	0,7330	
AGE	+	0,0140	0,2580		-0,0077	0,4950		0,0137	0,2570	
INDS Dummy			Ya	Tidak				Ya		
F-Statistic		3,78***		5,07***				3,81***		
R-square		0,3251		0,30270				0,3750		
Observasi		76		76				76		

Keterangan: CGI = indeks ASEAN CG Scorecard; PCON = variabel dummy hubungan politik perusahaan (1 bila ada hubungan politik); FAB = proporsi anggota dewan komisaris dan direksi yang terafiliasi dengan keluarga; FEXC = variabel dummy ketua dewan direksi yang berasal dari keluarga pengendali (1 bila ketua dewan direksi berasal dari keluarga pengendali); FOWN = proporsi kepemilikan keluarga; SIZE = log natural dari total asset; CASS = proporsi aset tetap dari total asset; PROF = return on asset; LEV = tingkat leverage (total liabilities/total asset); AGE = log natural dari tanggal tercatat dalam bursa.

Keterangan: *** signifikan pada level 0,01
 ** signifikan pada level 0,05
 * signifikan pada level 0,10

Variabel profitabilitas menunjukkan hubungan positif dengan tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan yang buruk merupakan salah satu penyebab dari profitabilitas perusahaan yang kurang baik (Joh 2003). Profitabilitas yang kurang baik dapat juga menjadi indikasi dari tata kelola yang kurang baik.

SIMPULAN

simpulan

Secara keseluruhan, penelitian ini membuktikan bahwa semakin besar kepemilikan keluarga semakin besar pula insentif keluarga untuk menempatkan anggota keluarga ataupun pihak afiliasinya untuk memegang posisi penting dalam manajemen perusahaan yaitu sebagai direksi perusahaan ataupun sebagai anggota dewan komisaris perusahaan (Anderson dan Reeb 2005). Hal ini menyebabkan keluarga dapat memanfaatkan kendalinya untuk mengambil keuntungan dari pemegang saham minoritas melalui ekspropriasi.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga terbukti secara empiris memiliki pengaruh negatif terhadap penerapan tata kelola perusahaan. Sejalan dengan kesimpulan sebelumnya bahwa proporsi kepemilikan keluarga yang tinggi dan kendali atas perusahaan membuat keluarga dapat mengambil keuntungan dari pemegang saham minoritas melalui ekspropriasi. Mekanisme tata kelola perusahaan ialah salah satu cara untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas. Keluarga akan mempertahankan kontrolnya untuk tetap dapat memperoleh keuntungan dari pemegang saham minoritas. Oleh karena itu penerapan tata kelola perusahaan yang proporsi kepemilikan keluarganya tinggi akan tidak dijalankan dengan baik (Haque, Arun, dan Kirkpatrick 2011).

Hubungan politik perusahaan tidak terbukti secara empiris dapat memberikan pengaruh negatif terhadap penerapan tata kelola perusahaan. Adanya hubungan politik ternyata lebih banyak dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan perusahaan yang

akan berdampak pada kinerja perusahaan bukan untuk menggunakan pengaruh politiknya tersebut dalam rangka mencegah penerapan tata kelola perusahaan.

Keterbatasan

Penelitian ini terbatas hanya menggunakan sampel perusahaan dari tahun 2012. Jumlah perusahaan yang memiliki nilai indeks dari ASEAN CG *Scorecard* juga sangat terbatas, hanya seratus perusahaan yang memiliki kapitalisasi pasar yang tertinggi sehingga jumlah observasi di dalam penelitian ini menjadi sangat terbatas hanya satu periode dengan jumlah perusahaan sebanyak 76. Keterbatasan jumlah sampel ini dapat memberikan gambaran yang kurang menyeluruh dari kondisi perusahaan-perusahaan terbuka di Indonesia

Selain jumlah observasi yang terbatas, penilaian terhadap variabel hubungan politik perusahaan juga tidak sepenuhnya objektif. Kriteria-kriteria yang digunakan di dalam penelitian ini dan penelitian-penelitian sebelumnya (Faccio 2006; Wulandari 2012) masih terdapat subjektivitas penilai di dalamnya. Selain itu juga terdapat keterbatasan sumber informasi yang dapat dipercaya yang disebabkan keterbatasan waktu penelitian di dalam proses penilaian hubungan politik perusahaan.

Saran

Untuk penelitian selanjutnya, pengukuran penerapan tata kelola perusahaan dapat menggunakan alternatif indeks tata kelola lain bila memungkinkan sehingga jumlah sampel penelitian dapat menjadi lebih luas. Selain itu untuk mencari data tentang hubungan politik, mungkin dapat diperluas sumber datanya melalui pencarian secara komprehensif di media internet maupun media informasi lainnya misalnya artikel di koran ataupun majalah.

Implikasi Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi regulator untuk membuat kebijakan atau aturan yang ketat untuk memaksa implementasi penerapan Tata Kelola Perusa-

haan. Hal ini disebabkan hampir sebagian besar perusahaan di Indonesia memiliki struktur kepemilikan yang terkonsentrasi dengan pengendali utama ditangan keluarga.

Disamping itu dengan terbuktinya bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap pemilihan anggota direksi dan komisaris, maka regulator diharapkan dapat memberikan kriteria yang lebih ketat untuk perusahaan dalam menunjuk Direksi dan komisaris perusahaan jika komisaris bukan dari golongan yang independen sehingga kepentingan pemegang saham minoritas dapat terjaga.

DAFTAR REFERENSI

- ACMF. (2011). *ASEAN Corporate Governance Scorecard*. ACMF.
- Asian Development Bank (ADB). 2014. *ASEAN CG scorecard, country reports and assessment 2013-2014*. Thailand.
- Amelia, H. 2013. Analisis pengaruh hubungan politik dan kepemilikan keluarga terhadap biaya utang dan biaya ekuitas: Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. *Skripsi.*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Anderson, R. C., dan D. M. Reeb. 2005. Founding-family ownership and firm performance: Evidence from the S&P 500. *Journal of Finance* 58 (3): 1301-1328.
- Ang, J. S., R. A. Cole, dan J. W. Lin, J. W. (2000). Agency Costs and Ownership Structure. *The Journal of Finance* 55 (1): 81-106.
- Arifin, Z. 2003. Masalah agensi dan mekanisme kontrol pada perusahaan publik Indonesia. *Disertasi.*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Bebchuk, L., & Neeman, Z. (2005). A political economy model of investor protection. [http://www.law.harvard.edu/faculty/bebchuk/pdfs/Political%20Economy%20](http://www.law.harvard.edu/faculty/bebchuk/pdfs/Political%20Economy%20Model%2003-06-06%20B103.pdf)
- [Model 03-06-06 B103.pdf](http://www.law.harvard.edu/faculty/bebchuk/pdfs/Political%20Economy%20Model%2003-06-06%20B103.pdf) (diakses 20 Februari 2014).
- Black, B. S., H. Jang, H, dan W. Kim. 2006. Does corporate governance predict firms' market value? Evidence from Korea. *Journal of Law, Economics, and Organization* 22 (2): 366-413.
- Boubakri, N., J. C. Cosset, dan W. Saffar. 2008. Political connection of newly privatized firms. *Journal of Corporate Finance* 14 (5): 654-673.
- Carney, R. W., dan T. B. Child. 2013. Changes to the ownership and control of east asian corporations between 1996 and 2008: The primacy of politics. *Journal of Financial Economics* 107 (2): 494-513.
- Claessens, S., S. Djankov, dan L. Lang. 2000. The separation of ownership and control in east asian corporations. *Journal of Financial Economics* 58 (1-2): 81-112.
- Claessens, S., S. Djankov, J. Fan, L. Lang. 2002. Disentangling the incentive and entrenchment effects of large shareholdings. *Journal of Finance* 57 (6): 2741-2771.
- Diyanty, V. 2012. Pengaruh kepemilikan pengendali akhir terhadap transaksi pihak berelasi dan kualitas laba. *Disertasi.*, Program Pascasarjana Akuntansi, Universitas Indonesia.
- Faccio, M. 2006. Politically connected firms. *The American Economic Review* 96 (1): 369-386.
- Faccio, M. 2007. The characteristics of politically connected firms. *Purdue CIBER Working Papers*, Paper 51.
- Faccio, M., L. Lang, dan L. Young. 2001. Dividends and expropriation. *American Economic Review* 91 (1): 54-78.
- Fama, E., dan M. Jensen. 1983. Separation of ownership and control. *Journal of Law and Economics* 26 (2): 301-325.

- Fisman, R. 2001. Estimating the value of political connection. *The American Economic Review* 91 (4): 1095-1102.
- Goldman, E., J. Rocholl, dan J. So. 2009. Do politically connected boards affect firm value? *The Review of Financial Studies* 22 (6): 2331-2360.
- Gujarati, D. 2004. *Basic econometrics 4th edition*. New York: McGraw Hill.
- Haggard P, M. Taylor-Clarke, S. Kennett. 2003. Tactile perception, cortical representation and the bodily self. *Current Biology* 13 (5): 170-173.
- Haque, F., T. Arun, dan C. Kirkpatrick. 2011. The political economy of corporate governance in developing economies: The case of Bangladesh. *Research in International Business and Finance* 25 (2): 169-182.
- International Finance Corporation (IFC). 2009. *Practical guide to corporate governance, Experiences from Latin American companies circle*. Washington DC: IFC.
- Indonesian Institute for Corporate Directorship IICD. 2013. The Result of top 30 PLCs, ASEAN CG scorecard assessment.. iicd.or.id
- Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG). 2009. *Good corporate governance dalam perspektif manajemen stratejik*. Jakarta: IICG.
- Jensen, M. C., dan W. H. Meckling. 1976. Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost and ownership structure. *Journal of Financial Economics* 3 (4): 305-360.
- Joh, W. S. 2003. Corporate governance and firm profitability: Evidence from Korea before the economic crisis. *Journal of Financial Economics* 68 (2): 287-322.
- Kaihatu, T. S. 2006. Good corporate governance dan penerapannya di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Manajemen* 8 (1): 1-9.
- Klapper, L. F., dan I. Love. 2004. Corporate governance, investor protection, and firm performance in emerging markets. *Journal of Corporate Finance* 10: 703-728.
- La Porta, R., F. L. Silanes, dan A. Shleifer. 1999. Corporate ownership around the world. *The Journal of Finance* 54 (2): 471-517.
- Leuz, C., dan F. O. Gee. 2006. Political relationships, global financing, and corporate transparency: Evidence from Indonesia. *Journal of Financial Economics* 81 (2): 411-439.
- Micco, A., U. Panizza, dan M. Yanez. 2007. Bank ownership and performance, does politic matter? . *Journal of Banking & Finance* 31 (1): 219-241.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). 2004. *OECD principals of corporate governance*. <http://www.oecd.org/corporate/ca/corporategovernanceprinciples/31557724.pdf> (diakses 14 Februari 2014).
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). 2008. *Using the OECD principles of good governance: A Board perspective*. <http://www.oecd.org/corporate/ca/corporategovernanceprinciples/40823806.pdf> (diakses 14 Februari 2014).
- Pagano, M., dan P. F. Volpin. 2005. The political economy of corporate governance. *American Economic Review* 95 (4): 1005-1030.
- Purwoto, L. (2011). Pengaruh Koneksi Politis, Kepemilikan Pemerintah, dan Keburaman Laporan Keuangan Terhadap Kesinkronan dan Risiko Crash Harga Saham. *Disertasi.*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada.
- Shleifer, A., dan R. Vishny. 1997. A survey of corporate governance. *Journal of Finance* 52 (2): 737-783.

- Siagian, F. T. 2011. Ownership structure and governance implementation: Evidence from Indonesia. *International Journal of Business, Humanities and Technology* 1 (3): 187-202.
- Siagian, F. T., S. V. Siregar, dan Y. Rahadian. 2013. Corporate governance, disclosure quality, ownership structure, and firm value. *Journal of Accounting in Emerging Economics* 3 (1): 4-20.
- Sthienchoak, J. 2013. Valuing corporate governance in politically connected firms: A study of Thailand. Ph.D diss., Tuft University.
- Susilo, F. A. (2013). Pengaruh moderasi ukuran perusahaan, kualitas audit, dan prediksi kebangkrutan terhadap hubungan antara tingkat pengungkapan laporan tahunan Serta hubungan politik terhadap cost of equity capital. Skripsi., Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Vermonte, P. J. 2012. Mendanai partai politik: Problem dan beberapa alternatif solusinya. *Analisis CSIS* 31 (1) 82-94.
- Villalonga, B., dan R. Amit. 2006. How do family ownership, control and management affect firm value? *Journal of Financial Economics* 80: 285-417.
- Wulandari, T. 2012. Analisis pengaruh political connection dan struktur kepemilikan terhadap kinerja perusahaan. Skripsi., Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

PENGARUH PAJAK, TUNNELING INCENTIVE DAN EXCHANGE RATE PADA KEPUTUSAN TRANSFER PRICING PERUSAHAAN

Marfuah

Accounting Department, Faculty Economics
Universitas Islam Indonesia
e-mail: marfuah@uii.ac.id

Andri Puren Noor Azizah

Accounting Department, Faculty Economics
Universitas Islam Indonesia
e-mail: andripuren.zezen@yahoo.com

Abstract

The objective of this research is to analyze the influence of tax, tunneling incentive and exchange rate on transfer pricing decision in manufacturing companies. The population of this study is all of the manufacturing companies listed with the Indonesia Stock Exchange from 2010 to 2012. Sampling method used in this study is purposive sampling. The results of logistic regression analysis demonstrate that out of the three hypotheses tested, only the second hypothesis shows a positive effect of tunneling incentive to the company transfer pricing decisions. The analysis of the first hypothesis demonstrates that tax has a significant negative effect on the company transfer pricing decisions. Furthermore, the analysis of the third hypothesis about the effect of exchange rate on transfer pricing decisions shows a positive effect but not significant.

Keywords: *transfer pricing, tax, tunneling incentive, exchange rate*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pajak, tunneling incentive dan exchange rate terhadap keputusan transfer pricing perusahaan manufaktur. Populasi sampel studi ini adalah semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010 hingga 2012. Metode sampel yang digunakan pada studi ini adalah purposive sampling. Berdasarkan pada hasil analisis regresi logistik ditemukan bahwa dari tiga hipotesis yang diuji, hanya hipotesis kedua tentang pengaruh positif tunneling incentive terhadap transfer pricing yang didukung. Pengujian hipotesis pertama tentang pengaruh positif pajak terhadap transfer pricing, hasilnya justru berlawanan arah dengan yang diprediksi, yaitu pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap keputusan transfer pricing perusahaan. Sementara pengujian hipotesis ketiga tentang pengaruh exchange rate terhadap transfer pricing menunjukkan arah positif tetapi tidak signifikan.

Kata kunci: *transfer pricing, pajak, tunneling incentive, exchange rate*

PENDAHULUAN

Fenomena globalisasi secara tidak langsung mendorong merebaknya konglomerasi dan divisionalisasi perusahaan. Dalam lingkungan perusahaan multinasional dan konglomerasi serta divisionalisasi terjadi berbagai transaksi antar anggota (divisi) yang meliputi penjualan barang dan jasa, lisensi hak dan harta tak ber-

wujud lainnya, penyediaan pinjaman dan lain sebagainya. Transaksi-transaksi yang terjadi dalam lingkungan perusahaan seperti ini nantinya akan menyulitkan dalam penentuan harga yang harus ditransfer. Penentuan harga atas berbagai transaksi antar anggota atau divisi tersebut lazim disebut dengan *transfer pricing* (Mangoting 2000).

Transfer pricing untuk barang maupun jasa merupakan salah satu dari perbedaan besar yang terjadi antara pengendalian manajemen operasi domestik dan luar negeri. Dalam operasi luar negeri, dibutuhkan beberapa pertimbangan penting lainnya untuk dapat sampai kepada suatu keputusan *transfer pricing*. Pertimbangan-pertimbangan tersebut diantaranya adalah pajak, *tunneling incentive*, dan *exchange rate* (Anthony dan Govindarajan 2011). Menurut Eiteman, Stonehill dan Moffett (2010), penetapan harga barang atau jasa yang ditransfer ke anak perusahaan asing dari suatu perusahaan terafiliasi disebut penetapan *transfer pricing* merupakan metode pertama yang paling utama dalam mentransfer dana keluar dari anak perusahaan asing.

Salah satu hal utama yang dihadapi dalam investasi asing adalah *transfer pricing*. Praktik *transfer pricing* ini pada awalnya dilakukan oleh perusahaan semata-mata hanya untuk menilai kinerja antar anggota atau divisi perusahaan, tetapi seiring dengan perkembangan zaman, praktik *transfer pricing* sering juga dipakai untuk manajemen pajak yaitu sebuah usaha untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar (Harimurti 2007).

Dari sisi pemerintahan, *transfer pricing* diyakini mengakibatkan berkurang atau hilangnya potensi penerimaan pajak suatu negara karena perusahaan multi-nasional cenderung menggeser kewajiban perpajakannya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi (*high tax countries*) ke negara-negara yang menerapkan tarif pajak rendah (*low tax countries*). Di pihak lain dari sisi bisnis, perusahaan cenderung berupaya meminimalkan biaya-biaya (*cost efficiency*) termasuk di dalamnya minimalisasi pembayaran pajak perusahaan (*corporate income tax*). Bagi korporasi multinasional, perusahaan berskala global (*multi-national corporations*), *transfer pricing* dipercaya menjadi salah satu strategi yang efektif untuk memenangkan persaingan dalam memperebutkan sumber-sumber daya yang terbatas (Santoso 2004).

Tujuan utama dari perencanaan pajak multinasional adalah meminimalkan beban pajak seluruh dunia bagi perusahaan. Pajak

memiliki dampak besar terhadap laba bersih dan arus kas perusahaan melalui pengaruhnya terhadap keputusan investasi asing, struktur keuangan, penentuan biaya modal, dan sebagainya (Eiteman, Stonehill, dan Moffett 2010). Oleh karena itu, adanya praktik *transfer pricing* inilah yang sering dikaitkan hubungannya dengan adanya pajak.

Tunneling juga berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Gilson dan Gordon (2003) mengidentifikasi dua kemungkinan cara yang dapat dilakukan pemegang saham pengendali untuk mendapatkan manfaat privat atas kontrol dari kebijakan perusahaan yaitu melalui kebijakan operasi perusahaan dan kebijakan kontraktual dengan pihak lain. Bentuk-bentuk manfaat privat yang dapat diperoleh melalui kebijakan operasi perusahaan antara lain gaji dan tunjangan tinggi, bonus dan kompensasi besar, serta dividen. Sedangkan cara untuk memperoleh manfaat privat melalui kebijakan kontraktual antara lain dilakukan melalui *tunneling*. *Tunneling* merupakan transfer sumber daya keluar dari perusahaan untuk kepentingan pemegang saham pengendali (Johnson *et al.* 2000)

Arus kas perusahaan multinasional denominasikan dalam beberapa mata uang dimana nilai setiap mata uang relatif kepada nilai dolar akan berbeda seiring dengan perbedaan waktu. *Exchange rate* yang berbeda-beda inilah yang nantinya akan mempengaruhi praktik *transfer pricing* pada perusahaan multinasional. Sebagai contoh, sebagian besar perusahaan multinasional meminta pertukaran satu valuta dengan valuta yang lain untuk melakukan pembayaran, karena nilai tukar valuta yang terus-menerus berfluktuasi, jumlah kas yang dibutuhkan untuk melakukan pembayaran juga tidak pasti. Konsekuensinya adalah jumlah unit valuta negara asal yang dibutuhkan untuk membayar bahan baku dari luar negeri bisa berubah-ubah walaupun pemasoknya tidak merubah harga. Berdasarkan latar belakang tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pajak, *tunneling incentive* dan *exchange rate* terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUSMUSAN HIPOTESIS

Pengaruh Pajak terhadap Keputusan *Transfer Pricing*

Berbagai penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan *transfer pricing* perusahaan telah dilakukan. Yuniasih, Rasmini, dan Wirakusuma (2012) melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008-2010. Hasil penelitian menemukan adanya pengaruh positif pajak terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan. Beban pajak yang semakin besar memicu perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan harapan dapat menekan beban tersebut.

Suatu perusahaan yang melakukan bisnis multinasional, dalam hal ini ekspor dan impor akan menghadapi berbagai jenis pajak. Perbedaan beban pajak dalam bisnis multinasional sudah biasa terjadi. Sehingga negara-negara dengan perusahaannya yang kurang maju sering mengenakan tarif pajak yang lebih rendah, sedangkan negara-negara dengan perusahaannya yang maju justru mengenakan tarif pajak yang tinggi.

Dengan adanya hal tersebut, maka perusahaan-perusahaan maju akan berpikir bagaimana caranya untuk menekan pajak mereka karena pajak merupakan pengurang laba. Apabila pajak dapat ditekan, maka dapat mengurangi *cost* perusahaan. Salah satu cara yang digunakan untuk menekan pajak adalah *transfer pricing*. Melalui *transfer pricing* ini perusahaan multinasional yang bersangkutan dapat menggeser kewajiban perpajakannya dari anggota atau anak perusahaannya di negara-negara yang menetapkan tarif pajak yang lebih tinggi (*high tax country*) ke anggota atau anak perusahaannya di negara-negara yang menetapkan tarif pajak yang lebih rendah (*low tax country*).

Apabila dalam suatu perusahaan terdapat pajak yang tinggi, maka tingkat kegiatan *transfer pricing* perusahaan tersebut ke anggota atau anak perusahaannya yang menerapkan tarif pajak lebih rendah akan meningkat dan sebaliknya. Berdasarkan rumusan di atas

maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Pajak berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan

Pengaruh *Tunneling Incentive* Terhadap Keputusan *Transfer Pricing*

Yuniasih, Rasmini, dan Wirakusuma (2012) menemukan adanya pengaruh positif *tunneling incentive* pada keputusan *transfer pricing* perusahaan. Transaksi pihak terkait lebih umum digunakan untuk tujuan transfer kekayaan daripada pembayaran dividen karena perusahaan yang terdaftar harus mendistribusikan dividen kepada perusahaan induk dan pemegang saham minoritas lainnya. Kondisi yang unik dimana kepemilikan saham pada perusahaan publik di Indonesia cenderung terkonsentrasi sehingga ada kecenderungan pemegang saham mayoritas untuk melakukan *tunneling*.

Salah satu bentuk *tunneling* adalah peran pemegang saham pengendali dalam memindahkan sumber daya perusahaan melalui transaksi hubungan istimewa. Transaksi tersebut mencakup kontrak penjualan seperti *transfer pricing*. Dengan diadakannya *tunneling* oleh pemegang saham pengendali, maka tidak dilakukan pembayaran dividen sehingga pemegang saham minoritas kurang diuntungkan.

Pemegang saham pengendali melakukan kegiatan *tunneling* bertujuan untuk mengalihkan asetnya sementara ke anggota atau anak perusahaan dengan *transfer pricing* agar dapat menekan beban-beban yang nantinya dapat mengurangi laba perusahaan. Apabila kegiatan *tunneling* semakin banyak dilakukan, maka kegiatan pengalihan dengan *transfer pricing* juga akan meningkat dan sebaliknya.

Berdasarkan rumusan di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2: *Tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan.

Pengaruh *Exchange Rate* Terhadap Keputusan *Transfer Pricing*

Exchange rate memiliki dua efek akuntansi, yaitu untuk memasukkan transaksi mata uang

asing dan pengungkapan keuntungan dan/atau kerugian yang dapat mempengaruhi keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Akibatnya, perusahaan multinasional mungkin mencoba untuk mengurangi risiko nilai tukar (*exchange rate*) mata uang asing dengan memindahkan dana ke mata uang yang kuat melalui *transfer pricing* untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan secara keseluruhan (Chan, Landry, dan Jalbert 2002). Berdasarkan rumusan di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3: *Exchange rate* berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan.

Model Kerangka Pemikiran Penelitian

Model kerangka pemikiran penelitian yang menggambarkan hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen disajikan pada Gambar 1.

METODA PENELITIAN

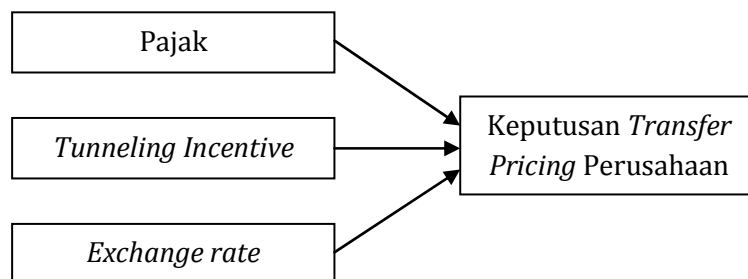
Pada bagian ini dibahas populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, variabel dan

pengukurannya, hipotesis operasional serta metode analisis data.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria, yaitu; (1) Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, (2) Perusahaan sampel dikendalikan oleh perusahaan asing dengan persentase kepemilikan 25% atau lebih, (3) Perusahaan sampel tidak mengalami kerugian selama periode pengamatan (2010–2012), dan (4) Perusahaan sampel mempunyai data laba/rugi selisih kurs.

Berdasarkan kriteria tersebut terpilih sampel sebanyak 84 selama 3 tahun. Adapun proses pemilihan sampel disajikan pada Tabel 1.



Gambar 1: Model kerangka pemikiran penelitian

Tabel 1: Proses Pemilihan Sampel

Keterangan	2010	2011	2012
Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	135	137	137
Perusahaan tidak memiliki kepemilikan saham di atas 25% sebagai pemegang saham pengendali oleh perusahaan asing.	(76)	(73)	(73)
Perusahaan sampel yang mengalami kerugian usaha	(12)	(12)	(17)
Perusahaan sampel yang tidak memiliki laba/ rugi selisih kurs	(11)	(22)	(29)
Jumlah Sampel Akhir	36	30	18

Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data laporan tahunan (*annual reports*) perusahaan manufaktur pada periode pelaporan tahun 2010 hingga tahun 2012 dan *Indonesia Capital Market Dictionary* (ICMD). *Annual reports* dan ICMD tersebut didapat dari pojok Bursa Efek Indonesia (BEI) Universitas Islam Indonesia dan melalui *websitewww.idx.co.id*.

Variabel dan Pengukurannya

Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *transfer pricing*. Keberadaan variabel *transfer pricing* didasarkan pada ada/tidaknya data penjualan pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Yuniasih, Rasmini, dan Wirakusuma 2012). Perusahaan yang melakukan penjualan pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa diberi nilai 1 dan perusahaan yang tidak melakukan penjualan pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa diberi nilai 0.

Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari pajak, *tunneling incentive* dan *exchange rate*.

Pajak

Variabel pajak dalam penelitian ini dihitung dengan *effective tax rate* yang merupakan perbandingan *tax expense* dikurangi dengan *differed tax expense* kemudian dibagi dengan laba kena pajak (Yuniasih, Rasmini, dan Wirakusuma 2012).

$$\text{Effective tax rate} = \frac{\text{Tax expense} - \text{deffered tax expense}}{\text{Laba ekna pajak}}$$

Tunneling Incentive

Variabel *tunneling incentive* diukur dengan menggunakan persentase kepemilikan saham di atas 25% sebagai pemegang saham pengendali oleh perusahaan asing.

Exchange Rate

Seperti dalam penelitian Chan, Landry, dan Jalbert (2002), variabel *exchange rate* diukur dari keuntungan atau kerugian transaksi perusahaan yang menggunakan mata uang asing. *Exchange rate* dihitung dari laba atau rugi selisih kurs dibagi dengan laba atau rugi penjualan dengan rumus berikut ini:

$$\text{Exchange rate} = \frac{\text{Laba rugi selisih kurs}}{\text{Laba rugi sebelum pajak}}$$

Metode Analisis Data

Alat analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian adalah analisis regresi logistik (*Binary Logistic Resresion*). Teknik ini digunakan karena variabel dependen dalam penelitian ini yaitu *transfer pricing* merupakan variabel *dummy*. Adapun model regresi logistik disajikan dalam persamaan sebagai berikut:

$$\text{Logit (Y)} = \ln \left[\frac{Y}{1-Y} \right] = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + e$$

Keterangan:

Y = *transfer pricing*

β_0 = Konstanta

$\beta_1 - \beta_3$ = Koefisien Regresi

X₁ = pajak

X₂ = *tunneling incentive*

X₃ = *exchange rate*

e = *Error Term*, yaitu tingkat kesalahan penduga dalam penelitian

Kriteria pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah Ho ditolak jika nilai signifikansi Wald < 0,05 dan masing-masing koefisien regresi sesuai dengan arah yang diprediksikan. Uji sig-Wald digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen mempengaruhi variabel dependen di dalam model regresi logistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini membahas hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi statistik deskriptif, uji multikoliaritas, analisis regresi logistik dan uji hipotesis.

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif ini menggambarkan tentang data masing-masing variabel yang terdiri dari nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. Data yang diteliti dalam analisis statistik deskriptif adalah *transfer pricing*, pajak, *tunneling incentive*, dan *exchange rate*. Hasil dari deskriptif statistik dapat dilihat pada Tabel 2.

Berdasarkan Tabel 2, rata-rata variabel *transfer pricing* adalah 0,75 artinya 75% dari 84 sampel atau sebanyak 63 perusahaan sampel memiliki hubungan istimewa. Variabel pajak mempunyai nilai rata-rata 0,287122, standar deviasi 0,2204298 dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing sebesar -0,5207 dan 1,1838. Variabel *tunneling incentive* mempunyai nilai rata-rata 0,578488 dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing adalah 0,2500 dan 0,9914. *Exchange rate* mempunyai nilai standar deviasi 0,9788911, nilai rata-rata -0,089109 dengan

nilai minimum dan maksimum masing-masing adalah -7,4923 dan 1,4037.

Uji Multikolinearitas

Model regresi yang baik adalah regresi dengan tidak adanya gejala korelasi yang kuat di antara variabel bebasnya. Pengujian multikolinearitas dalam regresi logistik menggunakan matriks korelasi antar variabel bebas untuk melihat besarnya korelasi antar variabel bebas. Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 3.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa tidak ada nilai koefisien korelasi antar variabel yang lebih besar dari 0,8. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas yang serius antar variabel bebas tersebut.

Analisis Regresi Logistik

Hasil uji hipotesis penelitian dengan model regresi logistik disajikan pada Tabel 4.

Persamaan Regresi:

$$Y = 0,662 - 3,460X_1 + 2,656X_2 - 0,433X_3$$

Tabel 2: Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	Nilai Minimum	Nilai Maksimum	Rata - rata	Standar Deviasi
<i>Transfer Pricing (Y)</i>	0	1	0,75	0,436
Pajak (X1)	-0,5207	1,1838	0,287122	0,2204298
<i>Tunneling Incentive (X2)</i>	0,2500	0,9914	0,578488	0,2124351
<i>Exchange rate (X3)</i>	-7,4923	1,4037	-0,089109	0,9788911

Tabel 3: Hasil Uji Multikolinearitas dengan Matriks Korelasi

	Constant	Pajak	<i>Tunneling Incentive</i>	<i>Exchange rate</i>
Constant	1,000	-0,356	-0,782	-0,071
Pajak	-0,356	1,000	-0,195	0,204
<i>Tunneling Incentive</i>	-0,782	-0,195	1,000	-0,033
<i>Exchange rate</i>	-0,071	0,204	-0,033	1,000

Tabel 4: Hasil Uji Regresi Logistik

Variabel	Prediksi	B	S.E.	Wald	Sig.	Exp(B)	Kesimpulan
Pajak (X1)	+	-3,460	1,367	6,403	0,011	0,031	Ha1 tidak didukung
<i>Tunneling Incentive (X2)</i>	+	2,656	1,318	4,059	0,044	14,24	Ha2 didukung
<i>Exchange rate (X3)</i>	+	-0,433	0,364	1,418	0,234	0,648	Ha3 tidak didukung
Constant		0,662	0,789	0,706	0,401	1,939	Ha4 tidak didukung

Hosmer and Lemeshow Test: Chi-square = 4,108; Sig. = 0,847

Overall Model Fit Test : -2 Log Likelihood Block Number = 0 adalah 94,472,

-2 Log Likelihood Block Number = 1 adalah 83,236

Nagel Karke R Square : 0,185

Cox & Snell R Square :0,125

Langkah pertama yang dilakukan adalah menilai kelayakan model regresi. Berdasarkan hasil uji *Hosmer and Lemeshow* diperoleh nilai *Chi-square* sebesar 4,108 dengan sig 0,847. Hal ini menunjukkan bahwa model mampu memprediksi nilai observasi karena cocok dengan data observasinya. Langkah kedua adalah menilai keseluruhan model regresi dengan membandingkan nilai $-2 \text{ Log Likelihood Block Number} = 0$ dan $-2 \text{ Log Likelihood Block Number} = 1$. Adanya penurunan yang signifikan nilai $-2 \text{ Log Likelihood Block Number} = 0$ sebesar 94,472 menjadi 83,236 pada model $-2 \text{ Log Likelihood Block Number} = 1$, menunjukkan bahwa model regresi dengan memasukkan semua variabel independen lebih baik atau dengan kata lain model yang dihipotesiskan fit dengan data. Langkah selanjutnya adalah menguji pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependennya.

Pengaruh Pajak Terhadap Keputusan Transfer Pricing Perusahaan

Berdasarkan tabel di atas, diketahui besarnya koefisien regresi variabel pajak sebesar -3,460 dengan nilai sig- Wald sebesar 0,011. Oleh karena itu hipotesis pertama yang menyatakan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan tidak didukung, karena berdasarkan pengujian hipotesis tersebut pajak justru berpengaruh negatif signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*.

Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin meningkatnya pajak yang dikenakan maka perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa akan menurun atau sebaliknya. Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuniasih, Rasmini, dan Wirakusuma (2012) yang menemukan adanya pengaruh positif pajak terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan. Artinya beban pajak yang semakin besar memicu perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan harapan dapat menekan beban tersebut.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Harimurti

(2007) yang menyatakan bahwa otoritas fiskal (aparatur perpajakan) secara subyektif memandang tujuan dilakukannya *transfer pricing* adalah untuk menghindari pajak. Terkait dengan isu *transfer pricing*, secara umum otoritas fiskal harus memperhatikan dua hal mendasar agar koreksi pajak terhadap dugaan *transfer pricing* mendapat justifikasi yang kuat sehingga perusahaan dapat meminimalkan praktik *transfer pricing*. Kedua hal prinsipil tadi adalah; (1) afiliasi (*associated enterprises*) atau hubungan istimewa (*special relationship*) dan (2) kewajaran atau *arm's length principle*.

Dengan diadakannya kesepakatan *transfer pricing* antara wajib pajak dengan Direktorat Jendral Pajak kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa maka dapat mengurangi terjadinya praktik penyalahgunaan *transfer pricing* oleh perusahaan multinasional. Kesepakatan *transfer pricing* adalah kesepakatan antara wajib pajak dengan Direktorat Jendral Pajak kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*Arm's Length Principle/ALP*) merupakan prinsip yang mengatur bahwa apabila kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sama atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang menjadi pembanding, maka harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa harus sama dengan atau berada dalam rentang harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang jadi pembanding. Hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak No.PER-42/PJ/2011. Aturan ini membahas tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principal*) terkait transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Aturan ini mengharuskan wajib pajak untuk menggunakan nilai pasar wajar dalam bertransaksi dengan pihak istimewa (*related parties*).

Menurut *arm's length principle*, harga-harga transfer seharusnya ditetapkan supaya dapat mencerminkan harga yang disepakati meski transaksi tersebut dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa. Sehingga apabila ada transaksi antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa maka kondisi transaksi tersebut harus sama dengan transaksi antar perusahaan yang tidak memiliki hubungan istimewa.

Pengaruh Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing Perusahaan

Besarnya koefisien regresi variabel *tunneling incentive* yaitu 2,656 dengan nilai sig-Wald sebesar 0,044. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua yang menyatakan *tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan, didukung. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya praktik *tunneling incentive* maka perusahaan akan lebih banyak melakukan *transfer pricing* dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Penelitian ini sesuai dengan yang dilakukan oleh Mutamimah (2009) yang menyatakan bahwa *tunneling* lebih besar terjadi pada struktur kepemilikan terkonsentrasi tinggi dibanding pada struktur kepemilikan terkonsentrasi rendah. Dengan kata lain, *tunneling* lebih besar dilakukan pada pemegang saham mayoritas daripada pemegang saham minoritas. *Tunneling* pada struktur kepemilikan terkonsentrasi disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, pemegang saham mayoritas mempunyai insentif dan kemampuan untuk melakukan transaksi-transaksi dengan harga tertentu. Kedua, lemahnya perlindungan hak-hak pemegang saham minoritas. Ketiga, pemegang saham mayoritas mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi manajemen dalam membuat keputusan-keputusan yang hanya memaksimalkan kepentingan pemegang saham mayoritas dan merugikan kepentingan pemegang saham minoritas.

Tunneling incentive dilakukan oleh pemegang saham pengendali untuk memperoleh manfaat privat yaitu transfer sumber daya

keluar dari perusahaan untuk kepentingan pemegang saham pengendali. Perusahaan melakukan *tunneling* ini dengan tujuan untuk meminimalkan biaya transaksi. Dengan melakukan *tunneling* kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa maka biaya dapat ditekan sehingga lebih ekonomis dibandingkan dengan pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa. Selain itu, perusahaan melakukan *tunneling* dengan tujuan untuk memanipulasi laba. Misalnya, perusahaan men-*tunnel* asetnya kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa yang penyebabnya piutang kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa meningkat sehingga dapat diinterpretasikan sebagai kenaikan laba.

Tunneling juga dapat dilakukan dengan cara menjual produk perusahaan kepada perusahaan yang memiliki hubungan dengan manajer dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga pasar, mempertahankan posisi/jabatan pekerjaannya meskipun mereka sudah tidak kompeten atau berkualitas lagi dalam menjalankan usahanya atau menjual asset perusahaan kepada perusahaan yang memiliki hubungan dengan manajer (pihak terafiliasi).

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2012), ada dua hal yang dipertimbangkan sebagai dorongan bagi perusahaan untuk melakukan *tunneling*. Pertama, struktur kepemilikan. Kedua, tersedianya sumber daya keuangan pada perusahaan yang akan di-*tunnel*. Dengan pengendalian dan pengaruh signifikan yang dimiliki, pemegang saham pengendali dapat mengambil kebijakan yang menguntungkan dirinya, termasuk kebijakan kontraktual dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Ketersediaan sumber daya juga akan menjadi dorongan bagi pemegang saham pengendali untuk men-*tunnel* sumber daya tersebut keluar dari perusahaan untuk kepentingan pemegang saham pengendali.

Pengaruh Exchange rate Terhadap Keputusan Transfer Pricing Perusahaan

Besarnya koefisien regresi variabel *exchange rate* yaitu -0,433 dengan nilai sig-Wald sebesar 0,234. Hal ini menunjukkan bahwa

hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa *exchange rate* berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan, tidak didukung. Artinya besar-kecilnya *exchange rate* tidak mempengaruhi pertimbangan perusahaan apakah perusahaan akan memilih untuk melakukan keputusan *transfer pricing* atau memilih untuk tidak melakukan keputusan *transfer pricing* dalam perusahaan.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Chan, Landry, dan Jalbert (2002) yang menemukan bahwa perusahaan multinasional mungkin mencoba untuk mengurangi risiko nilai tukar (*exchange rate*) mata uang asing dengan memindahkan dana ke mata uang yang kuat melalui *transfer pricing* untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Tidak didukungnya hipotesis ketiga ini kemungkinan disebabkan karena dalam laporan keuangan sampel perusahaan, banyak terdapat kerugian pada laba atau rugi selisih kurs sehingga *exchange rate* tidak menjadi sorotan pokok dalam kecenderungan manajemen memanfaatkan transaksi *transfer pricing*.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis regresi logistik disimpulkan bahwa dari ketiga hipotesis yang diuji, hanya hipotesis kedua tentang pengaruh positif *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing* yang didukung. Pengujian terhadap hipotesis pertama tentang pengaruh positif pajak terhadap *transfer pricing*, hasilnya justru berlawanan arah dengan yang diprediksikan, yaitu pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan maka akan menurunkan keputusan *transfer pricing* perusahaan atau sebaliknya.

Pengujian terhadap hipotesis ketiga tentang pengaruh *exchange rate* terhadap *transfer pricing* menunjukkan arah yang positif tetapi tidak signifikan. Hasil ini mengindikasikan bahwa besar-kecilnya *exchange rate* tidak mempengaruhi pertimbangan perusahaan apakah perusahaan akan memilih untuk melakukan keputusan *transfer pricing*

atau memilih untuk tidak melakukan keputusan *transfer pricing* dalam perusahaan.

Penelitian ini menggunakan sampel dari perusahaan manufaktur tanpa membedakannya antar sektor industri, yang meliputi sektor industri dasar dan kimia, sektor aneka industri, dan sektor industri barang konsumsi. Penelitian berikutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan membandingkan antar sektor industri dalam perusahaan manufaktur sehingga akan diperoleh hasil yang lebih teliti yang memungkinkan hasil yang berbeda di setiap sektor industri tersebut, karena tiap sektor industri mempunyai karakteristik yang berbeda.

DAFTAR REFERENSI

- Anthony, N.R., dan V. Govindarajan. 2011. *Sistem pengendalian manajemen jilid 2*. Tangerang: Kharisma Publishing Group.
- Chan, C., S. P. Landry, dan T. Jalbert. 2002. Effects of exchange rate on international transfer pricing decisions. *International Business & Economics Research Journal* 3 (3): 35-48
- Eiteman, D. K., A. I. Stonehill, dan M. H. Moffett. 2010. *Multinational Business Finance* 12th edition. Pearson. (ESM).
- Harimurti, F. 2007. Aspek perpajakan dalam praktik transfer pricing. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan* 7 (1): 53-61
- Johnson, S., R. La Porta, F. Lopez-de-Silanes, dan A. Shleifer. 2000. Tunneling. *American Economic Review* 90 (2): 22-27.
- Mangoting, Y. 2000. Aspek perpajakan dalam praktek transfer pricing. *Jurnal Akuntansi & Keuangan* 2 (1): 69-82
- Mutamimah. 2009. Tunneling atau value added dalam strategi merger dan akuisisi di Indonesia. *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan* 2 (2): 161-182
- Gilson, R. J., dan J. N. Gordon. 2003. Controlling Controlling Shareholders. Columbia Law School The Center for Law and Economic Studies 435 West 116th St. New York, NY 10027-7201 Working Paper No. 228. June 2003.

- http://www.law.columbia.edu/center_program/law_economics/ (diakses 14 Maret 2014)
- Santoso, I. 2004. Advance pricing agreement dan problematika transfer pricing dari perspektif perpajakan indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 6 (2): 123-139
- Sari, R. C. 2012. Tunneling dan Model Prediksi: Bukti Empiris pada Transaksi Pihak Berelasi. Disertasi. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Yuniasih, N. W., N. K. Rasmini, dan M. G. Wirakusuma. 2012. *Pengaruh pajak dan tunneling incentive pada keputusan transfer pricing perusahaan Manufaktur yang listing di bursa efek indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi 15.